PERGERAKAN SAREKAT ABANG

DAN ESKALASI KONFLIK DALAM PERANG KELAMBIT DI RAWAS

TAHUN 1914—1920

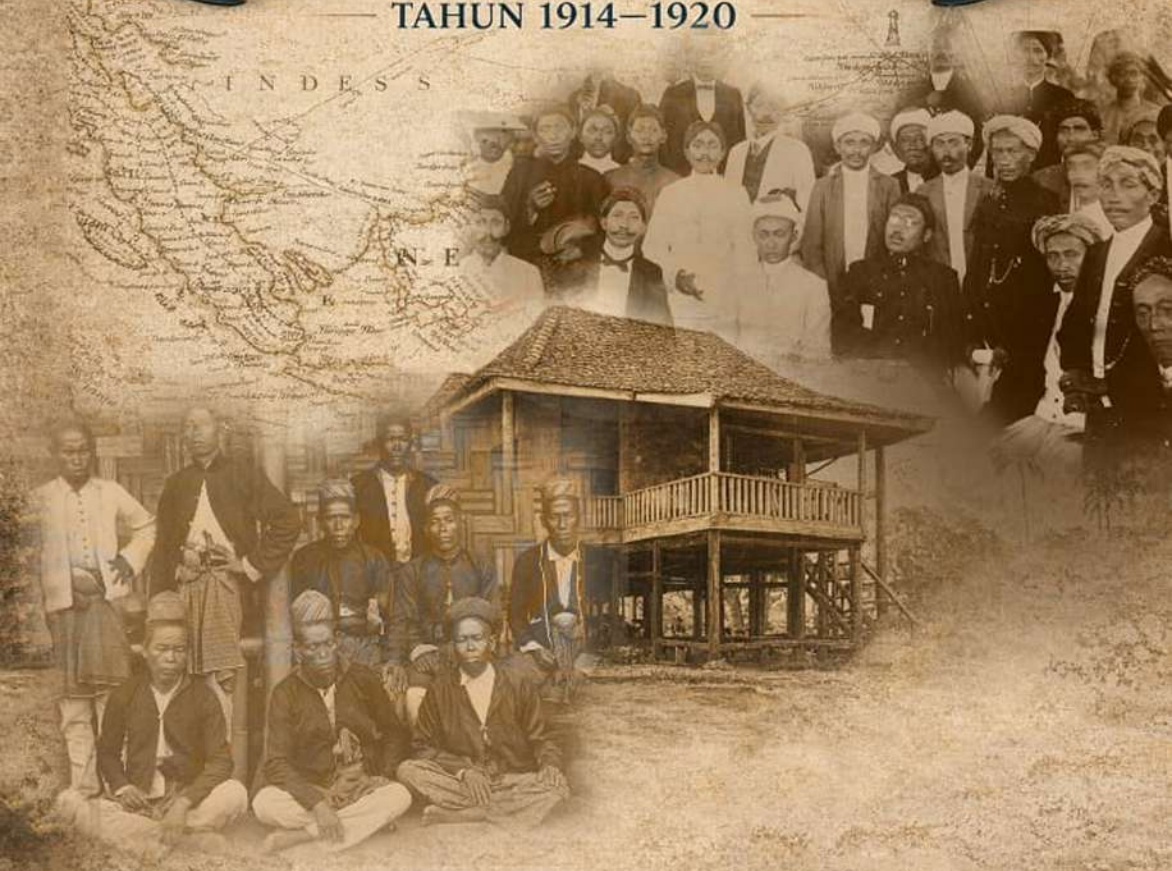

Berlian Susetyo, S.Pd., M.Hum
Prof. Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum
Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si

Pergerakan Sarekat Abang dan Eskalasi Konflik Dalam Perang Kelambit Di Rawas Tahun 1914-1920

Berlian Susetyo, S.Pd., M.Hum
Prof. Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum
Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si

Nakomu, 2026

Pergerakan Sarekat Abang dan Eskalasi Konflik Dalam Perang Kelambit Di Rawas Tahun 1914–1920

Penulis:
Berlian Susetyo, S.Pd., M.Hum
Prof. Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum
Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si

Editor: Lagut, S.Hum., Gr
Tata Sampul: Khoshshol Fairuz
Tata Isi: Kina

Maret, 2026

168hlm.; 15,5cm x 23cm

QRCBN: 62-441-9759-028

Diterbitkan oleh:
CV. Nakomu
Anggota IKAPI (346/JTI/2022)
Cangkring Malang, Sidomulyo, Megaluh, Jombang
Website: penerbitnakomu.com
E-mail: kertasentuh@gmail.com
WA: 085-850-5857-00 atau 0857-3333-7747

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku ini, **Pergerakan Sarekat Abang dan Eskalasi Konflik dalam Perang Kelambit di Rawas Tahun 1914 - 1920**, akhirnya dapat diselesaikan. Penulisan buku ini berangkat dari keprihatinan terhadap minimnya kajian sejarah lokal yang ada di wilayah Rawas (sekarang Kabupaten Musi Rawas Utara), khususnya mengenai pergerakan rakyat dalam menghadapi tekanan kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Perang Kelambit yang melibatkan Sarekat Abang sebagai aktor utama selama ini hanya terselip dalam catatan sejarah dan belum mendapatkan ruang yang memadai dalam narasi resmi sejarah pergerakan nasional.

Buku ini berupaya mengangkat kembali jejak sejarah tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif, memadukan sumber arsip kolonial, tradisi lisan masyarakat Rawas, serta kajian akademik terdahulu. Penulis berharap karya ini tidak hanya menambah khazanah pengetahuan mengenai sejarah gerakan rakyat di Sumatera Selatan, tetapi juga menjadi rujukan bagi peneliti, mahasiswa, guru sejarah, maupun masyarakat umum yang ingin memahami dinamika perlawanan lokal dalam konteks kolonialisme Belanda.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para sejarawan/budayawan, akademisi, dan tokoh masyarakat Rawas yang telah memberikan informasi, dukungan, serta kritik konstruktif selama proses penelitian. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi pengingat bahwa sejarah lokal, betapapun kecilnya, tetap menjadi bagian penting dari mozaik sejarah bangsa.

Palembang, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Permasalahan dan Manfaat Penulisan 17
BAB 2 SELAYANG PANDANG RAWAS 21
A. Situasi dan Kondisi Rawas pada Masa Awal 21
B. Keadaan Politik Pemerintahan di Rawas 47
BAB 3 PERKEMBANGAN SAREKAT ISLAM DI RAWAS 73
A. Proses Masuk Sarekat Islam dan Mobilitasnya di Karesidenan Palembang 73
B. Berdirinya Sarekat Islam di Rawas 79
C. Hubungan antara Sarekat Islam dengan Gerakan Sarekat Abang 84
BAB 4 PERGERAKAN SAREKAT ABANG DI RAWAS 91
A. Faktor Penyebab Terjadinya Gerakan 91
B. Perang Kelambit 1916 97
C. Dampak setelah Perang 106
BAB 5 PENUTUP 115
DAFTAR PUSTAKA 118

GLOSARIUM 125
INDEKS..... 129
LAMPIRAN. Foto Masa Kolonial di Rawas 1877-1925 ... 132
TENTANG PENULIS..... 151

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah Rawas Tahun 1911	30
Tabel 2.	Nama Marga dan Nama Dusun di Rawas (1911)	65
Tabel 3.	Alur Perubahan Birokrasi Pemerintahan Daerah Rawas pada Masa Kolonial Hindia Belanda	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta wilayah *Onder Afdeeling Rawas* (1920)	23
Gambar 2.	Aksara Rencong (KaGaNga/Ulu) yang berkembang dan dipergunakan oleh masyarakat di Rawas, beserta perbandingan dengan daerah lain disekitarnya	27
Gambar 3.	Keadaan Sungai Rawas sebagai sarana transportasi dan kehidupan masyarakat Rawas (1877)	29
Gambar 4.	Pabrik Pengolahan Gambir di Surulangun (1877)	37
Gambar 5.	Keadaan pasar Surulangun di Rawas (1879)	38
Gambar 6.	Perahu kajang dipinggir sungai Rawas (1879)	40
Gambar 7.	Lumbung padi di Rawas (1879)	42
Gambar 8.	Wanita berkerudung dan berbaju kurung yang menjadi ciri khas masyarakat Muslim di Rawas (1879)	43
Gambar 9.	Remaja perempuan sedang memperagakan tari kipas di Surulangun (1879)	46
Gambar 10.	Suku Anak Dalam di Rawas (1910)	53
Gambar 11.	Para Kepala Marga (Pesirah) di Rawas (1879)	67
Gambar 12.	Sungai Rawas dan Sungai Rupit yang melintasi wilayah Rawas	68

Gambar 13.	Rumah jabatan contoleur di Rawas (1879)	69
Gambar 14.	Kartu Anggota Sarekat Islam bernama Kadir bin Jamik dari Sarolangun Jambi yang mendaftar menjadi anggota Sarekat Islam di Rawas tertanggal 2 Juli 1915	83
Gambar 15.	Staatsblad tahun 1914 no. 130 tentang Pajak umum atas usaha dan penghasilan lain untuk daerah Luar Jawa dan Madura	95
Gambar 16.	Gerbang masuk untuk sel tahanan Benteng Palembang (1916)	105

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada dekade pertama abad ke-20 ditandai dengan perkembangan sosial dan politik yang sangat pesat. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah munculnya berbagai organisasi yang dikategorikan sebagai gerakan proto-nasionalis.[1] Sekian dari banyaknya organisasi yang paling menonjol dalam fase awal nasionalisme Indonesia ini adalah Sarekat Islam (SI).[2] Pokok bahasan ini menjadi penting karena SI merupakan organisasi pergerakan

[1] Harry J. Benda dan Ruth T. McVey, *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia*, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1960), hlm. 1.

[2] SI tentu saja bukan organisasi paling awal di Hindia Belanda. Budi Utomo, organisasi berorientasi Jawa namun diklaim sejarawan Indonesia tertentu sebagai pelopor gerakan nasionalis Indonesia, didirikan tahun 1908. Lihat Azyumardi Azra, "The Indies Chinese and Sarekat Islam An Account of The Anti-Chinese Riots in Colonial Indonesia" *(Studia Islamika, Vol. 1, No. 1, 1994),* hlm. 25.

nasional yang terbesar dan salah satu yang terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia.[3]

Selain itu, kebijakan politik identitas yang diterapkan oleh kolonial Belanda menempatkan masyarakat pribumi pada posisi terendah dalam hierarki sosial, di bawah kelompok Eropa dan Timur Asing (Tionghoa). Hal ini semakin mempersempit kesempatan rakyat lokal untuk mengakses sumber daya dan mengembangkan potensi diri. Akibatnya, sistem ekonomi liberal yang dijalankan untuk menstimulasi kemajuan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda pun tidak mencapai hasil yang optimal. Hanya segelintir elit yang menikmati manfaatnya, sementara mayoritas penduduk tetap terpuruk dalam kemiskinan. Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang timpang dan kebijakan politik yang diskriminatif terhadap kesejahteraan pribumi akhirnya memperkuat dorongan gerakan nasionalisme untuk melawan ketidakadilan tersebut.

Kesadaran akan ancaman yang kian meningkat terhadap ekonomi pribumi muncul seiring dominasi pedagang Tionghoa yang diperkuat oleh kebijakan preferensial pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada kelompok Timur Asing ini secara sistematis membatasi ruang gerak pengusaha lokal untuk bersaing. Akibatnya, para pedagang Tionghoa berhasil mendominasi sektor-sektor ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah

[3] Arif Rahim, "Sarekat Islam: Gerakan Islam Modernis atau Tradisional?", *(Jurnal Ilmiah Dikdaya, Vol. 10, No. 1, 2020)*, hlm. 119.

penguasaan eksklusif terhadap distribusi bahan baku batik yang menjadi komoditas vital dalam industri tradisional Jawa. Monopoli ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan struktural, tetapi juga memperjelas bagaimana kebijakan kolonial justru mengerdilkan peran pelaku usaha pribumi dalam lanskap ekonomi mereka sendiri.[4]

Situasi tersebut membuat jiwa seorang H. Samanhudi, pedagang batik lokal berusaha memperbaiki keadaan itu dengan mendirikan sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, khususnya di Kampung Laweyan yang menjadi salah satu pusat terpenting kerajinan batik Indonesia agar dapat menggalang kerjasama sesama pedagang Islam lokal dan menyaingi pedagang Tionghoa.[5]

Sarekat Dagang Islam (SDI) selanjutnya dikembangkan di Jakarta pada tahun 1909 dan di Bogor pada tahun 1911 oleh R.M. Tirtoadisuryo. Namun, terjadi perselisihan antara R.M. Tirtoadisuryo dan H. Samanhudi yang disebabkan oleh dugaan penyalahgunaan dana serta ketidaksesuaian harga surat kabar. Konflik tersebut menyebabkan hubungan keduanya terpecah. H. Samanhudi kemudian meminta H.O.S. Tjokroaminoto untuk menyusun kembali struktur organisasi dagang tersebut. Melalui akta hukum organisasi yang baru, pada tanggal 10

---

[4] Yasmis, "Sarikat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927)" *(Jurnal Sejarah Lontar, Vol. 6, No. 1, 2009)*, hlm. 25.

[5] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, Terjemahan dari SAREKAT ISLAM 1912-1916, (Jakarta: Grafitipers, 1985), hlm. 11.

September 1912, SDI secara resmi berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI), yang tidak lagi terbatas pada kalangan pedagang, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Pulau Jawa. [6]

Setelah Sarekat Islam (SI) didirikan di Surakarta, organisasi ini mulai meluas ke berbagai daerah, termasuk Surabaya, dimana perkembangannya berlangsung dengan sukses. Selanjutnya, SI menyebar ke wilayah Jawa Timur dan Madura, serta ke sejumlah kota lain di Pulau Jawa seperti Cirebon, Jakarta, dan Kudus, yang masing-masing mendirikan cabang SI pada tahun 1913. Pada tahun berikutnya, yakni 1914, penyebaran organisasi ini meluas ke luar Pulau Jawa, mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.[7]

SI berkembang dengan sangat cepat, sebab menjadi hal yang wajib untuk menyebarluaskan pengaruhnya di seluruh penjuru Hindia Belanda. Berdasarkan pada segala aturan yang dibuat Sarekat Islam, tiap-tiap daerah yang anggotanya dianggap cukup mumpuni, diperbolehkan mendirikan cabang di daerah lain dan menyusun struktur pengurusnya masing-masing. Di setiap cabang SI dibagi menjadi beberapa ranting, lalu seterusnya dibagi lagi menjadi anak ranting. Hal demikian sejalan dengan hasil keputusan kongres pertama Sarekat Islam, bahwa

---

[6] Yasmis, "Sarikat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia..., hlm. 25.

[7] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil...*, hlm. 189.

cabang Sarekat Islam daerah Jawa Barat, pulau Sumatera dan pulau kecil disekitarnya dijadikan satu bernama Departemen Sarekat Islam Jawa Barat.[8]

Masuknya Sarekat Islam di wilayah pemerintahan *Residentie* Palembang dibawakan oleh dua tokoh, yakni R.M. Tirtohadisuryo dan Raden Gunawan di tahun 1911. Ini artinya, saat Sarekat Islam masuk ke Palembang masih bernama Sarekat Dagang Islam. Kehadiran Sarekat Islam ini mendapat tanggapan yang positif dari lapisan masyarakat. Sebagai kelanjutannya, para tokoh masyarakat tersebut diantaranya Raden Nangling beserta M. Yahya membentuk cabang Sarekat Islam lokal dengan Raden Nangling sendiri menjadi ketua cabang (Presiden Lokal) untuk daerah Palembang. Oleh karena Sarekat Islam merupakan suatu organisasi yang bersifat kerakyatan, maka azaz dan tujuannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan untuk membela rakyat. Sehingga dalam waktu yang singkat, SI menjadi sangat populer dan cepat tersebar pengaruhnya di kalangan masyarakat di kawasan Palembang.[9]

Terlepas dari daya tarik dan popularitasnya, Sarekat Islam justru menjadi sarana bagi penduduk di pedesaan untuk mengekspresikan kebencian dan keluhan terhadap kebijakan pemerintah Hindia

---

[8] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim, *Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 42.

[9] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 77.

Belanda. SI berperan dalam mengartikulasikan rasa ketidakpuasan masyarakat, sekaligus menjadi wadah aspirasi rakyat untuk memperjuangkan perbaikan kondisi materil dan emansipasi sosial dari tatanan pemerintahan kolonial.[10] Akibatnya, cabang-cabang SI di tingkat lokal kerap menyimpang dari garis kebijakan pusat dan memunculkan gerakan-gerakan kecil yang kadang menyulut pemberontakan.

Sartono Kartodirjo berpendapat, meskipun Sarekat Islam itu organisasi modernis (pembaharuan ajaran Islam)[11], yang bagi masyarakat di pedesaan menganggapnya sebagai lambang dan identitas suatu golongan. Sementara pendapat berbeda, Snouck Hurgronje menyatakan bahwa Sarekat Islam bukanlah sebuah perkumpulan keagamaan. Melainkan berfungsi sebagai alat pengikat sosial-politik yang membedakan bangsa pribumi Indonesia dari kelompok non-pribumi.[12] Dalam konteks ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan pajak tinggi dan kerja rodi yang sangat memberatkan masyarakat pedesaan. Menanggapi situasi tersebut, Sarekat Islam mengambil peran aktif dalam mengorganisasi

---

[10] Azyumardi Azra, "The Indies Chinese and Sarekat Islam An Account of..., hlm. 42.

[11] Untuk mementukan posisi SI dalam konteks arus besar umat Islam Indonesia, digunakanlah konsep *Islam Tradisional* dan *Islam Modernis* (pembaharu). Untuk golongan tradisional, lebih banyak menghiraukan soal-soal agama, *din*, atau ibadah belaka, banyak pula memberi perhatian pada *tasawuf*. Sebaliknya, golongan modernis lebih memilih perhatian pada sifat Islam pada umumnya. Lihat Arif Rahim, "Sarekat Islam: Gerakan Islam Modernis atau Tradisional?", dalam *(Jurnal Ilmiah Dikdaya, Vol. 10, No. 1, 2020)*, hlm. 120.

[12] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*..., hlm. 65.

perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang dianggap menindas itu. Aksi perlawanan tersebut dipicu oleh rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat, terutama akibat beban pajak dan kerja paksa yang terus-menerus mereka alami. Perlawanan yang muncul kemudian berkembang menjadi gerakan bercorak milenaristis dan, dalam batas tertentu, melibatkan Sarekat Islam. Hal ini menyebabkan Sarekat Islam dicap sebagai organisasi radikal dan anti-pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Orientasi Sarekat Islam (SI) yang menentang pemerintah kolonial terjadi di Rawas, wilayah paling barat dalam kekuasaan Karesidenan Palembang yang berbatasan langsung dengan Jambi.[13] Akibat pengaruh organisasi tersebut, para anggotanya mulai membentuk kekuatan bersenjata tajam untuk melawan pemerintah Kolonial Belanda. Perlawanan ini diwujudkan melalui berbagai aksi pemberontakan berskala kecil, yang kemudian berkembang menjadi aksi-aksi kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap pejabat kolonial. Puncak dari rangkaian perlawanan ini terjadi pada tahun 1916 dalam sebuah pertempuran besar yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai '**Perang *Kelambit*'.**[14]

Dikenal sebagai Perang Kelambit karena dipimpin oleh seorang tokoh bernama Muhammad

---

[13] Triana Wulandari dan Muchtaruddin, *Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang...,* hlm. 61-63.

[14] T. Ibrahim Alfian dkk, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme...,* hlm. 86.

Amin alias Kelambit, karena pemberontakan dilakukan pada malam hari. Gerakan yang dipimpinnya menunjukkan bahwa Sarekat Abang secara prinsip berbeda dengan Sarekat Islam. Jika dalam Sarekat Islam tokoh seperti H.O.S. Cokroaminoto kerap dipandang sebagai figur Ratu Adil, maka dalam Sarekat Abang muncul pemimpin yang diyakini sebagai 'Imam Mahdi'. Kelambit, pemimpin perlawanan Sarekat Abang di Rawas, mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai berorasi dan mampu membangkitkan semangat masyarakat melalui pidato-pidatonya. Dalam setiap orasinya, Kelambit menegaskan bahwa memerangi pemerintah kolonial yang dianggap kafir adalah kewajiban bagi setiap anggota Sarekat Abang.

Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah gedung pemerintah kolonial di Surulangun (ibukota *Onder Afdeeling* Rawas) dan beberapa rumah pejabat (*ambtenar*) Belanda terbakar dan jaringan telepon menjadi terputus. Bagi para *ambtenar-ambtenar,* ini sangat meninggalkan kesan yang sangat mendalam dari kalangan pemerintahan kolonial di Karesidenan Palembang.[15] Peristiwa melibatkan Sarekat Islam yang tertuduh anti pemerintah kolonial di Rawas. SI Rawas yang melakukan pemberontakan ini disebut dengan

[15] Rimbun Natamarga, *Kedudukan dan Peran Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga di Pedalaman Palembang 1825-1942*, (Banyuasin: Yayasan Institute Studi Ekonomi dan Kewirausahaan, 2021), hlm. 101-102; Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1919), hlm. 556-557.

‘**Sarekat Abang**’. Jangan bayangkan Sarekat Abang sebagai sebuah organisasi yang solid, terpusat, dan memiliki struktur cabang yang tertib. Sarekat Abang lebih tepat dipahami sebagai kumpulan subgerakan kecil yang berdiri sendiri, namun memiliki kesamaan dalam pandangan milenaristik tertentu. Sarekat Abang merupakan gerakan rakyat yang unik karena memadukan ajaran Islam, unsur klenik, dan semangat perjuangan politik dengan sikap yang tegas menolak kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Gerakan ini juga memiliki watak nativistis yang pada akhirnya meledak dalam bentuk pemberontakan, antara lain di Jambi dan Palembang.

Keberadaan Sarekat Abang ini tercatat dalam sebuah arsip koran masa Kolonial Belanda terbit tahun 1918 yaitu ***‘De Locomotief’*** menyebutkan pada laporan singkatnya mengenai sifat dan asal-usul Sarekat Abang dan perannya dalam persiapan dan pengorganisasian kerusuhannya di Jambi. Jauh sebelum ada penyebutan Sarekat Abang, di Palembang sudah ada ‘Ilmu Abang’, sebuah ilmu yang memberikan kekuatan, kelincahan, dan kekebalan bagi para pengikutnya. Agaknya ajaran ini berbeda dan bersifat mistik-magis, dimana simbol-simbol mistik dan reflektif tentang kesatuan Tuhan, manusia dan alam semesta sering digunakan sebagai jimat-jimat dan mantra. Dari ‘Ilmu Abang’ lahirlah ‘Sarekat Abang’, mengenai kapan pergantian nama itu terjadi dan apakah itu disertai dengan perubahan penting dalam organisasi, doktrin dan tujuan, tidak

dapat dikatakan dengan pasti. Istilah ini diduga sebagai akibat dari kebangkitan Sarekat Islam.[16]

Mendasari pernyataan di atas, persoalannya adalah, 'apa' keterkaitan Sarekat Abang dengan Sarekat Islam (SI) ini. Terdapat tiga alasan utama mengapa Sarekat Abang memainkan peran begitu besar. **Pertama**, apabila mengacu pada pendekatan bahasa, kata 'abang' yang sering diucapkan masyarakat lokal ialah untuk menyebutkan kata 'merah'. Mestika Zed menguraikan bahwa, orang-orang yang tergabung dalam Sarekat Abang ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan menggunakan pakaian destar berwarna merah (*abang*) dilengkapi dengan senjata tajam.[17] Kelompok ini kemudian memperoleh sebutan Sarekat Abang sebagai bentuk pengakuan terhadap peran sentral 'ilmu Abang' yang menjadi landasan pergerakan mereka. Istilah 'sarekat' sendiri tidak terlepas dari pengaruh Sarekat Islam, organisasi pionir yang menjadi inspirasi penamaan tersebut.

Kedua, Sarekat Abang pada dasarnya adalah orang-orang Sarekat Islam. Sejauh manakah SI terlibat dalam pemberontakan ini? Menurut penuturan Korver, pemimpin Sarekat Islam di Rawas sekaligus menjadi penggerak Sarekat Abang dan berperan aktif selama aksi pemberontakan. Sangatlah jelas, dengan cara ini maka gerakan Sarekat Abang menggunakan Sarekat Islam untuk mencapai tujuan mereka. Para pemimpin

---

[16] *De Locomotief* tanggal 16 Juli 1918 No. 197, hlm. 1.

[17] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm. 137.

pemberontak ini menyadari tenaga dan persatuan organisasi SI yang sangat besar, dan mereka dapat memanfaatkannya.[18] Peran Raden Gunawan membawa pengaruh Sarekat Islam hingga meresap ke dalam lingkungan elite lokal, termasuk Abdulhamid bin Setipal, seorang pasirah yang menjabat sebagai Kepala Marga Suka Pindah. Pada tahun 1914, cabang Sarekat Islam didirikan di Rawas, dengan Abdulhamid bin Setipal menjabat sebagai presiden lokal. Ia didampingi oleh Dulhaji bin Sebayan sebagai sekretaris dan Dulkasip bin Setipal (adik Abdulhamid) sebagai bendahara.[19] Dapat dikatakan bahwa Abdulhamid bin Setipal tidak hanya memimpin Sarekat Islam di Rawas, tetapi juga menjadi tokoh sentral dan motor penggerak utama dalam gerakan yang dikenal sebagai Sarekat Abang.

Ketiga, gerakan Sarekat Abang muncul sebagai hasil dari pengaruh 'ilmu abang'. Menurut Muthalib, *ilmu abang* memuat ajaran-ajaran tasawuf (sufi) dari berbagai tarekat seperti Sammaniyah, Naqsyabandiyah, serta ilmu kebal yang diajarkan kepada para anggota Sarekat Abang. Ajaran ini meyakini bahwa manusia memiliki kekuatan batin dalam dirinya sendiri, namun kekuatan tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh kekuatan dari luar dirinya.[20] Atas dasar keyakinan itu, mereka mulai

---

[18] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*..., hlm. 86.

[19] T. Ibrahim Alfian, dkk ..., hlm. 80.

[20] Jang Aisjah Muthalib, *Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke-20*, (Jakarta: Jurnal Prisma, 1980), hlm. 33.

mengorganisasi masyarakat melalui kegiatan pengajian agama dan latihan bela diri. Selain itu, mereka juga memiliki tanda pengenal rahasia, seperti destar (ikat kepala) berwarna merah, cara berjabat tangan tertentu, serta penggunaan kertas beraneka warna untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia antaranggota.

Mestika Zed berujar, Sarekat Abang merupakan pengerasan dari organisasi Sarekat Islam.[21] Mengapa dikatakan demikian? Tujuan Sarekat Islam sebenarnya cukup sederhana, sebagaimana dikutip oleh sumber Belanda di Palembang *"...het doel der vereeniging heette te wezen algehele verbroedering der z.g. koelit hitam..."* artinya untuk persaudaraan kaum kulit hitam. [22] Memang dalam arti tertentu hal tersebut bersifat eksklusif, bahkan lebih ekstrim lagi, setiap orang yang bukan anggota SI akan dicap sebagai orang lain (*vreemden*).[23]

Sarekat Abang pada hakikatnya merupakan fragmen internal Sarekat Islam yang membentuk identitas tersendiri melalui penyematan label '*abang'*. Relasi antara kedua organisasi ini tidak dapat dipahami secara dikotomis, melainkan melalui jalinan struktural yang ambigu. Salah satu manifestasi keterhubungan tersebut terlihat dari dualitas peran tokoh-tokoh kunci: sejumlah pimpinan Sarekat Islam di tingkat akar

---

[21] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*..., hlm. 139.

[22] Mestika Zed...., hlm. 129.

[23] Misalnya, bila ada anggota-anggota SI menyelenggarakan pesta kenduri atau acara keramaian, maka hanya mereka yang telah menjadi anggota SI saja yang boleh hadir. Acara-acara semacam itu tertutup bagi setiap orang yang bukan anggota SI.

rumput justru menjadi aktor penggerak Sarekat Abang, bahkan terlibat dalam strategi perlawanan bersenjata. Namun, simbiosis politis ini hanya terjadi pada jaringan Sarekat Islam di Rawas, mengindikasikan adanya varian gerakan yang berkembang sebagai respons terhadap kondisi sosio-geografis spesifik.

Kedua organisasi ini sebenarnya memiliki perbedaan prinsipil yang signifikan, baik dari segi struktur kelembagaan, orientasi ideologis, maupun strategi perjuangan yang diambil. Sarekat Islam cenderung menempuh pendekatan yang lebih moderat, legalistik, dan berusaha bekerja sama dengan pemerintah kolonial melalui jalur diplomasi dan advokasi kebijakan. Sementara itu, Sarekat Abang memilih jalur perlawanan yang lebih keras, dengan pendekatan konfrontatif dan kadang kala bersifat revolusioner, serta tidak segan memobilisasi massa untuk melakukan aksi-aksi langsung yang bernuansa kekerasan.

Pasca pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok *Sarekat Abang* di wilayah Rawas, pengurus Sarekat Islam (SI) di Palembang secara tegas membantah keterlibatan organisasi mereka dalam peristiwa tersebut. Mereka menegaskan bahwa SI tidak pernah memiliki *onderbouw* atau organisasi sayap dengan nama Sarekat Abang. Menurut pernyataan resmi pengurus SI, ajaran yang dikembangkan oleh Sarekat Abang mengandung unsur-unsur mistik, khususnya yang berkaitan dengan praktik tarekat, serta penggunaan simbol-simbol tertentu seperti pakaian

berwarna merah dan doa-doa khusus yang wajib dibaca oleh setiap anggotanya. Unsur-unsur tersebut, menurut SI, bukan merupakan bagian dari doktrin organisasi mereka.[24] Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa para pengikut Sarekat Abang bukanlah bagian dari organisasi Sarekat Islam yang menempuh jalur sosial-politik yang dinamis. Sebaliknya, Sarekat Abang cenderung bersifat radikal dan bergerak di luar kerangka perjuangan SI.

Korver menyatakan bahwa Sarekat Abang mengandung unsur tarekat, yaitu suatu lembaga mistik dalam tradisi Islam. Tarekat seperti ini kerap menjadi inti dari organisasi-organisasi gerakan milenaristis di Indonesia. Selain mengandung unsur mistik dan seni bela diri, Sarekat Abang juga mempraktikkan berbagai bentuk ritual magis untuk memperoleh kekuatan gaib dan kekebalan, yang dikembangkan melalui kegiatan pengajian.[25] Hal inilah yang membedakan Sarekat Abang dari Sarekat Islam. Jika Sarekat Islam lebih bersifat politis dan rasional, Sarekat Abang justru kuat dengan nuansa mistik, sebagaimana layaknya sebuah tarekat. Namun, berbeda dari tarekat pada umumnya yang cenderung fatalistik, 'Tarekat Sarekat Abang' memiliki karakter yang lebih progresif dan revolusioner. Perbedaan pandangan ini memunculkan kritik dari sebagian kalangan Sarekat Islam, yang

[24] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*..., hlm. 139-140.

[25] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*..., hlm. 85.

menganggap bahwa ajaran Islam dalam Sarekat Abang bukanlah Islam yang murni.

Mengingat Rawas merupakan sebuah daerah berstatus *onder afdeeling* yang menjadi pusat perlawanan Sarekat Abang, sebab lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan kolonial *Residentie* Palembang sehingga sulit diawasi pemerintah. Meski hubungan dengan pemerintahan kolonial di Jambi lebih dekat ketimbang Palembang, tetapi kontrol di Jambi sangat lemah dan ini menjadi salah satu faktor masuknya senjata-senjata gelap pendukung pemberontakan.[26] Sebuah arsip koran masa Kolonial Belanda terbit tahun 1916 yaitu ***'Het Vaderland'*** menyatakan setelah pergolakan di Surulangun (ibukota *Onder Afdeeling* Rawas), Departemen Koloni telah menerima pesan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Letnan de Quant dalam patrolinya, melaporkan disana telah aman. Patroli rutin di kawasan Palembang telah dilaksanakan, termasuk pertemuan Sarekat Abang di wilayah Ogan Ilir pada hari-hari terakhir, para pemimpin telah ditangkap.[27]

Berdasarkan kerangka definisi sebelumnya, tujuan fundamental Sarekat Abang dapat dipahami melalui interpretasi simbolis kata '*abang'* (merah) yang

---

[26] Sarekat Abang juga terdapat di Jambi, tepatnya di Muara Tembesi dan Bangko Bedanya dengan Rawas adalah anggotanya menyokong para pejabat kolonial. Oleh sebab itu, kelompok pemberontak Sarekat Abang di Jambi menamakan mereka dengan sebutan 'Sarekat Kompeni'. Lihat A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?...*, hlm. 85.

[27] *Het Vaderland* tanggal 19 Oktober 1916 No. 292, hlm. 2.

merepresentasikan orientasi politik gerakan kiri-radikal dengan komitmen perlawanan frontal terhadap rezim kolonial Belanda. Relasi antara Sarekat Abang dan Sarekat Islam pun harus dilihat sebagai bentuk simbiosis strategis, bukan sekadar afiliasi organisatoris. Seperti dikemukakan Korver dalam analisisnya, dokumen historis mengungkap kesadaran kader pemberontak akan kegagalan aksi-aksi sebelumnya yang disebabkan fragmentasi dukungan rakyat. Oleh karena itu, meski memanfaatkan basis massa Sarekat Islam di Muara Tembesi (Jambi) sebagai alat mobilisasi, Sarekat Abang tetap memposisikan diri sebagai pelopor terdepan yang bertindak lebih agresif dalam konfrontasi langsung dengan kekuasaan kolonial.[28]

Perjalanan singkat Sarekat Abang di wilayah Rawas menjadi penting untuk dibahas, karena kajian tentang gerakan sosial di kawasan ini masih tergolong jarang dilakukan. Terutama menarik untuk ditelusuri adalah bagaimana kondisi para anggota pemberontakan setelah gerakan mereka berhasil diredam oleh pemerintah kolonial. Dalam konteks ini, kehadiran Sarekat Islam patut dicatat, karena mereka merupakan aktor yang memiliki kemampuan dalam mengorganisasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali alasan kemunculan gerakan Sarekat Abang, serta mengapa tuduhan atas pemberontakan justru diarahkan kepada Sarekat Islam di Rawas.

[28] Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil...,* hlm. 87.

Apabila ditarik kebelakang, ketika Kesultanan Palembang Darussalam runtuh, wilayah uluan termasuk Rawas tidak serta-merta tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda. Pergolakan demi pergolakan masih kerap terjadi di daerah yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Sindang. Karakter masyarakat uluan yang keras dan tidak mudah ditundukkan menjadi cerminan dari semangat perlawanan yang kelak diwujudkan melalui gerakan Sarekat Abang. Apalagi wilayah Rawas dan sekitarnya merupakan bekas basis pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin II saat memimpin perlawanan terhadap Belanda dan Inggris pada abad ke-19. Sikap para pembesar pribumi lokal yang *enggan* mengakui kekuasaan *Residentie* Palembang secara sah dan formal menjadi salah satu pemicu utama munculnya berbagai bentuk penolakan. Reaksi masyarakat pedalaman atas dominasi Belanda pun mulai mengemuka dan salah satu titik awalnya terjadi di Rawas.

B. Fokus Permasalahan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa kajian yang diangkat ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan fokus pada dinamika Gerakan Sarekat Abang di wilayah Rawas (kini Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan), dengan rentang temporal 1914-1920. Tahun 1914 dipilih sebagai batas awal karena menandai kelahiran Sarekat Islam (SI) di Rawas yang menjadi cikal bakal terbentuknya Sarekat Abang; organisasi ini kemudian

dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai wadah perlawanan anti-kolonial yang memicu konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Kelambit (1916). Adapun tahun 1920 menjadi batas akhir penelitian karena pada tahun ini Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi membubarkan SI Rawas dan memberlakukan pelarangan total aktivitasnya, suatu langkah represif yang menjadi konsekuensi langsung dari eskalasi gerakan radikal Sarekat Abang. Pembatasan geografis pada wilayah Rawas dipilih untuk memastikan analisis mendalam terhadap konteks sosio-kultural yang unik, sekaligus memperjelas kronologi peristiwa dan pola interaksi antaraktor, sehingga penajaman lingkup ini memungkinkan identifikasi hubungan sebab-akibat antara kebijakan kolonial, respons masyarakat lokal, dan transformasi gerakan dari SI ke Sarekat Abang. Berdasarkan batasan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (a) bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di Rawas sebelum 1914; (b) bagaimana mobilitas organisasi Sarekat Islam di Rawas; dan (c) mengapa gerakan Sarekat Abang melibatkan Sarekat Islam di Rawas.

Menurut aspek metodologis, kajian ini dirancang untuk memenuhi dua fungsi utama dalam tradisi keilmuan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi sejarah mengenai gerakan yang dilakukan Sarekat Abang di daerah Rawas, serta dapat memberikan informasi pengetahuan bagi masyarakat lokal di

wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan sekitarnya, khususnya mengenai sejarah lokal atas konflik peperangan antara Sarekat Abang melawan pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu, penelitian ini juga akan menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah lokal bagi sejarah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di masa mendatang.

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah lokal, khususnya wilayah Rawas dan Sumatera Selatan, yang selama ini belum banyak mendapatkan perhatian dalam studi gerakan sosial-politik masa kolonial; memberikan perspektif tentang perlawanan rakyat yang sering kali tidak terekam dalam narasi sejarah arus utama, di mana Sarekat Abang menjadi contoh bagaimana gerakan berbasis lokal mampu membentuk ekspresi politik sendiri; berkontribusi dalam memperjelas posisi dan karakter Sarekat Abang yang sering kali disamakan atau diasosiasikan dengan Sarekat Islam, padahal keduanya memiliki orientasi, metode, dan basis ideologis yang berbeda; menunjukkan bagaimana unsur-unsur mistik, mesianisme, dan ajaran seperti 'ilmu kebal' menjadi bagian dari strategi simbolik dan spiritual dalam menggalang perlawanan terhadap kolonialisme; serta menjadi rujukan awal untuk penelitian lanjutan tentang gerakan rakyat lainnya di wilayah Sumatera Selatan atau Nusantara pada periode yang sama, sekaligus membuka diskusi tentang bagaimana ideologi lokal

membentuk karakter perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.

BAB 2
SELAYANG PANDANG RAWAS

A. Situasi dan Kondisi Rawas pada Masa Awal

1. Keadaan Geografis dan Demografis Rawas

Rawas merujuk pada suatu wilayah dan sungai yang terletak di wilayah barat Karesidenan Palembang pada masa kolonial Belanda, kini termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan ini, yang saat ini mencakup Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA), secara historis merupakan wilayah *hinterland* Kesultanan Palembang Darussalam yang berkembang di sepanjang aliran Sungai Rawas. Intervensi kolonial Belanda dalam aspek transportasi, ekonomi, politik, dan sosial memberikan dampak transformatif, meski perubahan yang terjadi tidak sepenuhnya bersifat unilateral. Kehadiran kolonial di Rawas menciptakan dinamika baru yang berkelindan dengan struktur lokal, dimana

topografi unik wilayah ini dengan jaringan anak sungainya yang bermuara ke sungai utama (Musi) dan terhubung ke pusat kekuasaan di Palembang menjadi faktor katalisator perubahan sosial. Keterhubungan geografis ini memfasilitasi penetrasi kebijakan kolonial sekaligus mempercepat pergeseran tatanan masyarakat, mulai dari pola perdagangan hingga relasi kuasa antara elit tradisional dan otoritas kolonial. Dengan demikian, posisi strategis Rawas sebagai *gateway* antara wilayah pedalaman dan pusat residensi turut membentuk identitas sosio-kulturalnya yang kompleks pasca-integrasi dengan sistem administrasi Hindia Belanda.

Pada masa Kolonial Belanda, Rawas menjadi wilayah administrasi terjauh dan terluar dari pemerintahan Karesidenan Palembang. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Rawas terletak paling barat dari Karesidenan Palembang yang berbatasan dengan Karesidenan Bengkulu, di bagian utara berbatasan dengan Karesidenan Jambi, pada bagian selatan berbatasan dengan wilayah *Onder Afdeeling Moesi Oeloe* (sekarang Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas), dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah *Onder Afdeeling Moesi Ilir* (sekarang Kabupaten Musi Banyuasin). Penamaan Rawas ini mengacu pada sungai yang mengalir di daerah ini ialah Sungai Rawas yang berhulu dari pegunungan Bukit Barisan, kemudian terus mengalir ke hilir yang bermuara di Sungai Musi tepatnya di dusun Muara Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin. Sungai Rawas merupakan

salah satu bagian dari sembilan anak sungai yang bermuara ke Sungai Musi yang disebut 'Batanghari Sembilan'[29], sehingga menjadi penunjang kehidupan masyarakat karena sangat mudah dilalui adanya hubungan hulu-hilir dengan sarana transportasi air, baik ketika masa Kesultanan Palembang Darussalam maupun setelah dikuasai Kolonial Belanda.[30]

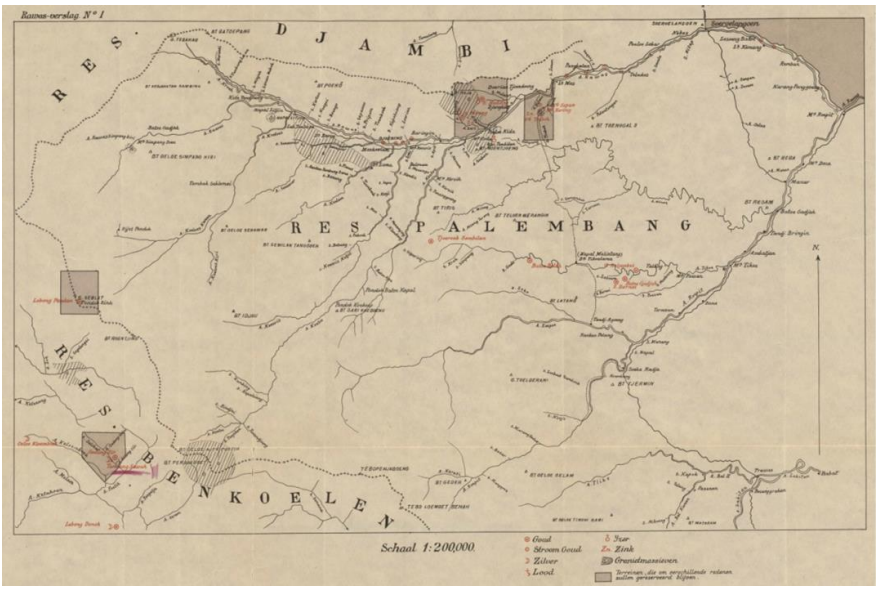

Gambar 1. Peta wilayah *Onder Afdeeling Rawas* (1920)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

[29] Anak-anak sungai Musi tersebut diantaranya: Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lematang, Sungai Ogan dan Sungai Komering.

[30] Agus Susilo dan Sarkowi, *Perkembangan Surulangun pada Masa Onder Afdeeling Rawas*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm. 61-63.

Diawal masa Kolonial Belanda, Rawas masuk ke dalam struktur pemerintahan Karesidenan Palembang yaitu *Afdeeling Rawas*, kemudian statusnya diturunkan menjadi *Onder Afdeeling Rawas*. Berlanjut masa pendudukan Jepang, terjadi penyatuan wilayah antara Rawas dan *Moesi Oeloe*[31] sehingga keduanya berstatus *Gun*[32], dan akhirnya membentuk pemerintahan baru yaitu *Bunshu Musi Kami Rawas*. Pada masa awal Indonesia merdeka, dibentuk pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas yang membawahi Kawedanaan Musi Ulu dan Kawedanaan Rawas.[33] Setelah status kewedanaan dihapuskan tahun 1963, maka Rawas berada dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas. Barulah pada tahun 2013, Rawas memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas dan membentuk daerah baru yaitu Kabupaten Musi Rawas

[31] Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, *Moesi Oeloe* berstatus *Onder Afdeeling* dipimpin oleh seorang *controleur* yang beribukota di Muara Beliti. Kemudian tahun 1934, ibukota *Onder Afdeeling Moesi Oeloe* dipindahkan ke Lubuk Linggau.

[32] Status *Gun* pada masa pendudukan Jepang, setingkat dengan *District* pada masa Kolonial Belanda dipimpin oleh seorang Demang. Status *District* ini dibawah pemerintahan *Onder Afdeeling* dipimpin oleh seorang *controleur*. Sementara status daerah *Onder Afdeeling* setingkat dengan *Fukubunshu.* Artinya, Rawas dan *Moesi Oeloe* statusnya diturunkan satu tingkat sehingga menjadi *Musi Kami Gun* dan Rawas *Gun* dibawah pemerintahan *Bunshu Musi Kami Rawas*. Sementara *Bunshu* pada masa pendudukan Jepang setingkat dengan *Afdeeling* pada masa Kolonial Belanda.

[33] Pembentukan pemerintahan ini hanya mengubah dari istilah Jepang saja, yaitu *Bunshu Musi Kami Rawas* menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas, *Musi Kami Gun* menjadi Kewedanaan Musi Ulu, dan *Rawas Gun* menjadi Kewedanaan Rawas.

Utara dengan slogan "*Beselang Serundingan*".[34] Apabila berpatokan pada peta wilayah masa kolonial, maka penamaan Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini dinilai kurang tepat. Ditinjau dari alasan historis, nama Rawas sebenarnya sudah tepat, tetapi akibat penyatuan wilayah ketika masa pendudukan Jepang sehingga menjadi satu kesatuan pada pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas (kemudian mengalami penyederhanaan menjadi Kabupaten Musi Rawas). Meskipun wacana pembentukan Kabupaten Rawas pernah muncul dan belum membuahkan hasil, namun hanya nama Kabupaten Musi Rawas Utara yang berhasil memekarkan diri dan secara resmi berpisah dari pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.

Dalam catatan buku *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, bahwa daerah Rawas ini terdapat Sungai Rawas yang merupakan anak sungai Musi. Pada bagian Barat merupakan wilayah pegunungan yang liar dan tidak berpenghuni yang dibentuk oleh pegunungan Bukit Barisan mempunyai ketinggian 1.200-1600 m. Lalu batas Utara yang dibentuk oleh DAS Rawas dengan Batang Asai hanya 450-500 m dengan pegunungan yang sangat luas. Tanah antara Rawas dan Rupit hampir datar, penduduknya hidup sangat tenang disepanjang tepi dua sungai utama, yaitu Sungai Rawas dan Sungai Rupit, dimana juga ditemukan tanah yang subur namun sering dilanda

[34] Lagut, Supian dan Sarkowi, *Perkembangan Pemerintahan Daerah Rawas dari Masa Hindia Belanda sampai Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara*, (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021), hlm. 6-13.

banjir. Padi adalah tanaman budidaya utama yang ditanam di sawah dialiri dengan kincir air, terdapat ladang kering seperti kapas, kapuk, dan gambir yang banyak ditanam. Hewan ternak pada tahun 1912 terdiri dari 4.000 kerbau, 700 sapi, 1.200 kambing dan 1.000 domba. Perusahaan Eropa belum ditemukan di daerah terpencil ini meskipun tanah yang baik tersedia. Kota utama berada di Surulangun pinggiran Sungai Rawas ditempatkan seorang *controleur*, pasar berada di tepi kiri dan dusun ditepi kanan sungai. Penduduk awalnya terdiri apa yang disebut Kubu (Suku Anak Dalam) sekitar 333 jiwa. Namun percampuran terjadi dengan pemukim Jawa dan pendatang dari Minangkabau, kemudian dari Rejang dan sebagian dari Palembang dan Jambi. Itulah sebabnya marga-marga di Rawas disebut Suka Pindah memang sejak dahulu sering berpindah. Penduduknya berbicara bahasa Melayu dengan aksen yang khas, sangat bercampur dengan bahasa Jawa, Minangkabau dan Rejang. Aksara yang umum dikenal adalah Rencong.[35]

[35] Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1919), hlm. 556-557.

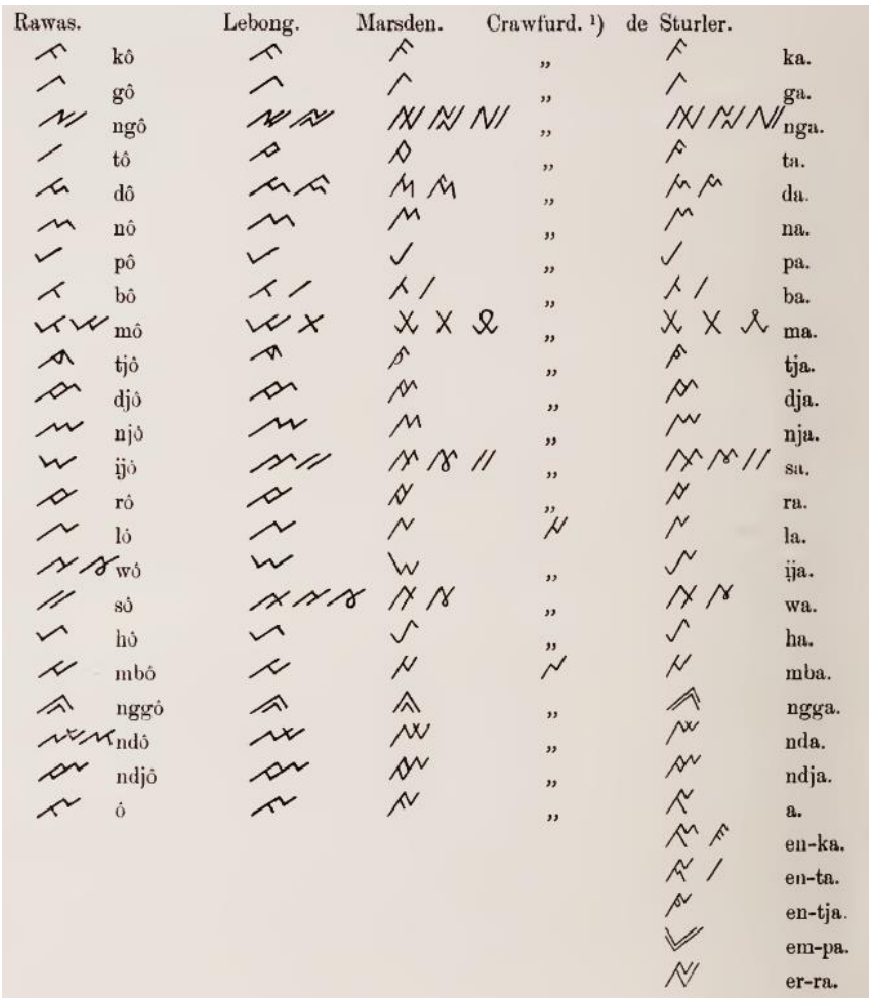

Gambar 2. Aksara Rencong (KaGaNga/Ulu) yang berkembang dan dipergunakan oleh masyarakat di Rawas, beserta perbandingan dengan daerah lain disekitarnya
Sumber: (P.J. Veth dalam *Midden Sumatera*[36])

[36] P.J. Veth, *Midden Sumatera: Reizen en Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie, Uitgerust Door Het Aardrijkskundig Genootschap 1877-1879*. (Leiden, E.J. Brill, 1881), hlm.14.

Rawas memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang bervariasi. Daerah Rawas boleh dikatakan jarang sekali terjadi musim kering, terlebih lagi terdapat dua sungai besar yaitu Sungai Rupit yang berhulu dari Pegunungan Bukit Barisan kemudian bermuara ke Sungai Rawas sehingga daerahnya dikenal dengan Muara Rupit. Rawas tidak terdapat gunung berapi, hanya terdapat dataran rendah yang sempit dan tertumpuk pada Pegunungan Bukit Barisan, dataran rendah itu makin ke timur semakin luas. Terdapat banyak rawa-rawa dari aliran sungai-sungai yang panjang dan lebar sehingga dapat dilewati oleh kapal-kapal beroda dan perahu besar di DAS sungai.[37]

[37] Lagut, Supian dan Sarkowi, *Perkembangan Pemerintahan Daerah Rawas dari Masa Hindia Belanda*..., hlm. 28-29.

Gambar 3. Keadaan Sungai Rawas sebagai sarana transportasi dan kehidupan masyarakat Rawas (1877)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Adapun jumlah penduduk ketika masih berstatus *Afdeeling* Rawas sebanyak 24.443 jiwa pada tahun 1911 dengan luas wilayah mencapai 6.663 km^2. Jumlah ini berdasarkan dari total penduduk pada masing-masing marga yang berjumlah 8 marga, dan dibawahnya terdapat 51 dusun yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Rawas Tahun 1911

No	Marga	Luas (Km^2)
1.	Ulu Rawas	2.310
2.	Suka Pindah Ulu	326
3.	Muara Rupit	335
4.	Suka Pindah Ilir	1.384
5.	Suka Pindah Tengah	662
6.	Rupit Tengah	662
7.	Rupit Ilir	180
8.	Rupit Dalam	707

Sumber: (Richter dalam *Rapport Nopens*[38])

Kemudian pada tahun 1930, total populasi penduduk *Onder Afdeeling* Rawas meningkat drastis setelah bergabung dengan *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden* sebesar 36.599 jiwa, dengan perincian Pribumi sebanyak 36.488 jiwa, Eropa sebanyak 5 jiwa, China sebanyak 85 jiwa, dan Timur Asing sebanyak 21 jiwa.[39]

Wilayah Rawas dihuni oleh berbagai kelompok etnis asli yang termasuk dalam rumpun Melayu, antara lain suku Rawas, Rupit, dan Rejang. Suku Rawas terutama bermukim di kawasan Suka Pindah Ulu, Suka Pindah Tengah, Suka Pindah Hilir, serta sebagian wilayah Ulu Rawas. Sementara itu, komunitas Rupit

[38] J.F.P. Richter, *Rapport Nopens Den Aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid Sumatra Deel II*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1911), hlm. 9

[39] Anonim, *Volkstelling Overzict voor Nederlandsch-Indie*. (Department van Economische Zaken, 1930), hlm. 12-13.

menempati daerah Muara Rupit, Rupit Hilir, Rupit Tengah, dan Rupit Dalam, sedangkan suku Rejang mendiami kawasan hulu Sungai Rawas. Selain kelompok-kelompok tersebut, terdapat pula suku Anak Dalam atau Kubu Rawas yang menjadi bagian dari keragaman etnis di wilayah ini. Awalnya, masyarakat Kubu Rawas menjalankan kepercayaan animisme dan dinamisme sebagai sistem spiritual mereka. Namun, seiring waktu, sebagian dari mereka mulai menetap secara permanen dan beralih memeluk agama Islam, menandai pergeseran budaya dan sosial dalam komunitas ini.

Masyarakat Rawas secara umum diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok etnis Melayu, dengan bahasa menjadi ciri khas utama identitas mereka. Bahasa Melayu yang digunakan di wilayah ini terbagi menjadi tiga varian dialek dominan, Rawas Ilir, Rupit, dan Rawas Ulu serta dialek Rejang Rawas yang memiliki karakteristik khusus. Masing-masing dialek menunjukkan disparitas signifikan dalam berbagai aspek kebahasaan, mencakup struktur fonetik, pola morfologis, tata kalimat, kekayaan kosakata, penamaan objek (*onomasiologis*), hingga makna semantik. Kendati terdapat perbedaan mendalam tersebut, komunikasi antarkelompok tetap terjalin karena adanya tingkat pemahaman timbal balik. Namun, dialek Rejang yang digunakan oleh komunitas Marga Ulu Rawas menjadi pengecualian, karena perbedaannya yang ekstrem membuatnya tidak dapat dipahami oleh penutur dialek Rawas lainnya.

Keunikan ini tidak menghalangi interaksi sosial, sebab masyarakat Rejang Rawas menguasai bilingualisme mereka mampu berkomunikasi lancar dalam dialek Melayu Rawas lainnya selain bahasa ibu mereka, menunjukkan adaptasi linguistik yang kompleks dalam keragaman budaya setempat.

Menurut catatan sejarah William Marsden, suku Rejang Rawas memiliki identitas etnis yang berbeda dari komunitas Melayu dan dianggap sebagai penduduk asli wilayah Bengkulu. Namun, asal-usul kelompok ini masih memicu perdebatan akademis, dengan sejumlah teori mengaitkan migrasi awal mereka dari daerah Lebong di Bengkulu. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Prof. Mc. Ginn mengemukakan bahwa permukiman Rejang Rawas kemungkinan merupakan salah satu pemukiman tertua suku Rejang di Sumatra. Hipotesisnya menyatakan bahwa leluhur suku Rejang diperkirakan melakukan perjalanan migrasi melalui Sarawak, Kalimantan, sebelum menyeberangi Selat Bangka dan tiba di wilayah aliran Sungai Musi. Dorongan untuk mencari keamanan dan perluasan teritorial mendorong komunitas ini bergerak ke hulu Sungai Musi dan Sungai Rawas, hingga akhirnya mencapai daerah Ulu Rawas. Di lokasi ini, mereka membentuk permukiman awal di Topos (Tapus), yang diyakini sebagai titik awal penyebaran budaya Rejang. Dalam perkembangan selanjutnya, suku ini membangun sejumlah desa di wilayah hulu Sungai Rawas, memperkuat keberadaan

mereka sebagai komunitas yang berpengaruh secara kultural dan geografis.[40]

Pola kehidupan komunitas dan keragaman etnis di Rawas sangat terbentuk oleh kondisi alamnya yang berpusat pada aliran Sungai Rawas beserta jaringan anak sungainya, seperti Sungai Rupit. Sebagai wilayah paling barat dalam Karesidenan Palembang, Rawas termasuk kawasan *hulu* (uluan), mirip dengan daerah-daerah lain di sepanjang aliran Sungai Musi yang jauh dari pusat administratif. Dominasi faktor geografis, terutama keberadaan sungai, tidak hanya memengaruhi tata ruang permukiman tetapi juga membentuk karakter sosial masyarakat. Sungai tidak hanya menjadi sumber kehidupan ekonomi dan transportasi, tetapi juga penanda identitas kultural yang membedakan komunitas hulu dengan pengaruh politik dan budaya dari wilayah hilir Palembang. Interaksi antara kondisi alam yang terisolasi secara geografis dan dinamika eksternal dari pusat kekuasaan menciptakan sintesis unik dalam struktur masyarakat Rawas, di mana tradisi lokal beradaptasi dengan infiltrasi nilai-nilai dari luar.

Masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik keragaman, tetapi dalam lingkup kelompok marga, identitas etnis cenderung homogen meski hidup dalam lingkungan multikultural. Homogenitas ini tercermin dari keseragaman unsur budaya, bahasa, etnis, hingga

[40] Sarkowi, Lagut dan Ira Miyarni Sustianingsih, "Dinamika Kehidupan Masyarakat di Sepanjang Sungai Rawas Masa Hindia Belanda 1864-1942", (*Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 6, No. 2), hlm. 880.

praktik keagamaan di tingkat permukiman. Namun, perbedaan antarmarga tetap muncul dalam beberapa aspek, seperti variasi linguistik, arsitektur rumah adat, dan adat istiadat pernikahan. Secara linguistik, dialek Rawas Hilir dan Rawas Ulu, misalnya, menunjukkan perbedaan logat yang jelas. Bahkan, di wilayah paling hulu Sungai Rawas, berkembang sub-bahasa yang mandiri 'Bahasa Rejang Rawas' yang tidak hanya berbeda secara fonetis tetapi juga leksikal dari dialek Melayu setempat. Fenomena ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara keseragaman internal marga dan keragaman eksternal yang dipengaruhi oleh isolasi geografis serta adaptasi budaya lokal.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Sungai Rawas memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat di wilayah ini. Sungai ini berperan sebagai tulang punggung ekonomi melalui dukungannya terhadap sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama penduduk. Meskipun aktivitas di sungai tidak dijadikan sumber utama penghasilan maupun lapangan pekerjaan, keberadaannya menjadi faktor penentu keberlanjutan sistem pertanian tradisional. Selama berabad-abad, sungai ini berfungsi sebagai jalur transportasi vital yang menghubungkan pertukaran komoditas, jasa, dan interaksi sosial antar komunitas. Hasil pertanian seperti padi, gambir, kelapa, gula aren, kopi, tebu, karet, serta produk perikanan dan hutan menjadi basis ekonomi

lokal. Di samping itu, sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada aktivitas perikanan dan perdagangan skala kecil, yang turut memperkaya keragaman mata pencaharian di wilayah ini. Dengan demikian, Sungai Rawas tidak hanya menjadi sumber kehidupan fisik, tetapi juga simpul budaya dan ekonomi yang merekatkan relasi antar kelompok dalam mosaik masyarakat Rawas.

Di masyarakat Rawas, terdapat dua pola utama dalam sistem penjualan karet: penjualan mandiri dan kerja sama dengan pemodal (*toke*). Kelompok pertama terdiri dari warga yang memiliki kebun dan modal sendiri, sehingga dapat menjual hasil karet secara independen tanpa keterikatan dengan pihak lain. Sementara itu, kelompok kedua mencakup dua kategori: (1) penyadap yang bekerja di kebun milik *toke*, dan (2) pemilik kebun yang kekurangan modal sehingga bergantung pada pinjaman *toke* untuk biaya produksi. Dalam sistem ini, *toke* bertindak sebagai kreditur yang memberikan modal dengan syarat karet hasil produksi wajib dijual kembali kepada mereka. Kondisi ini menciptakan hubungan ketergantungan ekonomi, dimana para penyadap dan pemilik kebun terikat secara finansial dengan *toke* melalui perjanjian tidak tertulis. Pola ini mencerminkan struktur ekonomi hierarkis, dimana akses terhadap modal menentukan tingkat kemandirian dan kontrol atas sumber daya produktif.

Komunitas yang bermukim disepanjang Sungai Rawas telah lama menganut pola hidup menetap

dengan mengandalkan sistem pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan hidup. Catatan historis dalam buku ekspedisi *Midden of Sumatra* (1879) mengungkapkan bahwa kekayaan alam wilayah ini menjadi tulang punggung utama keberlangsungan hidup masyarakat. Kesuburan tanah yang didukung hutan Sumatera yang lebat memungkinkan berkembangnya pertanian dan perkebunan komoditas unggulan seperti kopi, padi, tebu, aren, serta tanaman bernilai ekonomi lainnya. Potensi sumber daya alam ini tidak hanya menjadikan Rawas sebagai daerah agraris yang produktif, tetapi juga mendorong kemahiran masyarakat dalam pengelolaan hasil bumi. Pada masa Hindia Belanda, pusat administratif *Onder Afdeeling* Rawas di Surulangun bahkan menjadi lokasi industri pengolahan sumber daya alam, seperti produksi gambir, yang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap sistem ekonomi kolonial sambil mempertahankan kearifan lokal dalam pemanfaatan lingkungan.[41]

Surulangun berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus jantung perekonomian Rawas, dengan pasar lokalnya menjadi simpul distribusi barang dan jasa bagi masyarakat. Kawasan ini tidak hanya menjadi titik masuk komoditas kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sumber utama bahan baku bagi aktivitas produksi penduduk. Vitalnya peran

[41] Sarkowi, Lagut dan Ira Miyarni Sustianingsih, "Dinamika Kehidupan Masyarakat di Sepanjang Sungai Rawas Masa Hindia Belanda 1864-1942", (*Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 6, No. 2), hlm. 880.

Surulangun tercermin dari hiruk-pikuk aktivitas perdagangan pada masa itu, yang mengandalkan Sungai Rawas sebagai satu-satunya jalur transportasi. Kombinasi fungsi administratif dan ekonomi menjadikan Surulangun sebagai episentrum kemajuan di wilayah Rawas, dimana interaksi sosial, transaksi komersial, dan dinamika politik terjalin dalam satu ruang yang saling terkait. Ketergantungan pada sungai sebagai sarana transportasi mempertegas bagaimana geografi membentuk pola pertumbuhan ekonomi dan integrasi masyarakat dengan pusat kekuasaan kolonial.

Gambar 4. Pabrik Pengolahan Gambir di Surulangun (1877)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Gambar 5. Keadaan pasar Surulangun di Rawas (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Meskipun Sungai Rawas memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat, aktivitas pertanian tetap menjadi tulang punggung utama penghidupan penduduk. Sebagian besar masyarakat Rawas mengandalkan sektor agraris dengan beragam pola budidaya, seperti sistem tebang-bakar (ladang berpindah), persawahan tadah hujan atau irigasi tradisional, serta pengelolaan perkebunan komersial seperti karet, gambir, tebu, pisang, dan kopi. Sektor pertanian ini terbagi dalam dua orientasi: pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan pangan (misalnya padi dan pisang) serta pertanian komersial yang berfokus pada komoditas ekspor seperti karet dan gambir. Sungai Rawas berperan sebagai pendukung sekunder,

terutama dalam irigasi dan transportasi hasil panen, sementara praktik pertanian yang berkelanjutan mencerminkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam tanpa ketergantungan absolut pada sungai.

Sungai Rawas kerap dipadati oleh lalu lintas perahu yang menjadi sarana vital bagi aktivitas perdagangan. Masyarakat dari hulu hingga hilir sungai memanfaatkan aliran air ini untuk bertransaksi, bertemu di pusat-pusat pasar strategis. Pedagang dari wilayah urban seperti Palembang, Muara Rupit, dan Surulangun tidak hanya menjual produk perkotaan ke desa-desa tepian sungai, tetapi juga membeli hasil bumi seperti komoditas perkebunan dan hutan untuk dijual kembali di pasar kota. Di sisi lain, warga desa mengangkut panen mereka menggunakan beragam perahu tradisional seperti kajang, *jong*, biduk, dan rakit ke pasar terdekat di Surulangun, Muara Rupit, Rawas Ilir, maupun Palembang. Interaksi ini menciptakan simbiosis ekonomi antara komunitas pedesaan dan perkotaan, dengan Sungai Rawas berperan sebagai jalur penghubung yang menghidupkan sirkulasi barang dan jasa.

Masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Rawas memiliki keahlian khusus dalam memproduksi alat transportasi air tradisional, seperti rakit, biduk, dan perahu, berkat ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta kondisi lingkungan yang mendukung. Ketersediaan kayu berkualitas tinggi dari pepohonan besar dan bambu yang tumbuh subur di hutan Rawas memfasilitasi pembuatan alat transportasi ini secara

manual, tanpa bergantung pada teknologi mesin. Kemahiran ini tidak hanya mencerminkan adaptasi kultural terhadap ekosistem sungai, tetapi juga menunjukkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kombinasi antara pengetahuan turun-temurun dalam mengolah kayu dan kearifan ekologis menjadikan pembuatan perahu tradisional sebagai salah satu ciri khas masyarakat Rawas dalam merespons tantangan geografis sekaligus mempertahankan identitas budaya.

Gambar 6. Perahu kajang dipinggir sungai Rawas (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Meskipun sektor daratan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Rawas, Sungai Rawas tetap berfungsi sebagai nadi vital yang menghidupkan

aktivitas sehari-hari. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber air dan lokasi penangkapan ikan, tetapi juga jalur transportasi utama untuk mengangkut komoditas pertanian dari lahan terpencil ke pusat pemasaran. Selain itu, sungai berperan sebagai penghubung antar daerah, memfasilitasi distribusi hasil bumi ke pasar yang lebih luas. Sepanjang tepian sungai, masyarakat membangun lumbung padi tradisional dari bahan alam seperti bambu dan kayu untuk menyimpan gabah kering pasca-panen. Gabah ini disimpan sebagai cadangan pangan selama satu tahun atau lebih, mencerminkan strategi ketahanan pangan yang adaptif. Disisi lain, praktik pertanian gilir balik (*Dumo*) sistem ladang berpindah khas Rawas menunjukkan harmonisasi antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Sistem ini memungkinkan regenerasi tanah melalui rotasi lahan, sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian tanpa merusak keseimbangan alam.[42]

[42] Sarkowi, Lagut dan Ira Miyarni Sustianingsih, "Dinamika Kehidupan Masyarakat di Sepanjang Sungai Rawas Masa Hindia Belanda ..., hlm. 889-890.

Gambar 7. Lumbung padi di Rawas (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

3. Pola Budaya dan Kehidupan Masyarakat

Setiap komunitas sosial cenderung memahami bahwa sumber daya dalam lingkungan mereka baik material, kekuasaan, peluang, maupun simbol-simbol budaya bersifat terbatas. Di Rawas, simbol dan tradisi masyarakat saat ini berakar sejak era Kesultanan Palembang Darussalam, dimana pengaruh Islamisasi melalui dakwah para mubaligh telah tertanam jauh sebelum kolonialisasi Belanda. Pada masa kesultanan, perkembangan ilmu fiqh (hukum Islam) turut membentuk sistem hukum yang berlaku. Di pusat kekuasaan seperti Kota Palembang, hukum Islam bermazhab Syafi'i menjadi landasan utama, sementara di wilayah pedesaan seperti Rawas, berlaku Undang-Undang Simbur Cahaya sebuah kodifikasi hukum yang

mengadopsi prinsip hukum Islam sekaligus mengakomodasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.

Undang-Undang Simbur Cahaya, yang bertahan hingga masa kolonial Belanda dan sebagian aturannya tetap dipertahankan, mencerminkan sintesis unik antara norma agama dan adat. Misalnya, dalam hal sanksi sosial atau penyelesaian sengketa, hukum ini menggabungkan ketentuan syariat dengan mekanisme musyawarah adat. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat Rawas dalam merespons perubahan politik, sambil mempertahankan identitas kultural melalui integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Gambar 8. Wanita berkerudung dan berbaju kurung yang menjadi ciri khas masyarakat Muslim di Rawas (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Komunitas Rawas mengadopsi pola permukiman yang serupa dengan masyarakat Sumatera umumnya, yakni terkonsentrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Pola ini tidak hanya didasarkan pada akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiospiritual, seperti kedekatan dengan tempat ibadah untuk memfasilitasi ritual keagamaan sehari-hari. Keterikatan permukiman dengan aliran sungai dari hulu hingga hilir menegaskan betapa sungai bukan sekadar sumber kehidupan fisik, melainkan juga poros budaya dan keagamaan. Bagi masyarakat Muslim Rawas, sungai memainkan peran simbolis dalam praktik ibadah, seperti penyediaan air bersih untuk bersuci (*wudhu*) sebelum salat. Oleh karena itu, setiap permukiman atau dusun dibangun dengan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan sekaligus ruang sosial untuk memperkuat kohesi komunitas.

Permukiman di sepanjang Sungai Rawas tersebar di kedua tepian sungai, membentuk pola linier yang mengikuti aliran air. Setiap dusun di wilayah ini memiliki tata letak unik sebagian berada di sisi kiri, sebagian di sisi kanan namun tetap terikat oleh kesamaan morfologi berbasis sungai. Setelah mengalami proses islamisasi, pola permukiman ini berevolusi menjadi peradaban yang harmonis dengan kondisi geografis, dimana nilai-nilai keislaman terintegrasi dalam tata ruang. Hal ini tercermin dari keberadaan masjid, surau, atau langgar di pusat setiap dusun, yang sengaja dibangun menghadap sungai atau

di tepiannya. Orientasi ini tidak hanya memudahkan akses air untuk keperluan ritual (seperti wudhu), tetapi juga menegaskan simbolisme sungai sebagai poros spiritual dan sosial.

Masyarakat Rawas menjunjung tinggi nilai kesopanan dan etika religius, yang tercermin dalam tradisi sehari-hari. Salah satunya adalah pemisahan area pemandian di sungai antara laki-laki dan perempuan, dengan penggunaan *basahan* (kain penutup tubuh) yang sesuai norma kesopanan Islam. Praktik ini merupakan warisan budaya yang berakar dari ajaran Islam tentang menjaga aurat dan menghindari ikhtilat (campur baur non-mahram). Tradisi ini tidak hanya menunjukkan ketaatan pada syariat, tetapi juga adaptasi kearifan lokal dalam menerapkan prinsip keislaman di ruang publik.

Selain kental dengan nuansa Islam, kebudayaan masyarakat Rawas sebagai bagian dari budaya Melayu diantaranya tari kipas terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 9. Remaja perempuan sedang memperagakan tari kipas di Surulangun (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Pada masa kolonial Belanda, tari Kipas telah berkembang di wilayah Rawas. Tari Kipas ini merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang menggabungkan gerakan tarian dengan penggunaan kipas sebagai alat bantu yang khas. Meskipun pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda sering mengawasi dan membatasi banyak aspek budaya lokal,

seni tradisional seperti tari Kipas tetap bertahan dan berkembang di kalangan masyarakat Rawas.

Tari Kipas yang dikenal dengan keanggunan gerakannya ini, menjadi salah satu simbol ekspresi budaya masyarakat Rawas yang tetap terjaga meskipun di bawah tekanan kolonial. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara-acara adat atau perayaan, dengan penari yang menggunakan kipas sebagai media untuk memperindah gerakan tubuh. Gerakan tariannya yang lembut dan teratur mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain sebagai hiburan, tari Kipas juga memiliki makna simbolis, menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam, serta menunjukkan kemakmuran dan keberanian dalam menghadapi tantangan.

B. Keadaan Politik Pemerintahan di Rawas

1. Rawas pada Masa Kesultanan

Secara geografis, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam mencakup daerah yang dikenal dengan sebutan Batanghari Sembilan, serta wilayah tambahan yang disebut Negeri Luar, yang secara khusus merujuk pada Pulau Bangka dan Belitung. Dalam konteks administrasi pemerintahan, wilayah kesultanan terbagi menjadi empat kawasan utama. Pertama, wilayah ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat berdirinya istana atau keraton. Sementara itu, wilayah di luar ibu kota terbagi

ke dalam tiga kategori administratif, yaitu *sikap*, *kepungutan*, dan *sindang*.[43]

Penyebutan wilayah *Sindang* (secara harafiah 'daerah perbatasan) adalah daerah yang oleh masyarakat lokal setempat disebut kawasan *Uluan*. Di wilayah *sindang* ini, sultan dan para pembesar keraton tidak mempunyai otoritas dalam menerapkan kebijakan kekuasaan apalagi memaksakan 'pungutan' pajak, merekrut tenaga kerja, dan pengawasan perdagangan. Pihak kesultanan memandang bahwa orang-orang daerah *sindang* sebagai 'mitra'. Disini berlaku hubungan mirip dengan '*patron-client'*. Mereka dilindungi sultan karena sebagai penjaga perbatasan. Penduduk dataran tinggi daerah *sindang* adalah kelompok masyarakat kesukuan yang hampir sepenuhnya otonom, seperti Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, serta beberapa daerah antara Lampung dan Palembang *iliran* masuk dalam kelompok *Sindang Merdeka*, tidak pernah mengaku tunduk pada kekuasaan kesultanan tetapi diakui pihak kesultanan bertugas melindungi kekuasaan Sultan.[44]

Salah satu tinggalan sejarah di Rawas masa Kesultanan Palembang Darussalam ialah *piagem* Rupit, karena *piagem-piagem* ini merupakan dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan benang merah dari kekuasaan kesultanan. *Piagem* bertuliskan aksara Jawa

---

[43] Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam; Sejarah dan Warisan Budayanya*, (Jember: Tarutama Nusantara, 2016), hlm. 49.

[44] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 35-45.

Tengahan terdiri 11 baris, berisikan tentang peraturan utang-piutang, judi sabung ayam, larangan berdagang di luar Palembang bagi orang desa, maling (yang tertangkap), serta penemuan gading gajah, batu kemala, cula, guliga, *tanggalun* celup, *pintel*, dan candramawa. *Piagem* Rupit ini ditulis pada 1729 tahun jawa (1802 Masehi) dan diberikan kepada Adipati Rupit.[45] *Piagem-piagem* yang dikeluarkan oleh para penguasa Kesultanan Palembang Darussalam telah memperkuat legitimasi kekuasan Sultan di masyarakat Uluan Palembang, salah satu diantaranya di Rupit sebagai bagian dari wilayah Rawas. Apabila diurutkan dari Sultan Palembang yang berkuasa antara tahun 1776-1803 maka yang memimpin Kesultanan Palembang Darussalam ialah Sultan Muhammad Bahauddin (Sultan Mahmud Badaruddin I), maka *piagem* Rupit dikeluarkan masa SMB I kepada Adipati Rupit pada tahun 1802 Masehi.[46]

Dalam hal ini, daerah Rawas yang terletak sangat jauh dan diluar ibukota Kesultanan Palembang Darussalam merupakan orang-orang *Uluan* di wilayah Sindang. Menurut penuturan Irwanto, bahwa

---

[45] Samsudin, Wahyu Rizky Andhifani, Adhitya Rol Asmi, *Dokumen Tertulis Ketatanegaraan Kedatuan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam*, (Palembang: Museum Negeri Sumatera Selatan, 2021), hlm. 26.

[46] *Piagem-piagem* yang dikeluarkan Kesultanan Palembang Darussalam tidak hanya diberikan kepada pangeran yang ada di wilayah pedesaan, tetapi pula kepada *Adipati* bahkan ditujukan langsung kepada *prawatin*, lurah, dan *kria*. Menurut den Berg (1902) dan de Stuler (1855) dalam Woelders (1975), bahwa *Kria* merupakan kependekan dari ki(ai) aria atau ria; lurah. Mereka adalah penguasa lokal dan/atau orang lokal yang dianggap berpengaruh disuatu daerah.

masyarakat Palembang yaitu *wong iliran* menyebut orang *Uluan* ini juga dikenal dengan nama 'masyarakat pedalaman'. Namun dibanding istilah tersebut, istilah *uluan* lebih populer.[47] Penyebutan dan pengenalan istilah *uluan* dan *iliran* ini lebih banyak pada orientasi dualisme arah sungai, yaitu bagian hilir dan bagian hulu dari sungai-sungai 'Batanghari Sembilan.

Meskipun mereka memandang orang *iliran* di Kota Palembang sebagai orang lain, mitos tentang genealogis nenek moyang mereka sama, yaitu sama-sama sebagai keturunan Majapahit dan Minangkabau.[48] Senada dengan hal itu, J.W.J. Wellan dalam catatannya menerangkan bahwa 'penduduk utama kota Palembang dalam bahasa sehari-hari disebut orang Palembang didominasi oleh orang-orang Jawa, yang membedakannya dari penduduk lain kota Palembang ialah *Oeloeneezen* atau orang *Ulu*. Ras Kubu (Suku Anak Dalam) membentuk lapisan bawah seperti di Rawas, Lakitan dan Kelingi yang dipengaruhi oleh Rejang, juga berasal dari Minangkabau dan juga Majapahit.[49]

Legitimasi genealogis semacam itu dalam arti tertentu mencerminkan pandangan orang-orang Uluan Sindang yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok

---

[47] Dedi Irwanto M. Santun, Murni dan Supriyanto, *Iliran dan Uluan; Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2010), hlm. 75.

[48] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*..., hlm. 45.

[49] J.W.J. Wellan, *Zuid-Sumatera Economisch Overzicht van de Gewesten Djambi, Palembang, De Lampoengsche Districten en Benkoeloen*, (Wageningen Holland, 1932), hlm. 116.

sosio-kultural tersendiri saat berhadapan dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka bangga dengan ciri khas berwatak eksklusif sebagai pemberani, keras dan akrab dengan tradisi menjarah negeri-negeri terluar.[50] Watak dan prilaku semacam itu juga dimiliki orang-orang Rawas, salah satunya ialah Suku Kubu (Suku Anak Dalam) yang mendiami wilayah Rawas. Kubu asal artinya, ialah 'pertahanan'. Orang-orang Kubu ialah orang-orang pertahanan. Lebih tegas lagi, bahwa Kubu berarti benteng pertahanan diwaktu ada peperangan.[51]

Perihal suku Kubu di Rawas ini, sebuah buku berjudul 'Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan' menjelaskan secara rinci, bahwa asal orang-orang Kubu ini ialah keturunan para pahlawan Palembang. Mereka terdiri dari beberapa tingkatan. **Golongan pertama**, berasal dari keturunan prajurit dan perwira Kesultanan Palembang yang meneruskan perjuangan dalam bentuk perang gerilya di hutan melawan serdadu Belanda yang sudah berhasil menduduki kota Palembang di zaman *Susuhunan* (dalam logat Palembang, *Sunan*) Palembang. **Golongan kedua**, timbulnya dari keturunan para prajurit dan perwira tersebut yang juga meneruskan

[50] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*..., hlm. 46.

[51] Tidaklah benar pendapat orang yang mengatakan bahwa perkataan 'kubu' mengandung arti penghinaan. Ternyata dari sejarahnya, bahwa perkataan kubu mengandung arti yang luhur dan mengingatkan kita kepada patriot-patriot tanah air seperti Tuanku Imam Bondjol, Teuku Umar, Singamaradja, dan sebagainya.

perjuangan melawan serdadu Belanda bersama serdadu Ambonnya yang hendak menaklukkan daerah Rawas. Peperangan daerah Rawas ini umum disebut Perang Rawas.[52]

Dengan merujuk uraian di atas, dapat digaris bawahi bahwa bahwa orang-orang Rawas ialah orang-orang kuat dalam bertahan dari berbagai ancaman negeri-negeri luar yang mengganggu kediamannya. Perjuangannya sebagai orang-orang Kubu di Rawas bertugas menjaga kubu-kubu pertahanan, mereka memiliki senjata kujur dengan gagang panjang ditangannya, dan bersiap menghadapi segala ancaman di daerahnya.

[52] Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1954), hlm. 77.

Gambar 10. Suku Anak Dalam di Rawas (1910)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

2. Rawas pada Masa Kolonial Belanda

a) Pergolakan Masa Transisi

Sejatinya Belanda memilki kecemburuan terhadap Inggris yang bisa menguasai Pulau Bangka yang terkenal sebagai daerah penghasil timah. Salah satu penyebab inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik antara Inggris, Belanda dan Kesultanan Palembang Darussalam. Hingga terjadinya gejolak perang yang membuat konflik semakin panas tidak bisa terhindarkan, hal ini membuat Sultan Mahmud Badaruddin II harus mengungsi ke wilayah pedalaman Uluan untuk sementara waktu.

Rupanya rakyat uluan Sindang tidak membiarkan Sultan melakukan upaya perlawanan sendiri terhadap Inggris. Mahmud Badaruddin II mendapat bantuan dan pernyataan setia dari rakyat Beliti, Batu Kuning (sekarang masyarakat mendiami Lubuk Linggau dan Musi Rawas), Kikim, Rawas, Basemah, dan lain-lainnya yang ikut berperang bersama-sama di Sungai Musi, masing-masing dipimpin oleh panglima dari golongannya sendiri-sendiri.[53]

Selepas kesepakatan damai terjadi, mulai ada niatan Belanda untuk melakukan serangkaian rencana dan usaha Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Kesultanan Palembang Darussalam, menimbulkan perang antara kesultanan dan Belanda. Serangkaian perjanjian-perjanjian damai pun dibuat, akan tetapi

---

[53] R.H.M. Akib, *Sejarah dan Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badauddin II*, (Palembang: Aksara Pena, 2020), hlm.43.

dalam selalu dikhianati oleh pihak Belanda. Akibatnya dari konflik yang berkepanjangan berdampak terhadap jatuhya kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan Belanda. Semenjak kemenangan mereka atas peperangan tersebut, pada tahun 1823 pemerintah Belanda melakukan perubahan administrasi kekuasaan, dari semula berbentuk kesultanan menjadi Karesidenan.

Belanda mulai menata birokrasi dan administrasi disetiap daerah kekuasaan peninggalan wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Belanda menyerahkan kekuasaannya untuk dipegang langsung oleh petinggi militer mereka. Komandan militer ini, selain diberikan tugas pengamanan, mereka juga harus mengusahakan dengan segala macam cara agar setiap penguasa bumiputera mau diajak bekerjasama. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat J.C. Rijnst sebagai Residen Militer, didampingi seorang *rijksbestuurder* (perdana menteri) yang dipegang oleh Pangeran Kramajaya, menantu dari Sultan Mahmud Badaruddin II.[54] Hal tersebut diupayakan Belanda agar dapat memperkuat legitimasi kekuasaannya di pemerintahan Karesidenan Palembang dengan sistem *indirect bestuur* (pemerintahan tidak langsung).

Kekalahan Kesultanan Palembang Darussalam atas Belanda rupanya tidak disenangi orang-orang pedalaman *Sindang*, dengan menyerahnya bangsawan Palembang, tidak membuat mereka tunduk dan

[54] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*…., hlm. 47-48.

menyerah pula kepada Belanda. Para pembesar-pembesar pribumi lokal belum mau mengakui pemerintahan Belanda yakni *Residentie* Palembang secara sah dan formal. Alhasil menimbulkan reaksi-reaksi masyarakat di pedalaman atas berkuasanya Belanda di Palembang, terjadi mulai di Rawas pada tahun 1824. Gerakan perlawanan ini didukung oleh keluarga Sultan dan para alim ulama.[55]

Catatan di atas membuktikan bahwa pada tahun 1824, ekspansi yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda sudah mulai masuk ke wilayah Rawas. Secara tidak langsung, Belanda berusaha keras untuk melebarkan sayap kekuasaannya hingga ke pedalaman Uluan. Untuk menghadapi gejolak serta konflik dari masyarakat pribumi, strateginya yaitu dengan memanfaatkan dan mengunakan kekuatan militer mereka dalam upaya penaklukan ekspedisi ini. Dalam catatan Hoyer, terkait 'kerusuhan di dataran tinggi tahun 1838-1850' disebutkan bahwa pada tanggal 12 Mei, Mayor Swartz dan pasukannya berkekuatan 100 orang penjaga, 150 orang infanteri, 2 orang penembak jitu serta 2 orang pemortir tangan berlayar ke Sungai Musi, dan tiba di Muara Beliti pada tanggal 28 Mei 1838. Disana mereka menemukan penduduk yang memberontak, dan memutuskan untuk mengamankan

[55] Djohan Hanafiah, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*, (Palembang: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II, 1999), hlm. 89.

komunikasi dengan membangun dua benteng, yaitu di Rawas, dan yang lainnya di Muara Lakitan. [56]

Daerah Rawas dan sekitarnya yang merupakan bekas basis pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin II ketika mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan Inggris pada awal abad ke-19. Oleh karena itu, perasaan anti kafir telah tertanam dan berakar di kalangan masyarakat daerah ini. Sebagai akibat dari intensifikasi kekuasaan pemerintah kolonial ke seluruh wilayah bekas Kesultanan Palembang Darussalam dalam rangka mewujudkan *Pax Nederlandica*.[57] Lebih-lebih dengan adanya perlawanan di Jambi terhadap pemerintah Kolonial Belanda, telah meluas sampai ke daerah pedalaman di wilayah kekuasaan Karesidenan Palembang.

Uraian di atas benar adanya, dibuktikan dengan catatan Hoyer menerangkan bahwa permasalahan gerakan pemberontakan di Rawas, dimana Tuanku Panjamar bersama 1500 orang, yang dipengaruhi oleh Kepala Suku di Jambi, juga memiliki hubungan keluarga dengan Said Muhammad dari kerajaan di Jambi. Kapten Creyghton menuju pos militer Muara Rupit, sebelumnya dari Bingin Teluk yang dijaga 25 orang prajurit. Kemudian lanjut menuju Terusan, dan dari sana merebut benteng musuh di Suka Menang.

---

[56] G.B. Hoyer. *De Krigsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894; Deel II.* (Batavia: G. Kolff & Co, 1896), hlm. 198

[57] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 83-84.

Setelah itu kembali ke Terusan, mengambil alih daerah Muara Tiku. Musuh bagi Belanda yang dalam hal ini ialah rakyat daerah Rawas, meninggalkan posisi di hutan-hutan dan bukit-bukit disekitarnya. Dengan demikian, setelah lima benteng musuh di Muara Rupit dan Muara Tiku dihancurkan, musuh-musuh diusir kembali menuju Batang Asai, Jambi. Operasi-operasi perang di daerah-daerah tersebut berakhir, dimana patroli-patroli prajurit di Bingin Teluk, Terusan dan Surulangun dikerahkan, terus menjaga perdamaian sebaik mungkin. Kapten Creyghton kembali ke Tebing Tinggi, sedangkan Letnan Paehlig dengan 50 orang untuk sementara waktu tinggal di Muara Rupit. [58]

Gerakan-gerakan rakyat ini tidak cukup hanya terjadi di Rawas, serentetan pemberontakan kelompok di daerah Sindang juga terjadi, seperti serangan Pasemah ke Palembang tahun 1829, Lahat tahun 1829, Musi Ulu tahun 1837, Rejang tahun 1840, Empat Lawang tahun 1840-1850, serta beberapa pemberontakan kecil lain yang umumnya berasal dari daerah Sindang. Pemerintah kolonial Belanda langsung menuduh Pangeran Kramajaya telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Beliau dianggap telah menggerakkan pemberontakan di pedalaman. Akhirnya Pangeran Kramajaya dipecat tahun 1850 dan dibuang di Pulau Jawa.[59] Sehingga tak ada lagi orang pribumi yang menduduki jabatan

[58] G.B. Hoyer. *De Krigsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894….*, hlm. 199-201.

[59] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*…., hlm. 48.

pemerintahan Karesidenan Palembang. Meskipun awalnya Belanda menggunakan tangan-tangan kaum bangsawan Palembang dalam mengatur pemerintahan, akan tetapi ketidakpuasan di pedalaman memuncak menjadi pemberontakan.[60]

Penguasa kolonial Belanda mulai melakukan sejumlah pembenahan, dan juga mempelajari secara lebih mendalam tentang hukum adat setempat dengan mengkodifikasi *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* tahun 1852, serta mulai membagi wilayah *Residentie* Palembang menjadi daerah-daerah administratif menjadi lebih kecil, diantaranya: *Afdeeling*, *Onder Afdeeling*, *District, Onder District* dan Marga (pemerintahan lokal Pribumi). Sejak saat itu, sistem pemerintah di Karesidenan Palembang yaitu *Direct Bestuur* (pemerintahan langsung) dibawah pengawasan pejabat Belanda. Rawas di masa awal pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan daerah yang berstatus *Afdeeling* dibawah pemerintahan *Residentie* Palembang. Pemerintahan *Afdeeling* ini merupakan daerah administratif yang dikepalai seorang *Asisten Residen*, yang tugasnya bertanggungjawab kepada seorang *Residen* di pemerintahan *Residentie* Palembang.

[60] Sebelum Pangeran Kramajaya dipecat dari jabatanya tahun 1850, sebelum tahun itu juga tercatat beberapa pejabat pemimpin lokal pribumi yang memimpin Rawas diantaranya Pangeran Soeta Wiedjaijo (1833), Demang Laxana Djaija (1847), Pangeran Soeria Nandita Zen (1850). Pada masa ini, sistem pemerintahan *Residentie* menganut *Indirect Bestuur* atau pemerintahan tidak langsung, yaitu pemerintahan melalui perantaraan pejabat pribumi.

b) Kebijakan Administratif Kolonial

Setelah jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1821, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistis. Sistem ini memiliki dua sisi: sentralisasi yang berlaku pada struktur kekuasaan tingkat tinggi, seperti Gubernur Jenderal di Batavia, Residen di Karesidenan, dan kontroler di *onderafdeeling*. Namun, pada tingkat yang lebih rendah di Karesidenan Palembang, seperti di marga-marga, masih dipertahankan corak desentralistis.

Pemerintahan kolonial Belanda mulai menempatkan seorang pejabat sipil, setelah sebelumnya sejak tahun 1838 komandan militer ditempatkan di Muara Rawas, dan sejak tahun 1840 di Muara Rupit telah diberi tugas sebagai penguasa sipil. Namun, mereka pada dasarnya hanya berfungsi sebagai agen politik, karena seluruh wilayah masih berada di bawah kewenangan kepala divisi di Muara Rupit, yang bertindak sebagai pejabat pemerintah kolonial menggantikan *djenang*, yaitu perwakilan pemegang *apanage* (hak istimewa) pada masa Kesultanan.[61] Pada akhirnya nanti, jabatan kepala divisi dihapuskan tahun 1864.

Kemudian kolonial Belanda mulai menerapkan sistem administrasi pemerintahan secara langsung (*Direct Bestuur*). Untuk itu, pemerintah kolonial mengubah Kesultanan Palembang menjadi

[61] Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1919), hlm. 556-557.

Karesidenan Palembang yang langsung berada di bawah kekuasaan seorang residen yang berkedudukan di ibu kota Palembang.[62]

Berdasarkan catatan pada dari ***'Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie'***, daerah Rawas dibentuk dan menjadi bagian dari *Residentie* Palembang pada tahun 1852.[63] Wilayah *residentie* Palembang tersebut terbagi menjadi 5 *afdeeling* yaitu:

1. *Hoofdplaats* Palembang dan divisi Iliran; terdiri dari Banyuasin, Komering Ilir, Musi Ilir, dan Lematang Ilir;
2. *Afdeeling* Tebing Tinggi; terdiri dari Empat Lawang, Lematang Ulu, Musi Ulu, Kikim, Rejang, dan Pasemah;
3. *Afdeeling* Ogan Ulu; terdiri dari Komering Ulu, Enim, Semendo, Kisam, dan Makakau;
4. ***Afdeeling* Rawas**, berkedudukan di Muara Rupit.
5. *Afdeeling* Jambi.

Data di atas menunjukkan bahwa Rawas berstatus *afdeeling* dibawah pemerintahan *Residentie* Palembang, yaitu *Afdeeling Rawas* dipimpin seorang *asisten residen* bernama J.H.H. Dornseijff yang berkedudukan di Muara Rupit.

---

[62] Endang Rochmiatun, *Elite Lokal Palembang Abad XIX – Abad XX; Kajian terhadap Peran Haji Mukim dalam Mengembangkan Islam,* (Palembang: Rafah Press, 2017), hlm. 34.

[63] *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie,* (Batavia: Ter Landsdrukkerij, 1865), hlm. 242.

Pada tahun 1874, dalam catatan '*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie'*, seiring dengan bertambahnya wilayah *afdeeling* menjadi tujuh diantaranya: 1). Tebing Tinggi; 2). Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim dan Pasemah-landen; 3. Komering Ulu, Ogan Ulu, Enim dan Ranau-*distrikten*; 4). Musi Ilir; 5). Ogan Ilir dan Belida; 6). Komering Ilir; dan 7). Iliran dan Banyuasin. Oleh sebab itu, Rawas tidak lagi berstatus *afdeeling* melainkan diturunkan satu tingkat menjadi *Onder Afdeeling* seiring dengan pembentukan *afdeeling* baru. Sehingga ***Onder Afdeeling* Rawas** masuk kedalam pemerintahan *Afdeeling* Tebing Tinggi dipimpin *controleur* kelas 1 bernama C.J. Braun, dengan kedudukan tetap berada di Muara Rupit. Selain Rawas yang masuk pemerintahan *Afdeeling* Tebing Tinggi, terdapat juga *onder afdeeling* lainnya yakni: Musi Ulu, Empat Lawang, Rejang dan Lebong.[64]

Sebelum tahun 1876, Rawas terbagi menjadi lima marga utama: Ulu Rawas, Lesung Batu, Terusan, Rawas Ilir, dan Muara Rupit. Masing-masing marga dipimpin oleh seorang pasirah yang biasanya juga menyandang gelar *depati*, tetapi di Muara Rupit bergelar *pangeran*. Selain itu, terdapat dua wilayah kecil, yakni Pangkalan dan Tiku, yang dihuni oleh keturunan Minangkabau dan dipimpin oleh penghulu. Setiap marga terdiri dari dusun-dusun, yang dikepalai oleh pemimpin dengan gelar *gindo*, *depati*, *krio*, atau *rio*, di bawahnya terdapat *penggowo* atau *penggawa*, yang

[64] *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie,* (Batavia: Ter Landsdrukkerij, 1874), hlm. 191-193.

memimpin bagian-bagian dusun (kampung). Semua kepala wilayah ini turut berperan dalam peradilan. [65]

Pada tahun 1876, kecuali Ulu Rawas, sistem marga dihapus, dan dusun-dusun yang ada dijadikan *doesoen midji* (dusun mandiri), yang kepala dusunnya langsung berada di bawah kontrolir. Namun, sistem ini berdampak negatif karena hilangnya hak komunal atas lahan di luar batas desa, sehingga penduduk harus membayar hasil tanah untuk mengolah lahan atau mengumpulkan hasil hutan. Selain itu, kewajiban kerja paksa (terutama layanan angkutan air dan darat) meningkat. Akibatnya, pada tahun 1883, sistem marga dikembalikan. Lima desa tetap berstatus *midji* karena perbedaan asal-usul penduduknya, tetapi secara bertahap dusun-dusun ini bergabung kembali dengan marga yang ada atau berkembang menjadi marga sendiri. [66]

Kemudian berlanjut dalam catatan '*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie'* tahun 1881, kembali mendeskripsikan mengenai perubahan struktur *Residentie* Palembang yang didasarkan pada *Staatsblad* tahun 1878 no. 27 bahwa *Onder Afdeeling* Rawas tidak lagi berkedudukan di **Muara Rupit**, melainkan dipindahkan ke **Surulangun** yang dipimpin *controleur* kelas 2 bernama W.M.H van Schmid.[67]

---

[65] Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1919), hlm. 556-557.

[66] Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1919), hlm. 556-557.

[67] *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie,* (Batavia: Ter Landsdrukkerij, 1881), hlm. 240-242.

Setelah pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan baru mengenai pembagian wilayah baru dan reorganisasi sumber daya administrasi di daerah Palembang berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada *Staatsblad* tahun 1906 no. 466, maka *Residentie* Palembang dibagi menjadi empat wilayah *afdeeling* saja, yaitu:

1. *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden* (*hoofdplaats* Palembang);
2. *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden* (*hoofdplaats* Lahat);
3. *Afdeeling Ogan en Komering Oeloe* (*hoofdplaats* Batu Raja);
4. ***Afdeeling* Rawas** (*hoofdplaats* Surulangun).[68]

Merujuk data di atas menunjukkan bahwa Rawas kembali dinaikkan statusnya menjadi *afdeeling*, akan tetapi tidak memiliki daerah *onder afdeeling*, melainkan langsung membawahi pemerintahan lokal pribumi yaitu marga. Adapun marga dan dusun yang independen ini, yaitu:

[68] *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie,* (Batavia: Ter Landsdrukkerij, 1907), hlm. 121-123.

Tabel 2. Nama Marga dan Nama Dusun di Rawas (1911)[69]

No.	Nama Marga	Dusun Pesirah	Nama Dusun
1.	Ulu Rawas	Pulau Lebar	Kerta Dewa, Teladas, Pangkalan, Lubukmas, Jangkat, Pulau Kidak, Muarakuis, Muara Kulam, Napalicin, Kuto Tanjung
2.	Suka Pindah Ulu	Surulangun	Gebur, Sungai Baung, Lesung Batu, Lubuk Kemang, Rembang
3.	Suka Pindah Tengah	Waringin	Alai, Biaro, Karang Dapo, Rantau Kadam, Kertosari
4.	Suka Pindah Ilir	Pauh	Batu Kucing, Blani, Tanjungraja, Bingin Teluk, Mandi Angin, Tebingtinggi
5.	Muara Rupit	Muara Rupit	Karang Anyar, Karangwaru, Lubuk Rumbai, Pantai

[69] J.F.P. Richter, *Rapport Nopens Den Aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid Sumatra Deel II*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1911), hlm. 81-82;

6.	Rupit Ilir	Maur	Batu Gajah, Muaradua, Bingin Rupit
7.	Rupit Tengah	Embacang	Muara Tiku, Muarapusan, Karan
8.	Rupit Dalam	Noman	Terusan, Sukamenang, Rantau Telang, Tanjung Agung, Sungai Napal, Sukaraja, Lubuk Kumbang

Marga-marga ini dipimpin seorang kepala marga disebut *pesirah*. Sehingga tugas dan peran *pesirah* bertanggungjawab langsung kepada *asisten residen* di Surulangun.

Gambar 11. Para Kepala Marga (Pesirah) di Rawas (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Rupanya pemerintahan Karesidenan Palembang dalam perkembangan selanjutnya terus menyederhanakan dan memadatkan wilayah, baik dalam tingkat *afdeeling* maupun *onder afdeeling*. Jika sebelumnya pembagian didasarkan pada pintu gerbang dan tempat pengawasan strategis sungai, lalu kemudian pemerintah kolonial Belanda membagi Karesidenan Palembang berdasarkan geografis yang dihitung dari garis pantai, masuk ke pedalaman, dataran rendah dan dataran tinggi. Alasan utama penyederhanaan dan pemadatan ini adalah supaya pengawasan terhadap *Residentie* Palembang lebih terkontrol terutama wilayah aliran sungai. Karena

transportasi sungai pada saat itu masih memegang peranan yang strategis.[70]

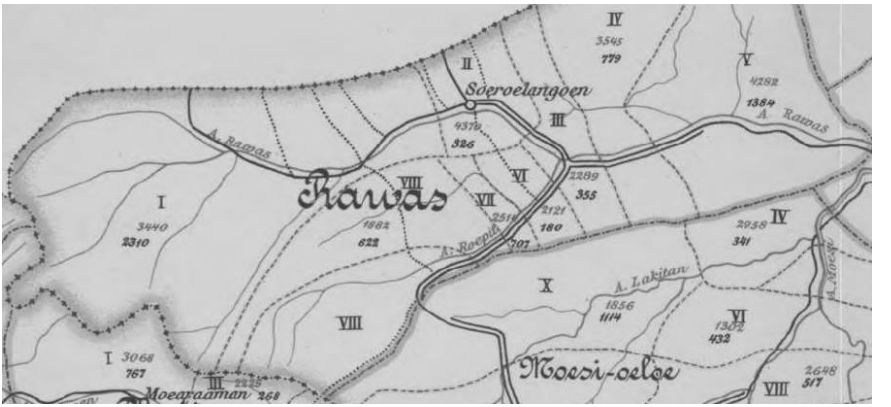

Gambar 12. Sungai Rawas dan Sungai Rupit yang melintasi wilayah Rawas[71]

Atas dasar hal tersebut, maka berdasarkan *Staatsblad* tahun 1914 no. 213, maka *Afdeeling* Rawas yang beribukota di Surulangun tidak lagi berstatus *afdeeling* melainkan dimasukkan dalam *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden* (*hoofdplaats* Palembang), sehingga Rawas berstatus ***Onder Afdeeling Rawas*** yang dipimpin seorang *controleur* bernama C.L. Dankmeyer yang tetap berkedudukan di Surulangun. Sehingga saat itu, Karesidenan Palembang dipadatkan menjadi 3 *afdeeling* saja yaitu *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden* (*hoofdplaats* Palembang), *Afdeeling*

---

[70] Lagut, Supian dan Sarkowi, *Perkembangan Pemerintahan Daerah Rawas dari Masa Hindia Belanda*..., hlm. 2.

[71] J.F.P. Richter, *Rapport Nopens Den Aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid Sumatra Deel III Kaarten*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1911), hlm. 9;

Palembangsche Bovenlanden (*hoofdplaats* Lahat) dan *Afdeeling Ogan en Komering Oeloe* (*hoofdplaats* Baturaja).[72]

Gambar 13. Rumah jabatan *contoleur* di Rawas (1879)
Sumber: *https://digitalcollections.universiteitleiden.nl*

Selanjutnya *onder afdeeling* Rawas tidak lagi di bawah pemerintahan *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden*, melainkan digabungkan ke *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden*. Pemisahan *Onder Afdeeling* Rawas dari *Afdeeling Palembangsche Benedenlanden* ini

[72] *Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 213*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1914), hlm. 5; *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie,* (Batavia: Ter Landsdrukkerij, 1914), hlm. 196; *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie,* (Batavia: Ter Landsdrukkerij, 1915), hlm. 124-126.

berdasarkan *Besluit Residen* Palembang no. 407 tanggal 5 Juli 1932, dan dipimpin seorang *controleur* bernama C.W. Oppelar terhitung 16 November 1933 masih berkedudukan di Surulangun.[73] Perubahan ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan *ambtenar-ambtenar* Belanda, karena untuk menuju daerah *Onder Afdeeling* Rawas telah dapat melalui jalan darat dari *Onder Afdeeling Moesi Oeloe* yang berkedudukan di Lubuklinggau sejak tahun 1934. Apalagi kedua *onder afdeeling* ini sama-sama masuk dalam pemerintahan *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden* beribukota Lahat. Adapun perubahan pemerintahan di Rawas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Alur Perubahan Birokrasi Pemerintahan Daerah Rawas pada Masa Kolonial Hindia Belanda

Tahun	Status Pemerintahan	Ibukota	Di bawah Pemerintahan	Sumber
1852	*Afdeeling* Rawas	Muara Rupit	*Residentie* Palembang	*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1865*
1874	*Onder Afdeeling* Rawas	Muara Rupit	*Afdeeling* Tebing Tinggi,	*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1874*

[73] Berlian Susetyo dan Ravico. "Perubahan Birokrasi Marga Wilayah Musi Ulu di Afdeeling Palembangsche Bovenlanden 1906-1942". (*Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya, Vol. 15, No. 2, 2021*). hlm. 316.

			Residentie Palembang	
1878	*Onder Afdeeling* Rawas	Surulangun	*Afdeeling* Tebing Tinggi, *Residentie* Palembang	*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1881*
1906	*Afdeeling* Rawas	Surulangun	*Residentie* Palembang	*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1907*
1914	*Onder Afdeeling* Rawas	Surulangun	*Afdeeling Palembangsche Benedenlanden, Residentie* Palembang	*Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1914, 1915*
1932	*Onder Afdeeling* Rawas	Surulangun	*Afdeeling Palembangsche Bovenlanden, Residentie* Palembang	*Besluit Residen Palembang 1932 no 407*

BAB 3
PERKEMBANGAN SAREKAT ISLAM DI RAWAS

A. Proses Masuk Sarekat Islam dan Mobilitasnya di Karesidenan Palembang

Kemunculan Sarekat Islam tidak dapat dipisahkan dari arus pembaharuan intelektual Islam yang menyebar di dunia Muslim pada abad ke-19, sebagai respons terhadap dominasi politik dan budaya Barat. Gerakan ini, yang berakar dari Timur Tengah, bertujuan mendamaikan tradisi keagamaan dengan tuntutan modernitas melalui pendekatan rasional, menolak sikap fatalistik dan asketisme yang dianggap menghambat kemajuan. Selain menekankan pentingnya etos kerja sebagai bentuk pengabdian, gerakan ini berkomitmen membersihkan praktik keagamaan dari bid'ah, inovasi yang dianggap

menyimpang dengan kembali berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Hindia Belanda, Sarekat Islam menjadi wadah perlawanan kultural dan ekonomi, dimana organisasi modern dipadukan dengan nilai-nilai Islam untuk memperjuangkan hak pribumi. Gerakan ini juga berupaya memperoleh legitimasi global dengan menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmiah, sekaligus membangun sistem pendidikan dan ekonomi mandiri yang berlandaskan prinsip keislaman. Dengan demikian, Sarekat Islam bukan hanya gerakan politik, tetapi juga upaya menegaskan martabat umat Islam di tengah hegemoni kolonial.[74]

Munculnya Sarekat Islam menjadi organisasi besar boleh dikatakan sebagai pertanda bahwa bangkitnya kesadaran masyarakat pribumi dibelenggu pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mereka ingin mendapatkan pembaharuan di semua aspek kehidupan. Sarekat Islam ini tumbuh meluas menjadi perkumpulan besar yang anggotanya sangat banyak, yaitu terdiri dari para pedagang batik seperti Sarekat Dagang Islam dahulu, situasi tersebut membuat jiwa seorang H. Samanhudi selaku pedagang batik lokal berusaha memperbaiki keadaan itu dengan mendirikan sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, khususnya di Kampung Laweyan yang menjadi salah satu pusat

[74] Endang Rochmiatun, *Gerakan Sarekat Abang di Onderafdeling Ogan Ilir Karesidenan Palembang Awal Abad XX,* (Palembang: Rafah Press, 2016), hlm. 119.

terpenting kerajinan batik Indonesia agar dapat menggalang kerjasama sesama pedagang Islam lokal dan menyaingi pedagang China.[75]

Sarekat Dagang Islam lalu dikembangkan di Jakarta tahun 1909 dan di Bogor tahun 1911 oleh R.M. Tirtoadisuryo. Namun pertikaian antara R.M. Tirtoadisuryo dengan H. Samanhudi akibat penyalahgunaan dana dan ketidaksesuaian harga surat kabar membuat hubungan keduanya terpecah, H. Samanhudi kemudian meminta H.O.S. Cokroaminoto untuk bertindak menyusun organisasi dagangnya. Dengan akta hukum organisasi yang baru, pada tanggal 10 September 1912 secara resmi SDI berubah menjadi Sarekat Islam yang tidak terbatas pada golongan pedagang saja, tetapi mencakup seluruh kegiatan masyarakat berpusat di Pulau Jawa. [76] Oleh karena Sarekat Islam telah menjadi organisasi atau perkumpulan rakyat, makanya tidak mengherankan selalu memperoleh sambutan hangat dari masyarakat terutama Islam.

Dengan ini maka 'Sarekat Islam' muncul kembali, yang berarti Perkumpulan Islam dibawah *new leader* yaitu Tjokroaminoto. Statuta baru tidak banyak berbeda dari statuta awal. Program organisasi tersebut diantaranya: a). Memajukan perdagangan dikalangan rakyat Indonesia; b). Tolong menolong antar anggota yang mengalami kesulitan ekonomi; c). Mendorong

---

[75] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, Terjemahan dari SAREKAT ISLAM 1912-1916, (Jakarta: Grafitipers, 1985), hlm. 11.

[76] Yasmis, "Sarikat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia..., hlm. 25.

kemajuan intelektual dan kepentingan material rakyat Indonesia; d). Melarang praktik beragama yang salah pada masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum dan tradisi Islam. Kesemua ini akan dilaksanakan dengan cara-cara yang diizinkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban publik dan moral yang baik.[77]

Dengan hal itu, Sarekat Islam berkembang sangat cepat dengan tokoh-tokoh yang secara wajib menyebarluaskan pengaruhnya di seluruh penjuru Hindia Belanda. Berdasarkan pada segala aturan yang dibuat Sarekat Islam, tiap-tiap daerah yang anggotanya dianggap cukup mumpuni diperbolehkan mendirikan cabang di daerah lain dan menyusun struktur pengurusnya masing-masing. Di setiap cabang SI dibagi menjadi beberapa ranting, lalu seterusnya dibagi lagi menjadi anak ranting.[78] Hal demikian sejalan dengan hasil keputusan kongres pertamanya Sarekat Islam, bahwa cabang Sarekat Islam daerah Jawa Barat dan pulau Sumatera dan pulau kecil disekitarnya dijadikan satu bernama Departemen Sarekat Islam Jawa Barat.

Masuknya Sarekat Islam pada tahun 1911 di Palembang dibawakan oleh dua tokoh, yakni R.M. Tirtohadisuryo dan Raden Gunawan. Ini artinya, Sarekat Islam yang masuk ke Palembang saat masih bernama Sarekat Dagang Islam. Kehadiran Sarekat

---

[77] Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam; Kontribusi pada Nasionalisme Indonesia,* (Jakarta: Pustaka LP3S, 2017), hlm.38.

[78] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim, *Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 42.

Islam ini ternyata mendapat tanggapan yang positif dari lapisan masyarakat. Sebagai kelanjutannya, para tokoh masyarakat tersebut diantaranya Raden Nangling beserta M. Yahya membentuk cabang Sarekat Islam dengan Raden Nangling sendiri menjadi ketua cabang (Presiden Lokal) bagi daerah Karesidenan Palembang.[79] Pembentukan Sarekat Islam di Palembang sendiri dilaksanakan di Gedung Seng (Taman Samudera Indra Bangsawan of Palembang) terletak di kampung Sungai Tawar.[80] Oleh karena Sarekat Islam merupakan suatu organisasi yang bersifat kerakyatan, maka azaz dan tujuannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan untuk membela rakyat, Sehingga pada waktu yang singkat, SI menjadi populer dan cepat tersebar pengaruhnya di kalangan masyarakat di daerah *Residentie* Palembang.

Pertumbuhan Sarekat Islam (SI) di Palembang mencerminkan kebangkitan kesadaran religius yang signifikan di wilayah tersebut. Fenomena ini mulai terlihat antara tahun 1913 hingga 1916, ketika SI yang berpusat di Palembang dengan cepat meluas ke daerah pedalaman. Dalam kurun tiga tahun, gerakan ini mencapai momentum puncaknya, di mana para pemimpinnya berhasil menggerakkan massa desa

---

[79] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 77.

[80] Gedung Seng pada saat sekarang disebut gedung bioskop REX. Lihat Ma'moen Abdullah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), hlm. 141.

untuk mengekspresikan semangat keberagamaan secara kolektif. Catatan kolonial Belanda menyebutkan bahwa pada 1915-1916 masa kejayaan SI terjadi peningkatan partisipasi jamaah di masjid-masjid Karesidenan Palembang. Bahkan di wilayah Uluan, masyarakat yang sebelumnya abai terhadap kewajiban ritual mulai menunjukkan antusiasme beribadah, khususnya pada salat Maghrib dan Isya.[81] Namun, gelombang mobilisasi ini bersifat temporer dan tidak berkelanjutan, sehingga belum cukup untuk menggeser dinamika kekuatan budaya yang telah mengakar di masyarakat.[82]

Seperti diketahui, berdirinya Sarekat Islam ini merupakan reaksi terhadap penguasaan para pedagang China dan 'krientianisasi' dari misi Zending, dan juga melawan unsur kekeliruan ajaran Islam. Sarekat Islam mempunyai massa sangat luas, dan paling banyak menderita akibat perlakuan pemerintah. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Sarekat Islam dipilih umat Islam. Oleh karena Islam pada lapisan masyarakat atas maupun bawah turut aktif menyambut kehadirannya. Keberhasilannya menaklukkan hati masyarakat Islam tidak terlepas dari konsep solidaritas, persaudaraan dan juga persatuan. Semuanya menjadi unsur pemersatu masyarakat Islam dan merujuk pada

---

[81] Endang Rochmiatun, *Gerakan Sarekat Abang di Onderafdeling Ogan Ilir Karesidenan Palembang Awal Abad XX...* , hlm. 122-123.

[82] Karena setelah agitasi politik dihentikan pada tahun 1916, minat rakyat desa terhadap pelaksanaan kewajiban religius pun memudar.

bangkitnya usaha perjuangan rakyat melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

B. Berdirinya Sarekat Islam di Rawas

Pada tahun 1914, Sarekat Islam menyebar ke daerah Uluan, seperti pada daerah *onder afdeling* dan kesatuan marganya. Seperti halnya di wilayah *Onder Afdeeling* Rawas. Penyebaran Sarekat Islam tidak lepas dari kegigihan oleh seorang Raden Gunawan.[83] Langkah yang dilakukan pertama adalah mendekati pemimpin tokoh lokal. Sebagai orang yang memahami masyarakatnya, Sarekat Islam dapat diperkenalkan dengan jelas tujuan berdirinya Sarekat Islam, sehingga berkembang pesat. Kemudian atas peran para tokoh dan elemen masyarakat, semua kegiatan Sarekat Islam berjalan lancar.[84] Hal yang tak dapat disangkal bahwa sebagian para elit lokal seperti Pasirah (Kepala Marga) menjadi simpatisan dari Sarekat Islam, bahkan diantaranya menjabat sebagai pimpinan SI di daerah marganya masing-masing, seperti di daerah Rawas.[85]

---

[83] Ia sangat dijunjung dengan penghormatan yang lebih oleh rakyat Sumatera Selatan dan pedalaman Jambi. Wanita atau pria berdesakan untuk menjamah pakaian dan kedua tangannya, meminum air yang menetes dari kedua tangannya. Raden Gunawan telah dianggap sebagai orang keramat yang dihormati sebagai wali Allah. Lihat: Korver, *Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil*..., hlm. 86.

[84] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim, *Sarekat Islam* ...., hlm. 48.

[85] Rimbun Natamarga, *Kedudukan dan Peran Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga di Pedalaman Palembang 1825-1942*, (Banyuasin: Yayasan Institute Studi Ekonomi dan Kewirausahaan, 2021), hlm. 100.

Keberhasilan Sarekat Islam yang menembus daerah Uluan di Rawas, karena dahulu daerah ini adalah basis perlawanan rakyat untuk Sultan Mahmud Badaruddin II pada abad ke-19. Kemudian untuk mewujudkan *Pax Nederlandica*, kolonial Belanda bisa menguasai kawasan ini. Abad ke-20, kebijakan kolonial Belanda sangat terasa yaitu pada pemerintahan terendah seperti marga. Kolonial Belanda mengeluarkan berbagai aturan, seperti pajak, kerja paksa untuk membuka jalan, dan lainnya. Hal tersebut menimbulkan kesengsaraan di kalangan masyarakat. Ini akan menambah rasa kegelisahan serta kebencian rakyat, maka hal itu ditampung Sarekat Islam yang muncul sangat tepat sehingga mereka merasa memperoleh perlindungan. Demikian itulah rakyat secara ramai-ramai bergabung menjadi anggota Sarekat Islam.[86]

Demikian pula halnya di daerah Bingin Teluk[87], dimana Raden Gunawan dapat mempengaruhi pesirah Abdulhamid bin Setipal, seorang kepala marga yang ketika itu masih aktif menjabat sebagai kepala marga Suka Pindah Ilir, sehingga pada tahun 1914 itu juga didirikan cabang Sarekat Islam di daerah itu dengan pasirah Abdulhamid bin Setipal sendiri menjadi presiden lokalnya, lalu Dulhaji bin Sebayan menjadi sekretarisnya, kemudian juga Dulkasip bin Setipal

[86] Berlian Susetyo, Ravico dan Muhammad Wahayuni, *Musi Ulu Rawas dalam Kajian Sejarah Lokal*, (Lubuklinggau: Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, 2022), hlm. 35-36.

[87] Sebuah dusun yang masuk kedalam wilayah marga Suka Pindah Ilir, terletak pada bagian hilir Sungai Rawas.

(adik pasirah) menjadi bendaharanya.[88] Sebagai pengurus, mereka sangat gigih dalam menyalurkan informasi penting tentang organisasi tersebut kepada masyarakatnya tersebar luas. Hal ini tidak lepas dari segala macam upaya dari pengurus SI untuk menyadarkan seperti, pamong desa, tokoh agama, dan para guru mengaji. Hal lain juga dilakukan para aktivis Sarekat Islam dengan terjun langsung melibatkan diri dalam kegiatan sosial, seperti tolong-menolong untuk warga yang kesulitan sehingga meringankan beban masyarakat, mereka juga semangat untuk bergotong-royong.

Dengan menyusupnya pengaruh Sarekat Islam di kalangan pemimpin formal tradisional, maka penyebaran ide organisasi tersebut dikalangan penduduk daerah Rawas menjadi lebih lancar dan dalam waktu yang singkat pengaruhnya telah tersebar luas sampai ke Surulangun, bahkan sampai di daerah Jambi. Banyak penduduk Muara Tembesi (Jambi) secara rahasia pergi ke daerah Rawas untuk bergabung menjadi anggota Sarekat Islam, lebih-lebih ketika *residen* Jambi pada Juli 1914 telah memberikan aturan agar penerimaan keanggotaan Sarekat Islam di Jambi dibekukan untuk sementara, namun pada Agustus 1915 diperoleh informasi bahwa hampir semua rakyat daerah Lubuk Resam serta tiga dusun di Jambi menjadi anggota Sarekat Islam di Rawas, yang dikenal sebagai

[88] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme*..., hlm. 80.

suatu organisasi yang radikal dan anti pemerintah kolonial Belanda.[89] Meskipun nantinya para anggota masyarakat yang masuk Sarekat Islam Jambi melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kejadiannya hampir bersamaan dengan pergerakan Sarekat Islam di Rawas. Secara geografis, letak *onder afdeeling* Rawas yang berkedudukan di Surulangun adalah wilayah terdekat dengan wilayah di Karesidenan Jambi, maka sangat wajar pengaruhnya sangat cepat merambah di Rawas.[90] Bahkan pada akhir tahun 1914, jumlah keanggotaan Sarekat Islam mencapai ± 10.000 orang, itu termasuk orang-orang dari seluruh wilayah dataran tinggi Palembang.[91]

Melihat perkembangan dan meluasnya pengaruh Sarekat Islam Rawas itu, pusat pemerintahan kolonial Belanda di Surulangun dibawah pimpinan Van Wijk, sebagai seorang *controleur* merasa cemas. Ia berpendapat apabila meluasnya pengaruh Sarekat Islam itu tidak dibatasi, dapat dipastikan akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam menggerakkan rakyat untuk membuat jalan yang terbentang sepanjang 5 km, yaitu dari dusun Lesung Batu (sebelum Surulangun) menjadi tidak selesai. Terlebih saat Kongres SI di Surabaya, diputuskan bahwa kerja rodi yang telah dipaksakan oleh

---

[89] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman ..., hlm. 80.

[90] Agus Susilo dan Sarkowi, *Perkembangan Surulangun*...., hlm. 100.

[91] *Algemeen Handelsblad* tanggal 14 Oktober 1916 No. 28578, hlm. 5.

pemerintah Kolonial dituntut agar dihapuskan. Sebagai ketua Sarekat Islam Rawas, Abdulhamid bin Setipal secara tegas menanamkan hal tersebut kepada masyarakatnya.[92]

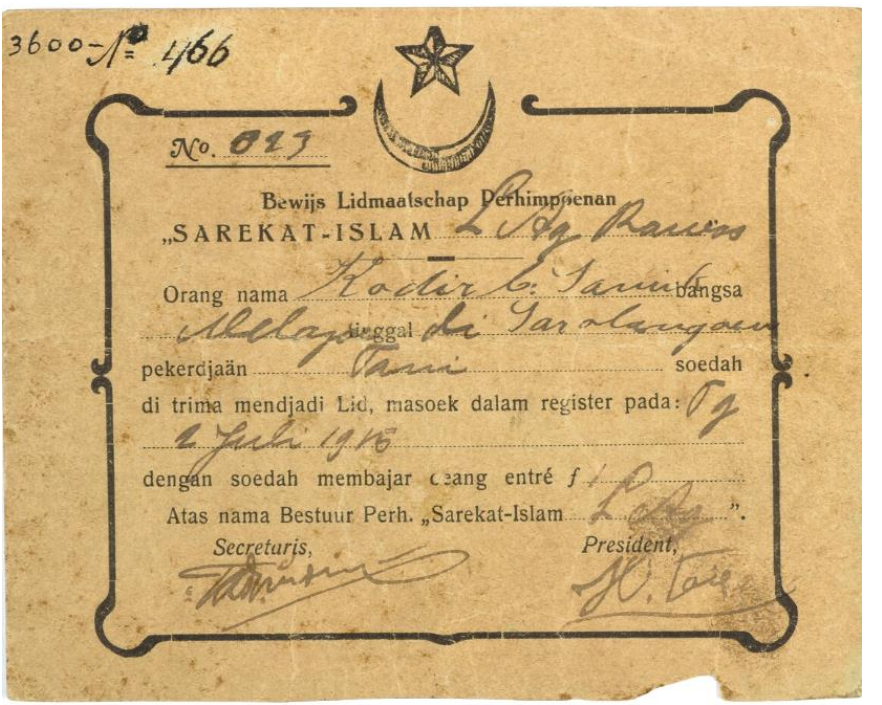
3600-1= 466

No. 017

Bewijs Lidmaatschap Perhimpoenan
„SAREKAT-ISLAM Afd. Rawas

Orang nama Kadir b. Jamik bangsa
Melayu tinggal di Sarolangun
pekerdjaän Tani soedah
di trima mendjadi Lid, masoek dalam register pada: 6 Juli
2 Juli 1915
dengan soedah membajar oeang entré f 1.—
Atas nama Bestuur Perh. „Sarekat-Islam Rawas".
Secretaris, President,

Gambar 14. Kartu Anggota Sarekat Islam bernama Kadir bin Jamik dari Sarolangun Jambi yang mendaftar menjadi anggota Sarekat Islam di Rawas tertanggal 2 Juli 1915
Sumber: *https://collectie.wereldculturen.nl/*

Terlebih lagi, dalam sebuah catatan ***Algemeen Handelsblad*** diceritakan bahwa dengan bantuan

[92] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim, *Sarekat Islam* ...., hlm. 54.

propagandis yang menjanjikan imbalas emas kepada penduduk yang bergabung dengan Sarekat Islam, seperti pembebasan atau keringanan pajak. Ditambah dengan situasi ekonomi penduduk yang kurang menguntungkan, misalnya akibat panen padi yang buruk, bertepatan juga dengan kebijakan pungutan pajak terbaru pada tahun 1914, menimbulkan bentrokan-bentrokan dengan pemerintah dan gangguan-gangguan kecil terhadap pemerintahan.[93] Kejadian-kejadian semacam itu lambat laun akan menimbulkan perlawanan masyarakat yang lebih besar terhadap pemerintah Kolonial Belanda, yaitu orang-orang yang menamakan diri mereka 'Sarekat Abang' dengan memperalat organisasi Sarekat Islam.

C. Hubungan antara Sarekat Islam dengan Gerakan Sarekat Abang

Sejatinya tujuan Sarekat Islam ialah bergerak dalam bidang sosial, yakni: 1). Memberikan pertolongan terhadap rakyat yang memperoleh kesulitan; 2). Menyusun masyarakat penganut Islam agar hidup berkumpul bersaudara; 3). Melakukan segara upaya dalam mengangkat derajat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga memang Sarekat Islam mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas, karena membela kepentingan rakyat pribumi terhadap kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang terasa membebani mereka.

[93] *Algemeen Handelsblad* tanggal 14 Oktober 1916 No. 28578, hlm. 5.

Oleh sebab itu, Sarekat Abang memanfaatkan popularitas Sarekat Islam untuk melancarkan aksi gerakannya.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa Sarekat Abang menggunakan pengaruh Sarekat Islam untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam sebuah arsip koran masa Kolonial Belanda yaitu ***De Locomotief*** menyebutkan pada laporan singkatnya mengenai sifat dan asal-usul Sarekat Abang dan perannya dalam persiapan dan pengorganisasian kerusuhannya di Jambi. Jauh sebelum ada penyebutan Sarekat Abang, di Palembang sudah ada 'Ilmu Abang', sebuah ilmu yang memberikan kekuatan, kelincahan, dan kekebalan bagi para pengikutnya. Agaknya ajaran ini berbeda dan bersifat mistik-magis, dimana simbol-simbol mistik dan reflektif tentang kesatuan Tuhan, manusia dan alam semesta sering digunakan sebagai jimat-jimat dan mantra. Dari 'Ilmu Abang' lahirlah 'Sarekat Abang', mengenai kapan pergantian nama itu terjadi dan apakah itu disertai dengan perubahan penting dalam organisasi, doktrin dan tujuan, tidak dapat dikatakan dengan pasti. Istilah ini diduga sebagai akibat dari kebangkitan Sarekat Islam.[94]

Namun, jika dilihat dari sudut pandang linguistik, kata '*abang'* sering kita dengar diucapkan oleh masyarakat di daerah mudik Jambi untuk menyebut warna 'merah'. Maka, jika makna 'abang' (merah) ini dikembangkan lebih jauh, ia dapat ditafsirkan sebagai simbol sikap politik yang kiri,

[94] *De Locomotief* tanggal 16 Juli 1918 No. 197, hlm. 1.

radikal, dan melawan pemerintahan kolonial, seperti terjadi di Rawas.

Sementara dalam catatan lain, ***Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*** mengenai "ilmu abang" ini dijelaskan bahwa:

> …seni bela diri yang sudah lama ada, yang menjamin para pengikutnya memiliki kekuatan gaib, kebal, dan bahkan tembus pandang. Lahir dari kepercayaan masyarakat kuno yang percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, ide dasar dari doktrin bela diri ini mengalami pengaruh mistik magis dari "tareqat" Muhammad, dengan otoritas tak terbatas dari sang guru terhadap murid-muridnya. Nama tersebut kemudian berubah menjadi "Sarekat Abang", yang mengindikasikan organisasi sosial-politik, kemungkinan besar disebabkan oleh penyebaran aktif dari Sarekat Islam dari Jawa ke Sumatera Selatan. Pada pertemuan-pertemuan, mereka mengambil sumpah mengenakan celana panjang merah, mereka juga mengenakan tali pengikat berwarna merah di bagian belakang sebagai tanda pengenal yang umum; sementara dalam pergaulan sehari-hari, mereka saling mengenal satu sama lain melalui mantra-mantra rahasia yang disepakati. Karena karakternya sebagai kelompok petarung rahasia, benih perlawanan mulai ada, perkumpulan mereka dengan sumpah yang dipimpin oleh kaum fanatik agama, dapat mengarah pada tindakan

> revolusioner, ketika berafiliasi pada saat yang tepat dengan slogan-slogan "djihad", dan lain-lain. Sarekat Abang mengambil keuntungan dari semangat asosiatif dan aksi massa Sarekat Islam dan pengaruh dari para pemimpin Sarekat Islam setempat.[95]

Mendasari dari dua catatan di atas bahwa Sarekat Abang pada dasarnya adalah orang-orang Sarekat Islam. Sejauh manakah SI terlibat dalam pemberontakan ini? Menurut penuturan Korver[96], pemimpin Sarekat Islam di Rawas sekaligus menjadi penggerak Sarekat Abang dan berperan aktif selama aksi pemberontakan. Sangatlah jelas, dengan cara ini maka gerakan Sarekat Abang menggunakan Sarekat Islam untuk mencapai tujuan mereka. Para pemimpin pemberontak ini menyadari tenaga dan persatuan organisasi Sarekat Islam yang sangat besar, dan mereka dapat memanfaatkannya.

Setelah apa yang telah dikemukakan di atas telah diperoleh petunjuk bahwa Sarekat Abang mengambil alih unsur-unsur organisasi Sarekat Islam. Nama *sarekat* saja dalam Sarekat Abang berasal dari Sarekat Islam. Sedangkan *abang* berasal dari 'ilmu abang' yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam organisasi Sarekat Abang ini. Maka, dapat dikatakan bahwa Sarekat Abang adalah pengerasan dari Sarekat

---

[95] Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1927), hlm. 15.

[96] A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*..., hlm. 85-86.

Islam. Suatu *militant element* dalam Sarekat Islam; mirip dengan sumber lain yang menyebutkan bahwa Sarekat Abang tak lain *soldadoe*-nya Sarekat Islam di Rawas.

Mestika Zed berujar, bahwa Sarekat Abang merupakan pengerasan dari organisasi Sarekat Islam.[97] Mengapa dikatakan demikian? Tujuan Sarekat Islam sebenarnya cukup sederhana, sebagaimana dikutip oleh sumber Belanda di Palembang *"...het doel der vereeniging heette te wezen algehele verbroedering der z.g. koelit hitam..."* artinya untuk persaudaraan kaum kulit hitam. [98] Memang dalam arti tertentu hal tersebut bersifat eksklusif, bahkan lebih ekstrim lagi, setiap orang yang bukan anggota SI akan dicap sebagai orang lain (*vreemden*).[99]

Dalam menyebarkan ideologinya kepada masyarakat, Sarekat Abang mengadopsi konsep *Ratu Adil*, yakni suatu gagasan mesianistik yang berakar dalam tradisi kepercayaan rakyat Jawa tentang kedatangan seorang tokoh penyelamat yang akan membawa keadilan dan membebaskan rakyat dari penindasan. Unsur *Messianisme* ini menjadi fondasi naratif dalam propaganda mereka, yang secara efektif membangkitkan harapan sekaligus kemarahan

---

[97] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*..., hlm. 139.

[98] Mestika Zed...., hlm. 129.

[99] Misalnya, bila ada anggota-anggota SI menyelenggarakan pesta kenduri atau acara keramaian, maka hanya mereka yang telah menjadi anggota SI saja yang boleh hadir. Acara-acara semacam itu tertutup bagi setiap orang yang bukan anggota SI.

terhadap sistem kolonial yang timpang dan menindas.[100]

Untuk meradikalisasi gerakan dan memperluas pengaruhnya, Sarekat Abang banyak meniru berbagai taktik yang sebelumnya digunakan oleh Sarekat Islam, seperti pembentukan jaringan keanggotaan berbasis komunitas lokal, penggunaan simbol-simbol religius dalam pidato politik, serta pemanfaatan forum pengajian sebagai sarana penyebaran ide perlawanan. Namun demikian, meskipun dalam beberapa aspek Sarekat Abang tampak meniru struktur dan strategi Sarekat Islam, secara ideologis dan organisatoris keduanya berbeda secara fundamental.

Sarekat Abang berusaha mengidentifikasi diri dengan Sarekat Islam guna memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat, tetapi pada saat yang sama menolak untuk dianggap sebagai bagian dari organisasi tersebut. Demikian pula, Sarekat Islam secara tegas menolak afiliasi dengan Sarekat Abang karena perbedaan orientasi perjuangan dan kekhawatiran akan terjadinya distorsi terhadap citra perjuangan Islam yang moderat. Penolakan timbal balik ini menunjukkan adanya batas identitas yang dijaga dengan ketat oleh masing-masing kelompok.

Kedua organisasi ini memiliki perbedaan prinsipil yang signifikan, baik dari segi struktur kelembagaan, orientasi ideologis, maupun strategi perjuangan yang diambil. Sarekat Islam cenderung

---

[100] Fridiyanto, *Kaum Intelektual dalam Catatan Kaki Kekuasaan*, (Lampung: CV. Gre Publishing, 2017), hlm.112

menempuh pendekatan yang lebih moderat, legalistik, dan berusaha bekerja sama dengan pemerintah kolonial melalui jalur diplomasi dan advokasi kebijakan. Sementara itu, Sarekat Abang memilih jalur perlawanan yang lebih keras, dengan pendekatan konfrontatif dan kadang kala bersifat revolusioner, serta tidak segan memobilisasi massa untuk melakukan aksi-aksi langsung yang bernuansa kekerasan.

Radikalisasi Sarekat Abang didorong oleh kekecewaan mendalam terhadap lambannya perubahan sosial yang diharapkan, serta kian menajamnya kesenjangan antara elite kolonial dengan masyarakat pribumi. Dalam konteks ini, konsep *Ratu Adil* tidak hanya menjadi simbol harapan akan perubahan, tetapi juga menjadi justifikasi spiritual atas tindakan perlawanan terhadap otoritas yang dianggap zalim. Sarekat Abang, dalam hal ini, tidak hanya tampil sebagai gerakan sosial-politik, tetapi juga sebagai ekspresi dari krisis identitas kolektif dan trauma kolonial yang belum terselesaikan.

Dengan demikian, hubungan antara Sarekat Abang dan Sarekat Islam bersifat ambivalen mengandung unsur kedekatan historis dan taktis, tetapi sekaligus dibatasi oleh garis pemisah ideologis dan strategis yang tegas. Perbandingan ini memperlihatkan bagaimana dinamika gerakan sosial pada masa kolonial tidak bersifat homogen, melainkan kompleks, saling berinteraksi, dan kadang saling bertentangan dalam merebut ruang representasi rakyat tertindas.

BAB 4
PERGERAKAN SAREKAT ABANG DI RAWAS

A. Faktor Penyebab Terjadinya Gerakan

Sebenarnya, bibit-bibit perlawanan masyarakat Rawas terhadap kekuasaan kolonial Belanda telah tumbuh sejak jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1823. Keruntuhan kesultanan tidak serta-merta membuat masyarakat Uluan, khususnya di wilayah Sindang salah satunya Rawas, tunduk pada kekuasaan baru yang diwakili oleh pemerintah kolonial, dalam hal ini *Residentie* Palembang. Sebagai wilayah yang sebelumnya menjadi basis pertahanan Kesultanan Palembang khususnya di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II, daerah Rawas memiliki jejak historis perlawanan yang kuat. Masyarakatnya mewarisi semangat anti-kolonial dan kemandirian

yang tinggi, yang kemudian memunculkan berbagai bentuk resistensi lokal. Penolakan terhadap kekuasaan kolonial tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi kerusuhan dan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan Belanda.

Gerakan-gerakan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan kolonial dan berupaya mempertahankan tatanan sosial-politik lokal yang telah lama mereka anut. Situasi inilah yang menjadi latar penting bagi kemunculan gerakan Sarekat Abang di Rawas pada awal abad ke-20, sebagai kelanjutan dari tradisi perlawanan yang telah berakar kuat di wilayah pedalaman Sumatera Selatan.

Selain faktor historis, munculnya perlawanan di Rawas juga diperkuat oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menambah beban penderitaan rakyat. Penerapan sistem pajak yang memberatkan, disertai kewajiban kerja paksa untuk membuka jalan, membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan kesengsaraan, tetapi juga memicu kegelisahan dan kebencian yang meluas di kalangan rakyat. Dalam situasi krisis tersebut, Sarekat Abang muncul sebagai wadah yang mampu menyalurkan aspirasi dan kemarahan masyarakat. Mereka memanfaatkan ketegangan sosial yang ada, bahkan memperalat nama besar Sarekat Islam untuk memperluas pengaruh dan legitimasi gerakan mereka. Hal ini menimbulkan kebingungan di tengah

masyarakat dan sering kali menyebabkan Sarekat Abang disalahartikan sebagai bagian dari Sarekat Islam, padahal secara ideologis dan strategis keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.

Bahkan selama tahun 1915, Residen Palembang sering mendapat laporan tentang aksi pemogokan dan agitasi yang dilakukan oleh penduduk di setiap distrik. Umumnya berkisar di seputar pengelakan membayar pajak dan kerja rodi yang dalam laporan-laporan disebut 'didalangi' oleh orang-orang Sarekat Islam. Pemerintah kolonial di daerah Palembang pun mulai menerapkan langkah yang lebih tegas dengan melarang pendaftaran anggota-anggota baru Sarekat Islam di setiap lingkungan marga pada bulan Juli 1916. Pelarangan tersebut dilatarbelakangi mengingat sering terjadi ancaman pembunuhan terhadap pejabat-pejabat Belanda di Rawas.[101]

Bahkan pembunuhan *controleur* di Rawas tersebut benar adanya, dalam sebuah catatan masa Kolonial Belanda yaitu ***'De Sarikat Islam'*** membenarkan bahwa:

> Pada awal tahun 1915, *controleur* Walter yang masih muda ditempatkan di Surulangun, ibukota *onder afdeeling* Rawas yang berbatasan dengan Sarolangun (Djambi), tempat dimana bertugas baru-baru ini dibunuh. Sarekat Islam telah masuk ke Palembang dan menimbulkan keresahan disana. Suasana hati yang terangsang

[101] Mestika Zed. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang ….,* hlm. 135-136.

diungkapkan di Rawas oleh penentangan pasif terhadap pemerintah administratif Hindia Belanda, dimana penduduk asli adalah tuan yang sebenarnya. Para pemimpin mereka menyatakan bahwa tidak memahami peraturan pajak yang baru dalam *Staatsblad* tahun 1914 no. 130, yang untuk wilayah Palembang, yakni pengurangan persentase pungutan dari 6% menjadi 4%. Karena sebelumnya, kontrolir mengadakan pertemuan dengan para pemimpin di Rawas, mengetahui dari sikap tenang dan percaya diri kontrolir, tentang apa yang bisa mereka dapatkan, segera menyatakan bahwa peraturan baru itu sudah sangat jelas bagi mereka, dan bahwa mereka akan melakukan apa yang diperlukan untuk menerapkannya. Akan tetapi bagi mereka, tidak mengerti apa-apa dari penjelasan kontrolir itu, dan terlebih lagi tidak mau terima dengan skema baru tersebut.[102]

[102] W.K.S. van Haastert. *DE SARIKAT ISLAM*. (Weltevreden: Albrecht & Co, 1916), hlm. 45-46

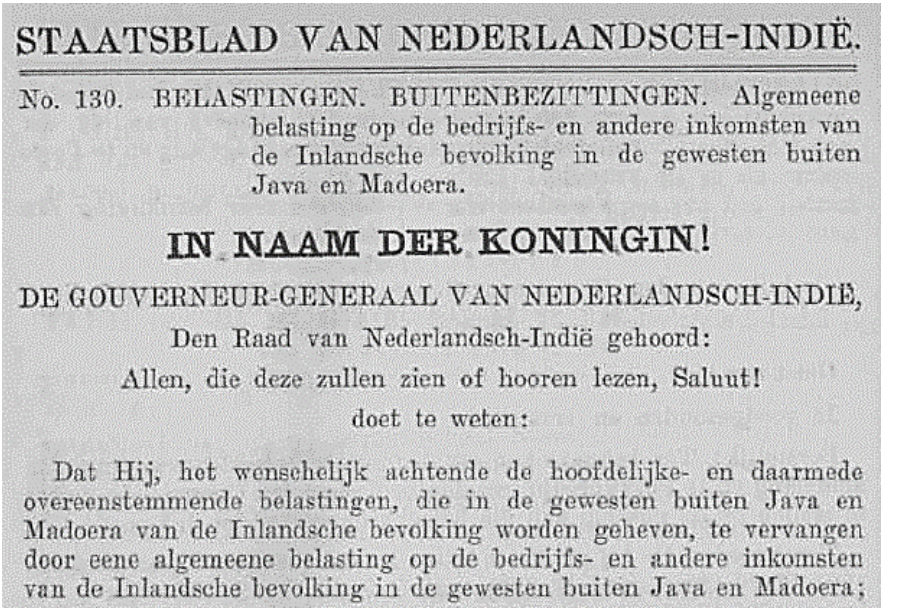

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

No. 130. BELASTINGEN. BUITENBEZITTINGEN. Algemeene belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten van de Inlandsche bevolking in de gewesten buiten Java en Madoera.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË,

Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord:

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut!

doet te weten:

Dat Hij, het wenschelijk achtende de hoofdelijke- en daarmede overeenstemmende belastingen, die in de gewesten buiten Java en Madoera van de Inlandsche bevolking worden geheven, te vervangen door eene algemeene belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten van de Inlandsche bevolking in de gewesten buiten Java en Madoera;

Gambar 15. *Staatsblad* tahun 1914 no. 130 tentang Pajak umum atas usaha dan penghasilan lain untuk daerah Luar Jawa dan Madura

Scholten dalam tulisannya, ***'Sumatran Sultanate and Colonial State'*** menyampaikan bahwa dalam kondisi ini, pajak dan kerja paksa menjadi beban yang semakin berat, memicu kebencian masyarakat yang berfokus pada keluhan-keluhan ini. Keluhan tentang pemungutan pajak yang terus-menerus dan penghitungan yang sembarangan jarang mendapat perhatian. Di Rawas pada tahun 1915, menjadi kebiasaan bagi mereka yang mangkir untuk duduk bertelanjang dada di bawah terik matahari selama berjam-jam, bahkan terkadang berhari-hari. Seorang juru bicara Indonesia mengecam praktik ini dan menyebut metode pemungutan pajak tersebut sebagai

'cara yang kadang-kadang sangat menyinggung perasaan'.[103] Dengan dilatarbelakangi beban pajak dan kerja rodi yang membuat masyarakat Rawas tidak ingin mematuhinya. Ditambah pemerintah Hindia Belanda melarang pendaftaran anggota Sarekat Islam, aksi propaganda dan anti pemerintah semakin membesar dan mencapai klimaks sehingga membuat masyarakat Rawas mulai merencanakan aksi penyerangan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Surulangun.

Orang-orang yang tergabung Sarekat Abang ini mulai melengkapi dirinya dengan senjata tajam dengan mengadakan pertemuan dengan menggunakan pakaian destar berwarna '*abang'* (merah). Mereka juga acapkali menyelenggarakan pengajian agama dan berlatih ilmu bela diri. Menurut penuturan Zed, mereka biasanya berjalan bergerombol dari satu dusun ke dusun lain dan setiap kali beraksi (berbicara atau melakukan sesuatu) selalu mengucapkan *"kam, kim, koem, kapiroen."* Bila berjumpa dengan penduduk, mereka akan meneriakkan "kini kita tidak perlu lagi bayar pajak dan kerja rodi." Mereka mengancam, menyerang, dan melukai siapapun yang tidak menyambut seruan itu. Alhasil, aksi-aksi semacam itu semakin membesar dan mencapai klimaks sehingga

[103] Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate and Colonial State; Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907*, (New York: Southeast Asia Program Cornell University Ithaca, 2003), hlm. 269-270.

menimbulkan pemberontakan massa berlangsung di Rawas. [104]

B. Perang Kelambit 1916

Akibat dari intentifikasi kekuasaan kolonial Belanda di daerah pedalamam Karesidenan Palembang dalam rangka perwujudan *Pax Nederlandica*, maka dari itu ketika abad ke-20 pihak pemerintah kolonial Belanda selalu ikut campur dalam pemerintahan marga.[105] Karena memang pemerintahan marga ialah pemerintahan terendah yang dikelola pribumi. Maka seorang *controleur* pun tidak turut campur dalam institusi marga, namun wewenang marga bertanggungjawab kepada *controleur*.[106] Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan bermacam-macam peraturan pajak dan sangat berat bagi rakyat pribumi. Contoh saja seperti kerja rodi pembuatan jalan, jembatan dan lain sebagainya telah memunculkan keresahan pada masyarakat. Hal tersebut kemudian dicekoki oleh kaum Ulama dengan ajaran-ajaran anti kafir itu ditampung Sarekat Islam Rawas sehingga akan menjadi juru selamat mereka.

---

[104] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*...., hlm. 137.

[105] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme*..., hlm. 85.

[106] Berlian Susetyo & Ravico. (2021). "Perekonomian Masyarakat Onder Afdeeling Moesi Oeloe Tahun 1900-1942". *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, *9*(2), 13–35, hlm.18.

Pada anggaran dasar Sarekat Islam, bahwa tujuannya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, lalu menjalin rasa persaudaraan, mengikat tolong-menolong, serta melindungi rakyat atas penindasan yang sewenang-wenang. Maka dari itu, mereka para tokoh Sarekat Islam di Rawas beranggapan bahwa perlakuan kolonial Belanda tidak sesuai atas aspirasi masyarakat sehingga telah menaikan amarah anggota Sarekat Islam Rawas kepada pemerintah kolonial Belanda. Maka tahun 1915, Abdulhamid bin Setipal memerintahkan Muhammad Amin untuk memobilisasi massa melakukan perlawanan fisik sebagai reaksi atas kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian Muhammad Amin sebagai seorang yang dianggap sakti (ilmu hitam) membuat kelompok berjumlah 40 orang yang masing-masing kelompok dipimpin seorang *Hulubalang*. Kelompok-kelompok itu dilatih taktik untuk berperang, dan juga ilmu kebatinan. Para anggota kelompok ini direkrut dari Sarekat Islam dan juga simpatisannya. Pasukan dari kelompok ini disiapkan untuk berperang melawan kolonial Belanda. Mereka ini disebut pasukan *kelambit* dalam melakukan pemberontakan rakyat di *onder afdeeling* Rawas, Karesidenan Palembang.[107]

Ketua Sarekat Abang	:	Depati Abdulhamid bin Setipal
Panglima Perang	:	Abdullah bin Setipal
Kepala *Hulubalang* (Pemimpin Perang)	:	Muhammad Amin (Kelambit)

[107] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim ...., hlm. 54.

Ilmu 'Kelambit' berarti 'ilmu kelelawar' yang diambil dari binatang kelelawar yang terbang pada malam hari. Sehingga Muhammad Amin beserta kelompoknya atas perintah Abdulhamid bin Setipal melakukan pergerakan pada malam hari saja. Timbulnya pasukan-pasukan Kelambit dari Bingin Teluk ini hampir bersamaan dengan pemberontakan dalam melawan pemerintah kolonial Belanda di daerah Jambi dipimpin oleh bangsawan keturunan dari sultan Jambi, dua orang itu adalah Raden Toha serta Raden Mongong. Hal ini kemudian membuat Abdulhamid bin Setipal mengirimkan kurirnya ke Jambi, yaitu H. Lasyim serta H. Zakaria untuk meminta bantuan supaya bisa bersama-sama menyerang benteng pertahanan Belanda yang terletak di Surulangun Rawas.[108]

Namun rencana penyerbuan yang telah dipersiapkan sebelumnya diketahui oleh mata-mata Belanda. Oleh karena itu, guna menghadapi perlawanan tersebut maka kolonial Belanda dengan tergesa-gesa mengerahkan serdadu Marsose yang didatangkan dari Jawa dan terdiri dari orang-orang Jawa dan Ambon. Demi mematahkan perlawanan tersebut, salah seorang kurir tadi yang bernama H. Lasyim, sekembalinya dari Jambi menuju ke Bingin Teluk, ia dicegat dan ditangkap serta dipenjarakan

[108] T. Ibrahim Alfian, M. Alimansyur, Makmoem Abdullah, Wenny Makmoem, F.S. Budiman, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme*..., hlm. 86; Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia* ..., hlm. 180.

dalam benteng Surulangun dengan penjagaan yang sangat ketat, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat meloloskan diri. Oleh karena berhasil atau tidaknya perlawanan tersebut berada ditangannya, sehingga ia nekat untuk meloloskan diri dari benteng Belanda untuk menyampaikan berita kepada Abdulhamid bin Setipal dengan segera. Namun usahanya gagal, karena ketika ia mengadakan perlawanan terhadap penjaga benteng tersebut ia ditembak mati oleh serdadu Marsose dan gugurlah pada saat itu juga sebagai seorang pejuang.

Pasukan kelambit mulai digerakkan dari Bingin Teluk menuju Surulangun, hampir seluruh rakyat bergabung dalam pasukan itu. Namun terlebih dahulu seluruh pasukan dari berbagai penjuru berkumpul di Muara Rupit. Selama 7 hari di Muara Rupit, seorang kurir lain yakni H. Zakaria datang memberitahukan bahwa Raden Toha serta Raden Mongong dari Jambi juga akan datang memberi bantuan pasukan. Akhirnya telah diputuskan akan menyerbu benteng Belanda di Surulangun pada tanggal 31 Oktober 1916 pada jam 6 pagi. Sehingga sehari sebelumnya pasukan mulai maju bergerak dari Muara Rupit dan langsung menyerbu benteng Belanda di Surulangun tersebut.[109]

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa rencana penyerangan terhadap benteng Belanda telah diketahui sebelumnya, oleh karena itu Belanda telah mempersiapkan pasukannya dengan baik. Sebagian

[109] Berlian Susetyo, Ravico dan Muhammad Wahayuni, *Musi Ulu Rawas …*, hlm. 40.

pasukan Marsose ditempatkan didalam benteng, sedangkan sebagian lain bersembunyi di kanan kiri jalan untuk menghadapi serangan pasukan Kelambit. Setelah pasukan Kelambit bersama rakyat menyerbu dan memasuki benteng, mulailah pasukan Marsose Belanda yang bersembunyi di kanan kiri jalan muncul dan menembaki rombongan pasukan Kelambit yang masih ada dibelakang, sehingga serangan rakyat dapat dengan mudah dipatahkan kemudian mereka melarikan diri.

Pasukan Marsose Belanda yang sudah terlatih dan berpengalaman bukanlah tandingan seimbang bagi pasukan Kelambit bersama rakyat yang memang kurang terlatih dan belum berpengalaman. Apalagi hanya memiliki persenjataan sederhana seperti kujur, pedang dan keris, sedangkan pasukan Marsose memiliki senjata modern seperti senapan dan pistol. Oleh karena bala bantuan dari Jambi tidak kunjung datang mengakibatkan kurangnya pasukan, karena Belanda telah lebih dulu mengirim sebagian pasukan Marsose untuk mencegat pasukan Jambi di daerah perbatasan. Maka pasukan Kelambit Rawas bertempur sendiri melawan Belanda. Walaupun pertempuran itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat yaitu selama 24 jam, namun perlawanan rakyat cukup sengit karena semangat rakyat yang cukup tinggi ingin mengusir Belanda dari Rawas.

Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah gedung pemerintah kolonial di Surulangun (ibukota *Onder Afdeeling* Rawas) dan beberapa rumah pejabat

(*ambtenar*) Belanda terbakar dan jaringan telepon menjadi terputus. Bagi para *ambtenar-ambtenar,* ini sangat meninggalkan kesan yang sangat mendalam dari kalangan pemerintahan kolonial di Karesidenan Palembang.[110] Mereka (pasukan Kelambit) dengan massa yang berjumlah ratusan juga menyerang pos-pos hanya dijaga oleh beberapa petugas polisi. Yakin akan ketangguhan mereka, mereka menyerang gedung-gedung pemerintah hanya bersenjatakan pisau.[111]

Akibat peperangan ini, pasukan Kelambit mengalami kerugian yang tidak sedikit. Ratusan orang mati tertembak lebih dari 120 orang, lalu beberapa orang luka berat, serta luka ringan, kemudian ratusan lain tertangkap pasukan Belanda. Mereka yang tertangkap ini ditempatkan di tanah lapang dan dikelilingi kawat berduri yang terus tertimpa hujan dan panas. Hal ini kemudian membuat Abdulhamid bin Setipal memerintahkan sisa-sisa pasukannya yang selamat untuk mengundurkan diri kedalam hutan, walaupun kemudian mereka terus dikejar pasukan Marsose. Atas dasar itu, pasukan Belanda mengadakan tindakan pembersihan di dusun-dusun, apabila ditemukan orang yang dicurigai maka ditangkap dan ditahan. Sementara Abdulhamid bin Setipal bersama

---

[110] Rimbun Natamarga, *Kedudukan dan Peran Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga di Pedalaman Palembang 1825-1942*, (Banyuasin: Yayasan Institute Studi Ekonomi dan Kewirausahaan, 2021), hlm. 101-102; Martinus Nijhoof, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, (Leiden: Nederlandsch-Indie, 1919), hlm. 556-557.

[111] Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate and Colonial State; Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907*… , hlm. 268.

pasukannya mundur ke daerah Sungai Tingkip, dan berusaha mengatur siasat perang baru. Sementara itu pengejaran terus dilakukan oleh pasukan Marsose, akhirnya Abdulhamid bin Setipal beserta pasukannya berhasil ditangkap saat berada di hutan Biaro Rawas.

Setelah ditangkap, Abdulhamid bin Setipal beserta pasukannya dinaikkan ke kapal Seng Hong Bie kemudian dibawa menuju Surulangun, mereka juga ditahan dan ditempatkan dalam kandang kawat yang terbuka pula. Setelah 3 bulan ditahan, Abdulhamid bin Setipal, Abdullah bin Setipal dan Kelambit alias Muhammad Amin[112] dipindahkan ke penjara Palembang. Setelah diintrogasi dan beberapa bulan diproses peradilan, akhirnya ketiganya dihukum mati atas putusan pengadilan kolonial Belanda, yaitu hukuman gantung didepan umum dilaksanakan di Benteng Palembang tanggal 21 April 1917 pada jam 7 pagi. Sebelum menjalankan hukuman mati, yang dihukum akan diberi kesempatan untuk meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Kesempatan itu digunakan Abdulhamid bin Setipal untuk berpesan kepada anaknya, Abdul Harun yang mengatakan: a). Semua pekerjaan haruslah jujur, b). Terus mengaji ayat Al-Qur'an, c). Menanam pohon karet, d). Lanjutkan perjuangan. Demikian pesan terakhir Abdudhamid bin Setipal kepada anaknya. Lalu sebagian dari penduduk

[112] Hukuman kepada Kelambit ini digunakan oleh Belanda sebagai alat propaganda untuk memadamkan semangat perjuangan rakyat, terutama dalam kalangan anggota Sarekat Islam sendiri. Lihat Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1954), hlm. 180.

menyaksikan peristiwa itu, kemudian jenazah ketiga pejuang tersebut sebagai tokoh pejuang Kelambit diserahkan kepada keluarganya dan seteruskan dikebumikan di pemakaman Tanah Miskin (Penguburan Kamboja) di Palembang.[113] Sedangkan beberapa pasukan Kelambit yang terbunuh oleh Belanda dikuburkan dalam satu lobang di Pulau Tengah yang terletak antara Pasar Surulangun dan Desa Surulangun.[114]

Kemudian pemerintah kolonial Belanda terus melakukan tindakan peradilan kepada pemberontak perang Kelambit ini. Beberapa diantaranya antara lain: Penggawa Serawang, Umar Gunawan, Mayatin, Asaratin, H. Abdullah dan lainnya dihukum penjara selama 20 tahun. Sedangkan H. Zakaria dan H. Lasyim dihukum 15 tahun penjara dan dibuang ke Pulau Seram. Sementara yang lainnya dihukum 1-10 tahun penjara. Akibat penyerangan tersebut, maka tindakan pemerintah kolonial Belanda semakin kejam kepada rakyat dan terus membebani pajak serta kerja rodi untuk kepentingan pemerintah kolonial di daerah Rawas. Disamping itu, sebagian akibat dari perang kelambit ini yang digerakkan Sarekat Islam maka secara resmi menjadi organisasi terlarang untuk daerah Rawas.

---

[113] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim …., hlm. 65.

[114] Pemerintah Dati II Musi Rawas, *Latar Belakang Pembangunan; Monumen Perjuangan Kabupaten Musi Rawas di Lubuklinggau*. (Lubuklinggau: Humas Pemda Tingkat II Musi Rawas, 1987), hlm. 1.

Gambar 16. Gerbang masuk untuk sel tahanan
Benteng Palembang (1916)
Sumber: *https://collectie.wereldculturen.nl/*

Untuk meluruskan sejarah, bahwa perang Kelambit sering dihubungkan dengan 'Sarekat Abang'. Hal ini menjadi kesalahpahaman dikalangan pencinta sejarah yang menyebut sarekat abang diasosiasikan dengan partai komunis Indonesia (PKI). Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa sarekat abang yang dimaksud adalah organisasi Sarekat Islam yang memperoleh pengaruh dari Turki, pengikutnya di Rawas ini selalu menggunakan ikat kepala berwarna merah sebagai identitas mereka. Pada tahun 1916 dan selanjutnya, di wilayah Karesidenan Palembang sampai ke daerah Uluan, pengaruh Turki ini sangat tampak. Bahkan di kota Palembang sendiri pada waktu

itu banyak yang menggunakan 'Kopiah Turki' dalam berwarna merah dan berjambul sehingga disebut juga kopiah *stambul*.

C. Dampak setelah Perang

Walaupun dapat dipadamkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, aksi yang dilancarkan Sarekat Abang tampaknya meninggalkan kesan yang mendalam bagi kalangan penduduk di Rawas dan juga pemerintah Kolonial. Pemuka-pemuka Sarekat Islam di Palembang, beberapa hari setelah peristiwa, menampik tuduhan pemerintah kolonial yang menilai bahwa pengurus Sarekat Islam Palembang ikut terlibat dalam aksi pemberontakan tersebut. Persoalan yang lebih penting tentu bukan sekedar; apakah Sarekat Islam Palembang terlibat atau tidak dalam kejadian tersebut, melainkan mengapa pemberontakan itu sampai terjadi. Dan mengapa daerah Rawas menjadi pusat perlawanan jika pajak dan kerja rodi yang merupakan isu umum di seluruh daerah pemerintahan *Residentie* Palembang.

Dalam konteks Palembang, Sarekat Islam datang menghidupkan komunitas agama yang tak pelak menggunakan simbol Islam berpadu dengan unsur mistik lokal. Perguruan pengajian 'ilmu abang' dari pengikut Sarekat Abang membuat gerakan Sarekat Islam di Rawas menjadi lebih keras. Mengingat daerah Rawas yang menjadi pusat perlawanan lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan *Residentie* Palembang sehingga sulit diawasi pemerintah. Meski hubungan

dengan pusat pemerintahan kolonial di Jambi lebih dekat ketimbang Palembang, kontrol di Jambi terlihat sangat lemah dan ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan masuknya senjata-senjata gelap.[115] Akibat dari kebijakan pemerintah kolonial yang membebani rakyat terutama berbagai macam pajak dan kerja rodi, sangat jelas membuat frustasi dan membangkitkan rasa ketidakadilan serta memicu pemberontakan rakyat ini.

Setelah terjadinya pemberontakan Sarekat Abang di wilayah Rawas, pengurus Sarekat Islam Palembang menampik tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Sarekat Islam tidak pernah mengenal *onderbouw* yang bernama Sarekat Abang. Menurut Sarekat Islam Palembang, ajaran yang dikembangkan Sarekat Abang mengandung aliran mistik (tareqat) dengan menggunakan beberapa simbol tertentu, seperti pakaian warna merah atau sejumlah doa yang diwajibkan kepada setiap anggota. Semua itu bukan doktrin SI.[116] Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Sarekat Abang bukanlah anggota organisasi Sarekat Islam yang menempuh jalur sosial-politik yang sangat dinamis, bukan radikal seperti dilakukan kelompok bernama Sarekat Abang.

Untuk mencegah tumpang tindih keanggotaan, Sarekat Islam memberlakukan kebijakan ketat: calon

---

[115] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*...., hlm. 139.

[116] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*..., hlm. 139-140.

anggota diwajibkan menyatakan secara tertulis bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Sarekat Abang. Kebijakan ini bertujuan menjaga integritas ideologis organisasi. Di sisi lain, Sarekat Abang memiliki karakter yang kontras dengan Sarekat Islam Merah, kelompok beraliran Marxis yang secara tegas menolak praktik berbau takhayul dan berfokus pada perjuangan kelas. Sementara Sarekat Islam Merah mengusung prinsip materialisme historis dan kritik terhadap sistem kapitalis, Sarekat Abang lebih terikat pada gerakan berbasis identitas lokal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka pemikiran Marxis. Perbedaan orientasi ini menciptakan garis pemisah yang jelas antara kedua kelompok, baik dalam strategi perjuangan maupun basis filosofis yang dianut.

Dalam catatan ***Haagsche Courant*** melaporkan bahwa di Palembang beredar desas-desus, ketika penggeledahan rumah-rumah disana ditemukan surat-menyurat antara Sarekat Islam di Palembang dengan pimpinan tertinggi di Jawa, tentang pemberontakan di Palembang dan juga Jambi. Sosok Raden Nangling, pemimpin pertama Sarekat Islam di Palembang, menghilang tanpa jejak.[117] Kemudian pada catatan ***Amersfoortsch Dagblad*** dilaporkan bahwa pimpinan utama pemberontakan Kelambit telah ditangkap selama bentrokan di Surulangun Rawas, dan hal ini meninggalkan kesan yang mendalam. Para penduduk telah kembali kerumah-rumah mereka. Perlawanan

[117] *Haagsche Courant* tanggal 20 Oktober 1916, No. 10326, hlm. 5.

sudah diputus total yang bermula dari marga Suka Pindah Ilir (Bingin Teluk), tetapi masih terjadi keresahan di marga Ulu Rawas namun dapat teratasi. Dan sambungan telepon antara Palembang dan Surulangun Rawas juga telah pulih kembali.[118]

Dalam catatan ***'Het Vaderland'*** ditambahkan juga bahwa setelah pergolakan di Surulangun (Ibukota *Onder Afdeeling* Rawas), Departemen Koloni telah menerima pesan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Letnan de Quant dalam patrolinya, melaporkan disana telah aman. Patroli rutin di kawasan Palembang telah dilaksanakan, termasuk pertemuan Sarekat Abang di wilayah Ogan Ilir pada hari-hari terakhir, para pemimpin telah ditangkap.[119] Scholten dalam tulisannya, ***'Sumatran Sultanate and Colonial State'*** bahwa orang-orang ini hidup dengan harapan penuh keyakinan bahwa penyelamat mereka akan turun dengan pesawat terbang sebagai *deus ex machina*.[120] Bahkan seorang pemimpin pemberontak di Rawas menjelaskan dalam interogasinya, bahwa ketika menyerang musuh, dia mengamati langit untuk mencari tanda-tanda keberadaan Raden Gunawan. Ketika tidak ada pesawat yang muncul, ia melarikan diri ke hutan karena kecewa. Raden Gunawan

---

[118] *Amersfoortsch Dagblad* tanggal 26 Oktober 1916, No. 100, hlm. 2.

[119] *Het Vaderland* tanggal 19 Oktober 1916 No. 292, hlm. 2.

[120] Istilah untuk perangkat alur cerita di mana masalah sulit tiba-tiba terpecahkan oleh kejadian tak terduga. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti 'dewa dari mesin', merujuk pada praktik dalam drama Yunani kuno di mana dewa turun secara tiba-tiba untuk menyelesaikan konflik.

digambarkan sebagai putra dari 'Raja Stambul', sultan Turki.[121] Sehingga mereka menganggap Raden Gunawan sebagai orang keramat, yang dihormati sebagai wali Allah.

Meskipun pemberontakan yang menimbulkan perang 'Kelambit' dapat ditangani oleh pemerintah kolonial, namun gerakan-gerakan kecil yang tersisa masih berlanjut. Pada tahun 1918, Muara Rupit yang juga menjadi bagian *onder afdeeling* Rawas juga telah berdiri Sarekat Islam dengan seorang bernama Daudwijaya sebagai presiden lokalnya, Akep serta Jabar sebagai propagandis. Selanjutnya mereka mengadakan rapat rahasia dihadiri 60 jumlah anggota. Rapat ini bertujuan untuk membicarakan serta mengatur langkah upaya dalam membayar pajak yang tinggi. Namun mereka digrebek polisi kolonial Belanda sehingga terpaksa rapat bubar serta peserta berlarian menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini yang ditangkap dan salah satunya adalah Jabar. Selain dianiaya polisi Belanda, Jabar dijebloskan ke penjara di *Moesi Oeloe* selama tiga hari. Kemudian Jabar diajukan ke *Landraad* di *Moesi Oeloe* memperoleh hukuman selama 6 bulan karena melakukan rapat gelap.[122] Akan tetapi secara diam-diam, berdalih ceramah keagamaan maka kegiatan Sarekat Islam tetap berjalan. Selain menyampaikan ceramah agama, diselipkan cita-cita untuk bebas dari penjajahan kolonial Belanda. Maka

---

[121] Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate and Colonial State; Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907*…, hlm. 272.

[122] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim …., hlm. 55.

dari itu, Sarekat Islam di daerah Muara Rupit dipimpin Daudwijaya tetap terus aktif melakukan aktifitasnya.

Tindakan keras pemerintah Kolonial Belanda terhadap orang-orang Sarekat Abang membuat Sarekat Islam daerah Palembang terpaksa mengurangi aktifitasnya. Tidak ada lagi kegiatan propaganda atau pertemuan-pertemuan terbuka untuk para anggota Sarekat Islam sampai tahun 1919. Karena walau bagaimanapun juga, pemberontakan Sarekat Abang ini telah menyadarkan semua pihak baik pemerintah kolonial maupun kalangan Sarekat Islam Palembang. Pemerintah mulai meninjau kembali kebijaksanaan administrasinya dan mencoba memperbaharui peraturan pungutan pajak dan *hereendiensten* yang dituangkan dalam IGO (*Inlandsche Gemeenteordonantie*) pada tahun 1919.[123]

Akibat dari peristiwa dan aksi yang telah dilakukan oleh Sarekat Islam, atau bahkan tanpa bukti yang kuat pun pemerintah menangkap, memenjarakan dan mengasingkan para pemimpin-pemimpin mereka di tempat-tempat di luar daerah *Residentie* Palembang. Sehingga mulai tahun 1920, organisasi Sarekat Islam di daerah Rawas secara keseluruhan menjadi terlarang dan dibubarkan.[124]

Walaupun pembubaran Sarekat Islam ini tidak berarti organisasi ini hilang. Sarekat Islam menjadi satu badan boleh saja dihapus, akan tetapi semangat dan

---

[123] Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*…., hlm. 139.

[124] Triana Wulandari dan Muchtaruddin Ibrahim …., hlm. 57.

sikap anti penjajahan tidak terhapus. Masyarakat memiliki kesadaran tinggi sebagai bangsa yang berbudaya. Sebab tanpa ada unsur paksaan manapun, kebencian terhadap kolonial tetap ada, ingin kebebasan dari pengaruh penjajah. Oleh karena itu, maka para aktivis Sarekat Islam tetap berupaya menyatukan para tokoh masyarakat untuk tetap melakukan gerakan meskipun secara sembunyi.

Menurut analisis Korver, *Oetoesan Hindia* pada 1916 melaporkan bahwa Sarekat Islam secara tegas menolak paham-paham radikal seperti nihilisme, anarkisme, Saminisme, dan 'Sarekat Abangisme' sebuah istilah yang merujuk pada gerakan Sarekat Abang. Kutipan dari Snouck Hurgronje dalam laporan tersebut menegaskan, 'Berkat Sarekat Islam, Indonesia terhindar dari pengaruh destruktif ideologi-ideologi tersebut.' Perbedaan prinsip antara Sarekat Islam dan Sarekat Abang tampak jelas: sementara Sarekat Islam mengusung figur Tjokroaminoto sebagai simbol Ratu Adil (penyelamat yang dinantikan), Sarekat Abang justru mengkultuskan Kelambit pemimpin karismatik di Rawas dan pedalaman Jambi sebagai Imam Mahdi. Kelambit, yang mahir berpidato, berhasil menarik massa dengan retorika revolusioner. Dalam propagandanya, ia menyatakan bahwa 'perang melawan pemerintah kolonial kafir adalah jihad wajib bagi anggota Sarekat Abang.' Taufik Abdullah mencatat bahwa klaim messianik Kelambit ini mencerminkan strategi mobilisasi berbasis religiusitas,

yang kontras dengan pendekatan Sarekat Islam yang lebih menekankan reformasi sosial dan pendidikan.[125]

Snouck Hurgronje mengatakan dalam catatannya menurut pandangannya semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda terkait pergolakan di Rawas:

> Demikianlah, terkait huru-hara di Rawas, terdengar bahwa penduduk di sana 'belum matang untuk kehidupan berserikat dalam arti yang sebenarnya.' Di bagian lain, disebutkan bahwa 'Sejarah Palembang telah membuktikan dengan jelas bahwa ketenteraman di wilayah ini tidak terganggu oleh pemerintahan marga yang kuat.' Pemerintahan tersebut dijalankan oleh para kepala yang sepenuhnya merasa diri mereka sebagai alat dari tuan-tuan Eropa. Semua ini berkaitan dengan ketidakmatangan masyarakat dalam memahami apa yang dimaksud sebagai 'kehidupan berserikat dalam arti yang baik.'[126] Ditambahkan lagi oleh Snouck Hurgronje bahwa demikian pula, akan sia-sia jika di wilayah Rawas, kita hanya membatasi diri pada pengamanan defensif di sekitar benteng tanpa menghadapi musuh yang, meskipun

---

[125] Fridiyanto, *Kaum Intelektual dalam Catatan Kaki Kekuasaan*, (Lampung: CV. Gre Publishing, 2017), hlm.112

[126] E. Gobee dan C. Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1995), hlm. 2261.

lemah, bisa berani bertindak di luar perkiraan dan mengimbangi kelemahan mereka.[127]

Kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa situasi di wilayah Rawas menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam kehidupan berserikat yang menghambat stabilitas sosial dan pemerintahan yang efektif. Meskipun pemerintahan marga dianggap mampu menjaga ketenteraman di Palembang, kesetiaan mereka sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial menunjukkan keterbatasan independensi dan kemandirian lokal. Di sisi lain, strategi pengamanan yang hanya bersifat defensif tanpa tindakan proaktif terhadap ancaman dapat menjadi kelemahan yang dimanfaatkan musuh, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam menjaga keamanan wilayah.

[127] E. Gobee dan C. Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda* ..., hlm. 2244.

BAB 5
PENUTUP

Dinamika gerakan sosial di Rawas tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakatnya sejak sebelum tahun 1914. Pada mulanya, kehidupan masyarakat Rawas berjalan relatif sederhana dan bertumpu pada sektor pertanian. Mereka bermukim di sepanjang aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas yang menjadi jalur utama mobilitas, sumber air, sekaligus penopang ekonomi. Namun, ketika kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda menguat di Rawas, keseimbangan tersebut mulai terguncang. Panen padi yang buruk membuat persediaan pangan menurun. Beban itu belum cukup; kerja paksa untuk pembangunan jalan raya turut diberlakukan, sehingga masyarakat Rawas tidak hanya kehilangan sebagian hasil usaha mereka, tetapi juga tenaga dan waktu. Keadaan ini menimbulkan tekanan yang berat dan menumbuhkan rasa ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah kolonial.

Dalam situasi sosial ekonomi yang kian menyesakkan itu, kemunculan Sarekat Islam pada tahun 1914 di Rawas membawa harapan baru bagi masyarakat. Organisasi ini diperkenalkan oleh Raden Gunawan, yang menggunakan pendekatan kultural dan personal dengan terlebih dahulu mendekati para pemimpin lokal. Para tokoh lokal seperti pesirah dan beberapa elite marga dipandang sebagai figur kunci yang memahami karakter, aspirasi, dan persoalan masyarakatnya. Melalui mereka, Sarekat Islam menjelaskan tujuan pendiriannya, yakni perjuangan melawan ketidakadilan dan upaya mencari keringanan dari beban yang dipikul rakyat. Salah satu tokoh penting yang kemudian menjadi simpatisan ialah Abdul Hamid bin Setipal, Kepala Marga Suka Pindah Ilir. Gagasan tentang pembebasan atau keringanan pajak yang diusung Sarekat Islam segera memperoleh sambutan luas. Bagi rakyat Rawas yang tengah terjepit oleh pajak tinggi dan kerja paksa, Sarekat Islam tampak sebagai wadah perjuangan yang memberi bahasa bagi keresahan mereka.

Popularitas Sarekat Islam yang terus meningkat di Rawas bukan hanya memperkuat solidaritas masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya gerakan lain yang memanfaatkan pengaruhnya. Di titik inilah Sarekat Abang masuk dan memanfaatkan basis massa Sarekat Islam untuk menggalang perlawanan yang lebih tegas terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Ketegangan pun mulai mengeras dalam bentuk bentrokan-bentrokan kecil

antara Sarekat Abang dan aparat kolonial. Konflik tersebut mencapai puncaknya dalam Perang Kelambit pada tahun 1916 di Rawas, ketika perlawanan yang semula tersamar menjelma menjadi konfrontasi terbuka. Sejak peristiwa itu, anggota Sarekat Abang yang sebagian besar berasal dari kalangan Sarekat Islam di wilayah pemerintahan *Onder Afdeeling Rawas* diposisikan sebagai tertuduh utama dalam gerakan anti-kolonial.

Tanggapan pemerintah kolonial terhadap perlawanan ini sangat keras. Penindasan, penangkapan, dan berbagai tindakan represif lainnya diarahkan kepada anggota Sarekat Abang dan siapa pun yang dianggap terkait. Imbasnya, aktivitas Sarekat Islam di daerah Palembang ikut terdesak dan perlahan berkurang. Ruang gerak organisasi menjadi sempit, pengawasan diperketat, dan aktivitas yang sebelumnya terbuka terpaksa direduksi. Pada akhirnya, gerakan Sarekat Abang di Rawas tersisih dari panggung sejarah, seakan tertelan oleh kebijakan represif kolonial. Puncak dari proses ini terjadi ketika pemerintah kolonial Belanda melarang Sarekat Islam pada tahun 1920. Larangan tersebut bukan hanya mengakhiri fase penting dalam sejarah gerakan rakyat di Rawas, tetapi juga menandai berakhirnya sebuah babak perlawanan yang berakar dari penderitaan ekonomi, pencarian keadilan, dan keberanian masyarakat lokal menghadapi kekuasaan kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP BUKU

Anonim, (1930). *Volkstelling Overzict voor Nederlandsch-Indie*. Department van Economische Zaken.

Haastert, W.K.S.V. (1916). *DE SARIKAT ISLAM*. Weltevreden: Albrecht & Co.

Hoyer, G.B. (1896). *De Krigsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894; Deel II.* Batavia: G. Kolff & Co.

Martinus, N. (1919). *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*. Leiden: Nederlandsch-Indie.

Martinus, N. (1927). *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*. Leiden: Nederlandsch-Indie.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. (1865). Batavia: Ter Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. (1874). Batavia: Ter Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. (1881). Batavia: Ter Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. (1907). Batavia: Ter Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. (1914). Batavia: Ter Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. (1915). Batavia: Ter Landsdrukkerij.

Richter, J.F.P. (1911). *Rapport Nopens Den Aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid Sumatra Deel II*. Batavia: Landsdrukkerij.

Richter, J.F.P. (1911). *Rapport Nopens Den Aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid Sumatra Deel III Kaarten*. Batavia: Landsdrukkerij.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 213. (1914). Batavia: Landsdrukkerij.

Veth, P.J. (1881). *Midden Sumatera: Reizen en Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie, Uitgerust Door Het Aardrijkskundig Genootschap 1877-1879*. Leiden: E.J. Brill.

Wellan, J.W.J. (1932). *Zuid-Sumatera Economisch Overzicht van de Gewesten Djambi, Palembang, De Lampoengsche Districten en Benkoeloen*. Wageningen Holland.

ARSIP KORAN

Algemeen Handelsblad. 14 Oktober 1916, No. 28578, http://www.delpher.nl, accessed 12 Februari 2022.

De Locomotief. 16 Juli 1918, No. 197, http://www.delpher.nl, accessed 12 Februari 2022.

Haagsche Courant tanggal 20 Oktober 1916, No. 10326, http://www.delpher.nl, accessed 12 Februari 2022.

Het Vaderland. 19 Oktober 1916, No. 292, http://www.delpher.nl, accessed 12 Februari 2022.

ARSIP FOTO (LINK)

https://collectie.wereldculturen.nl/

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl

BUKU

Abdullah, M. *et. al.* (1992). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Akib, R.H.M. (2020) *Sejarah dan Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badauddin II*. Palembang: Aksara Pena.

Alfian, T.I. *et al*. (1984). *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Benda, H.J. dan McVey, R.T. (1960). *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Djaelani, Anton Timur. (2017). *Gerakan Sarekat Islam; Kontribusi pada Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3S.

Fridiyanto. (2017). *Kaum Intelektual dalam Catatan Kaki Kekuasaan*. Lampung: CV. Gre Publishing.

Garrachan. (1964). *A Guide to Hisrorical Method*. New York: Fordham University Press.

Gobee, E., dan C. Adriaanse. (1995). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.

Hanafiah, Djohan. (1999). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Kementerian Penerangan. (1954). *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Kementerian Penerangan.

Korver, A.P.E. (1985). *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (terj). SAREKAT ISLAM 1912-1916 (1982). Jakarta: Grafitipers.

Lagut, Supian, dan Sarkowi. 2021. *Perkembangan Pemerintahan Daerah Rawas dari Masa Hindia Belanda sampai Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.

Locher-Scholten, Elsbeth. (2003). *Sumatran Sultanate and Colonial State; Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907*. New York: Southeast Asia Program Cornell University Ithaca.

Natamarga, R. (2021). *Kedudukan dan Peran Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga di Pedalaman Palembang 1825-1942*. Banyuasin: Yayasan Institute Studi Ekonomi dan Kewirausahaan.

Nawiyanto & Endrayadi, E. C. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam; Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Tarutama Nusantara.

Pemerintah Dati II Musi Rawas. (1987). *Latar Belakang Pembangunan; Monumen Perjuangan Kabupaten Musi Rawas di Lubuklinggau*. Lubuklinggau: Humas Pemda Tingkat II Musi Rawas.

Rochmiatun, Endang. (2017). *Elite Lokal Palembang Abad XIX – Abad XX; Kajian terhadap Peran Haji Mukim dalam Mengembangkan Islam*. Palembang: Rafah Press.

Samsudin, Wahyu Rizky Andhifani, dan Adhitya Rol Asmi. (2021). *Dokumen Tertulis Ketatanegaraan Kedatuan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Museum Negeri Sumatera Selatan.

Santun, Dedi Irwanto M, Murni & Supriyanto. (2010) *Iliran dan Uluan; 0Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.

Susetyo, B. Ravico, Wahayuni, M. (2022). *Musi Ulu Rawas dalam Kajian Sejarah Lokal*. Lubuklinggau: Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya

Susilo, A. dan Sarkowi. (2019). *Perkembangan Surulangun pada Masa Onder Afdeeling Rawas*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.

Wulandari, T. dan Muchtaruddin, I. (2001). *Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Zed, M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

JURNAL

Azra, A. (1994). "The Indies Chinese and Sarekat Islam An Account of The Anti-Chinese Riots in Colonial Indonesia". *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*. 1, (1), 25-53.

Muthalib, J.A. (1980). "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke-20". LP3S: Jurnal Prisma. 8, 26-37.

Rahim, A. (2020). "Sarekat Islam: Gerakan Islam Modernis atau Tradisional?". *Jurnal Ilmiah Dikdaya.* 10, (1), 119-125.

Sarkowi, Lagut, dan Ira Miyarni Sustianingsih. 2021. "Dinamika Kehidupan Masyarakat di Sepanjang Sungai Rawas Masa Hindia Belanda 1864-1942." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 6, No. 2.

Susetyo, B. dan Ravico. (2021). "Perubahan Birokrasi Marga Wilayah Musi Ulu di Afdeeling Palembangsche Bovenlanden 1906-1942'. *Sejarah dan Budaya:Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya.* 15, (2), 305-320.

Susetyo, B. dan Ravico. (2022). "Perekonomian Masyarakat Onder Afdeeling Moesi Oeloe Tahun 1900-1942". *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 9, (2), 13–35.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Akely, M. (2018). *Resistensi Simbolik: Gerakan Perlawanan Simbol Adat terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana*. Tesis pada Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Khatimah, H. (2021). *Gerakan Sarekat Islam di Jambi Tahun 1914-1917 M*. Skripsi pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muttalib, J.A. (1995). *Jambi 1900-1916 from War to Rebellion*. Disertasi pada Department History Columbia University New York.

GLOSARIUM

Afdeeling	Satuan wilayah administratif pada masa Kolonial Belanda di bawah *Residentie*, dipimpin *Asisten Residen*.
Depati	Gelar kepala marga (Pasirah).
Encyclopedie van Nederlandsch-Indie	Ensiklopedia ilmiah kolonial yang memuat pengetahuan komprehensif tentang wilayah, masyarakat, budaya, bahasa, sejarah, ekonomi masa pemerintahan Hindia Belanda.
Hinterland	Daerah yang menyediakan hasil bumi, tenaga kerja, dan bahan mentah ke pusat perdagangan atau pelabuhan.
Hoofdplaats	Ibukota atau pusat kedudukan pemerintahan suatu wilayah pada masa Hindia Belanda
Iliran	Wilayah hilir sungai atau daerah pesisir.
Marga	Satuan masyarakat hukum adat yang sekaligus berfungsi sebagai wilayah pemerintahan lokal terendah dipimpin seorang kepala marga (Pasirah).
Messianisme	Paham, keyakinan, atau gerakan yang meyakini akan datangnya

	seorang tokoh penyelamat (*Mesias*) yang dipercaya mampu membebaskan masyarakat dari penderitaan, ketidakadilan, atau penindasan, serta membawa tatanan baru yang adil dan sejahtera.
Militant Element	Kelompok, unsur, atau individu yang bersikap keras, radikal, dan siap menggunakan perlawanan aktif termasuk kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau sosial.
Oeloeneezen	Penduduk pedalaman atau hulu sungai.
Onder Afdeeling	Wilayah administratif di bawah *Afdeeling*, dipimpin *Controleur*.
Onderbouw	Istilah dalam bahasa Belanda yang secara harfiah berarti 'struktur dasar'.
Pangeran	Gelar kepala marga (Pasirah) yang diberikan Belanda yang dinilai berjasa dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan marga, hal ini dapat dilihat dari lamanya menjabat yakni lebih dari 20 tahun.
Pax Nederlandica	Istilah historis yang merujuk pada periode 'ketertiban dan stabilitas'

	yang diklaim tercipta di Hindia Belanda setelah seluruh wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, terutama pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Ratu Adil	Figur mesianistik dalam tradisi Nusantara yang diyakini akan muncul sebagai pemimpin ideal dan penyelamat rakyat, membawa keadilan, kesejahteraan, serta mengakhiri penindasan dan kekacauan.
Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie	Buku tahunan resmi pemerintahan Hindia Belanda yang memuat data administratif, hukum, dan kepegawaian kolonial, diterbitkan secara berkala oleh pemerintah kolonial.
Residentie (Karesidenan)	Satuan pemerintahan tingkat tinggi di bawah pemerintah pusat kolonial, dipimpin seorang *Residen*.
Sindang	Wilayah merdeka (perbatasan) masa Kesultanan Palembang Darusalam berdekatan dengan daerah Bengkulu.
Soldadoe	Prajurit atau tentara, terutama serdadu bayaran pada masa kolonial.

Staatsblad	Lembaran negara resmi yang digunakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengumumkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan secara sah.
Uluan	Wilayah hulu sungai atau pedalaman.
Undang-Undang Simbur Cahaya	Kitab hukum adat tertulis masyarakat Palembang di Sumatera Selatan yang mulai diberlakukan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.
Zending	Misi penginjilan Kristen (terutama Protestan) yang dilakukan oleh lembaga keagamaan Eropa di wilayah jajahan, termasuk Hindia Belanda.

INDEKS

A

Abang, iii, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 93, 94, 97, 98, 102, 103
Afdeeling Rawas, 20, 25, 55, 57, 60, 62, 63

B

Bingin Teluk, 51, 58, 70, 86, 87, 95

C

Controleur, 111

D

Depati, 86, 110, 120, 121

H

Hulubalang, 86

K

Kawedanaan, 21
Kelambit, iii, 7, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98

M

Marga, vii, viii, 7, 10, 26, 27, 53, 57, 59, 62, 69, 70, 89, 102, 107, 108, 110
Marsose, 87, 88, 90
Moesi Oeloe, 19, 20, 62, 85, 96, 109
Muara Rupit, 24, 26, 34, 51, 53, 55, 57, 58, 62, 87, 96

O

Onder Afdeeling Rawas, viii, 7, 14, 19, 20, 26, 31, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 69, 89, 95, 102, 108

P

Pasirah, 7, 69, 70, 89, 107, 110, 111
Perang Kelambit, ii, iii, vi, 7, 16, 85, 102

R

Raden Gunawan, 4, 10, 67, 69, 70, 95, 101
Ratu Adil, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 65, 69, 76, 78, 79, 98, 106, 111
Rawas, ii, iii, v, vi, vii, viii, ix, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73,75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 115, 122
Rejang, 22, 26, 27, 28, 29, 43, 45, 52, 54, 55
Residen, 49, 53, 61, 63, 81, 110, 112

S

Sarekat Abang, ii, iii, v, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 64, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 102
Sarekat Islam, v, ix, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 106, 108, 109
Sindang, 15, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 80, 112
Suku Anak Dalam, viii, 22, 45, 46, 47
Sungai Rawas, viii, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 60, 70, 101, 108

Sungai Rupit, viii, 19, 22, 24, 28, 60, 101
Surulangun, viii, 7, 14, 19, 22, 31, 32, 33, 34, 41, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 82, 84, 87, 89, 90, 95, 108

U

Ulu Rawas, 21, 26, 27, 28, 55, 56, 58, 70, 88, 95, 107

LAMPIRAN. Foto Masa Kolonial di Rawas 1877-1925

Pria di Lesung Batu dengan Pakaian Tradisional

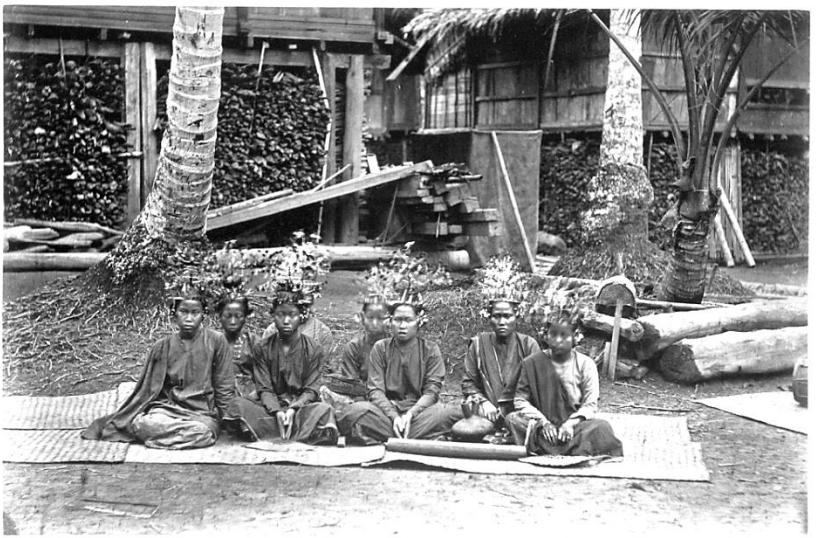

Gadis di Lesung Batu dengan Pakaian Tradisional

Para Gadis di Lesung Batu dengan seorang Pendamping

Para Pemuda di Lesung Batu

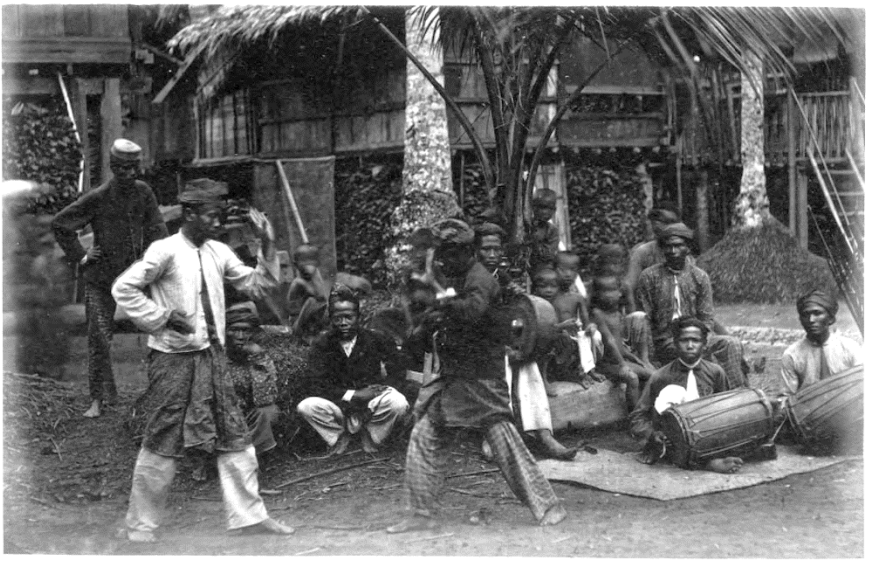

Pertunjukan Pencak Silat

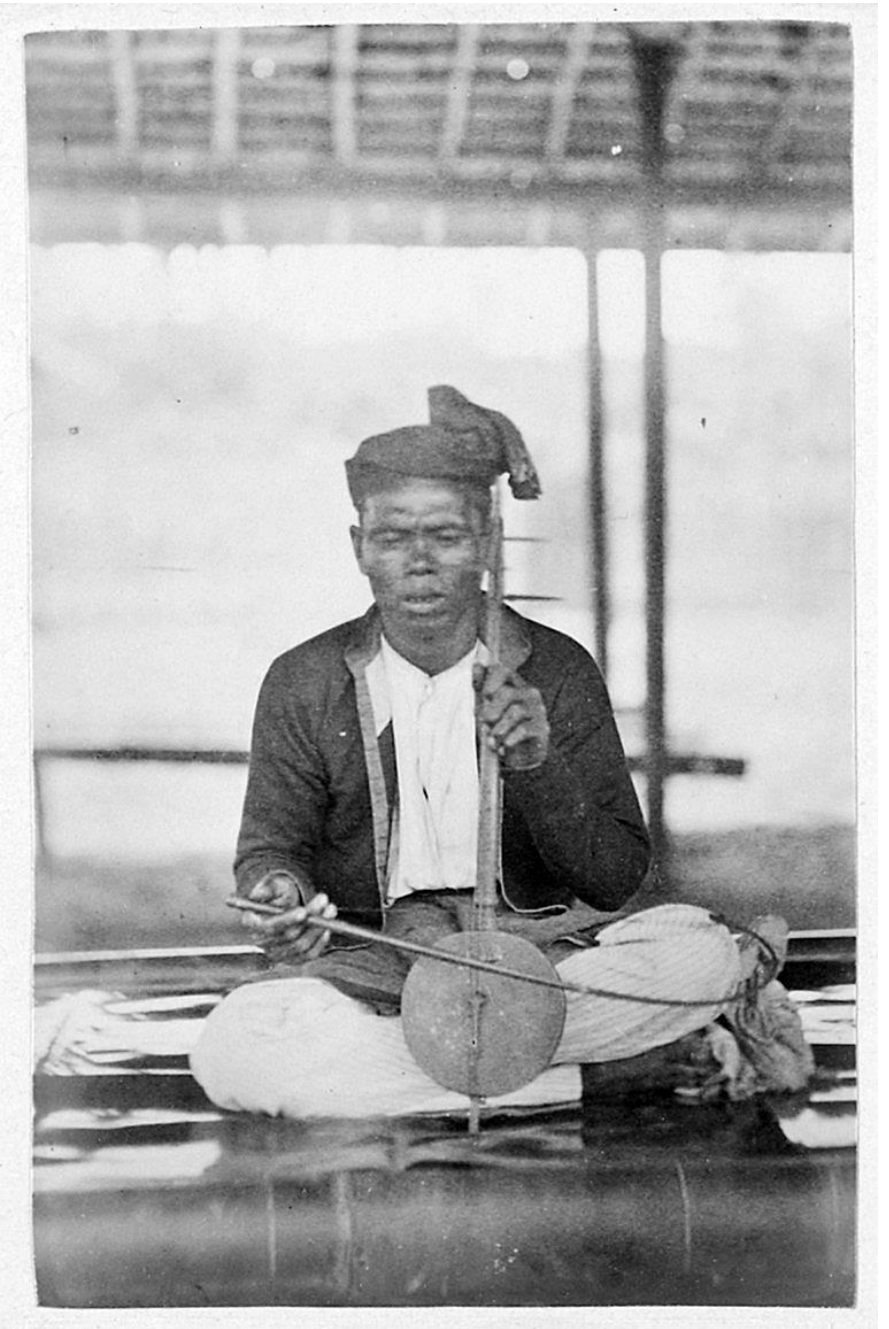

Pemain Rebab

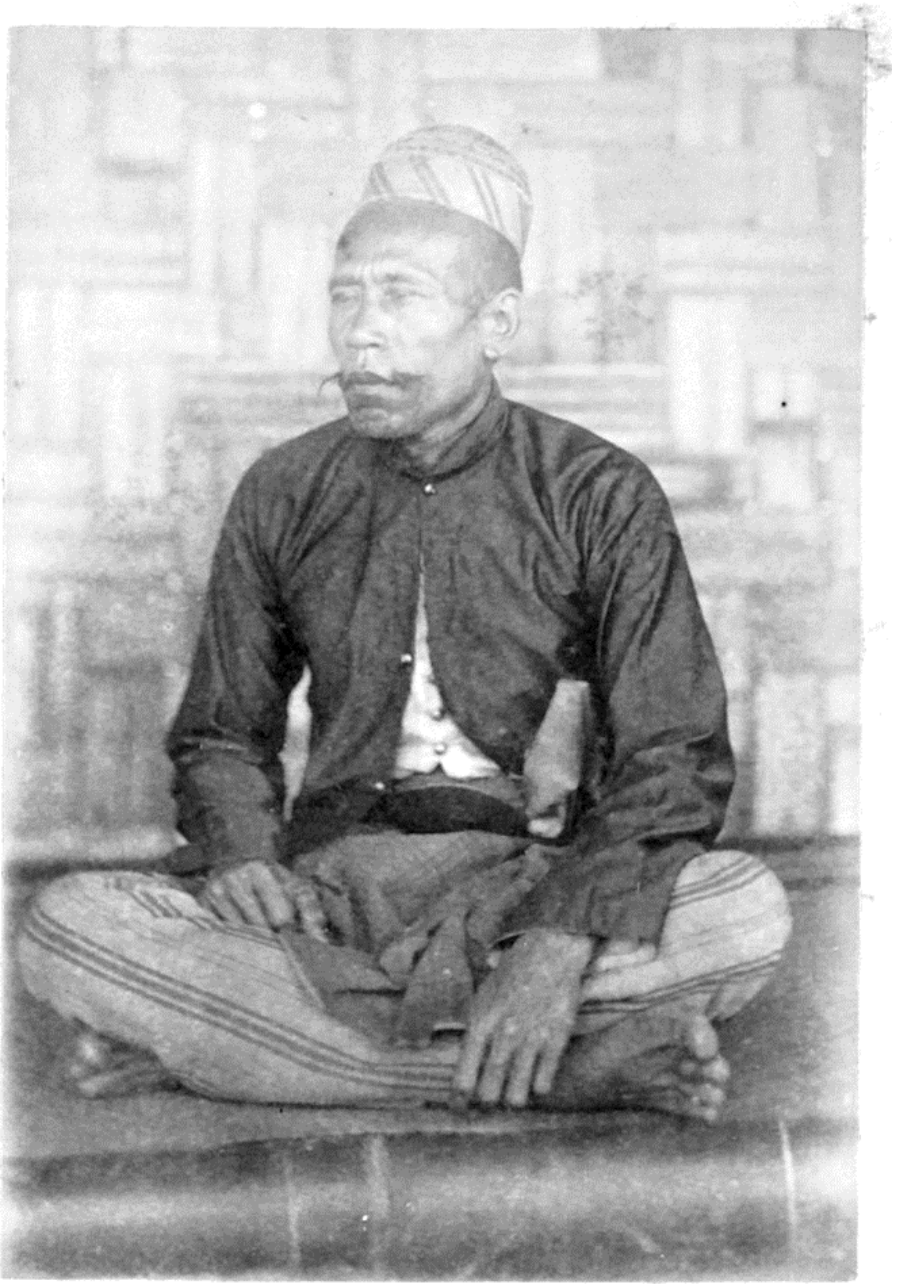

Depati Alai (Aringin)

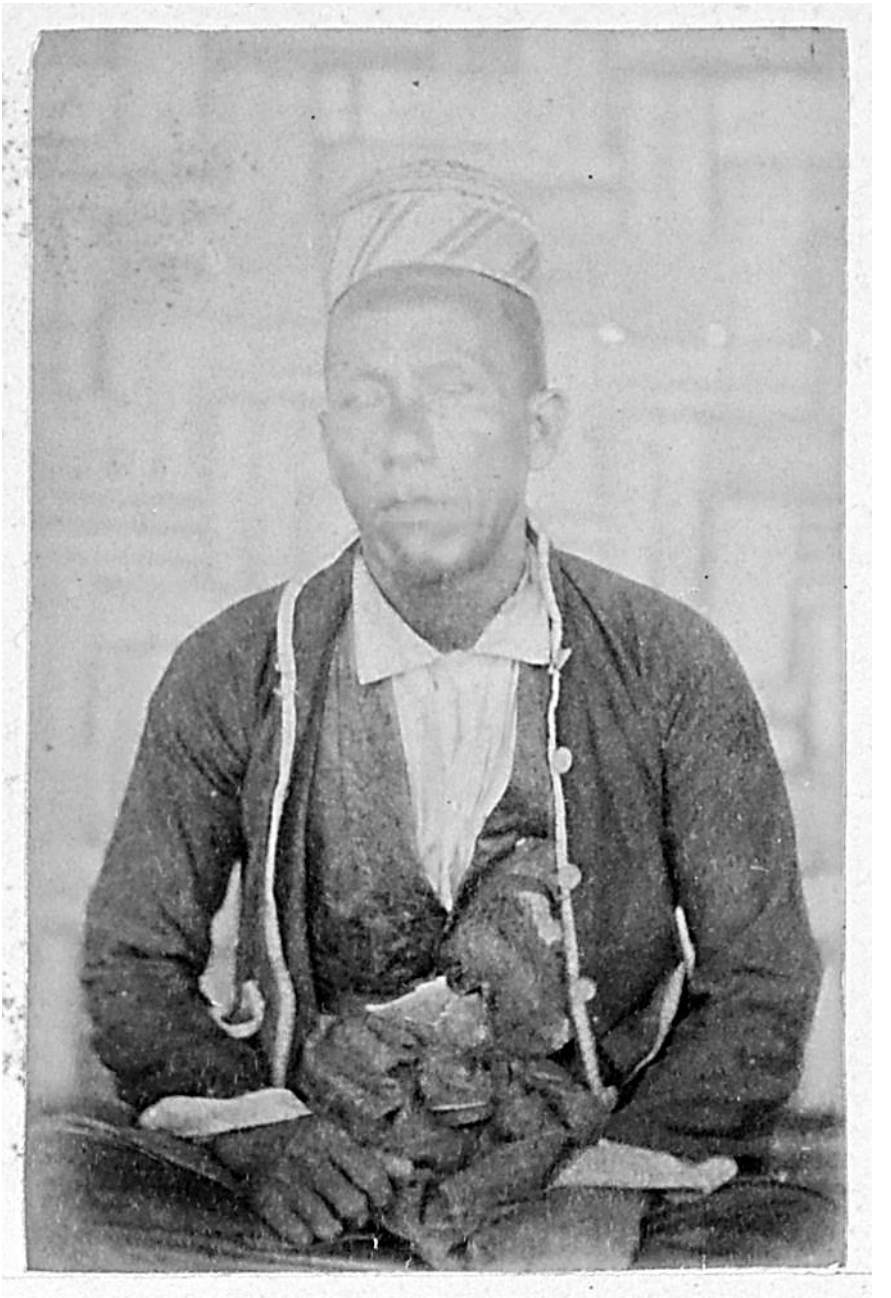

Depati Karang Dapo

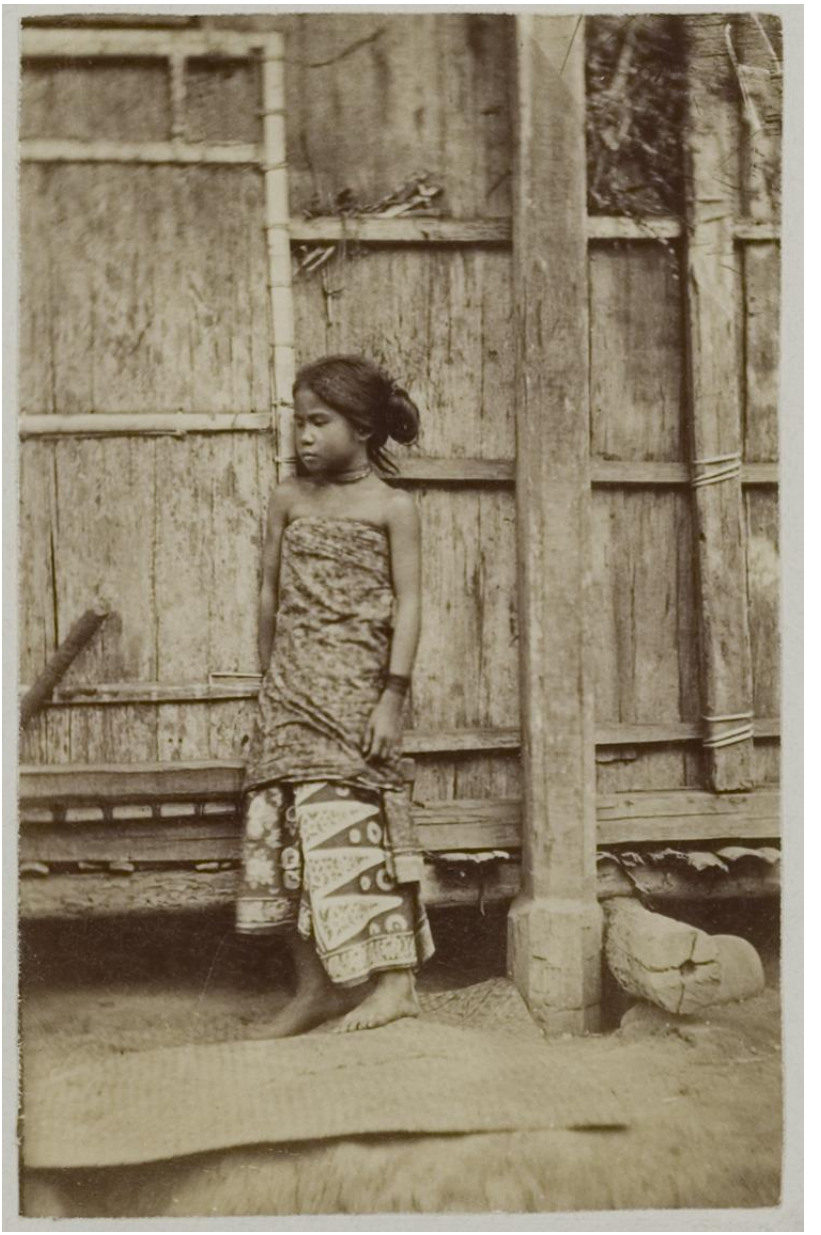

Gadis di Napalicin

Pedagang di Sungai Baung

Istri dan anak dari Depati Ulu Rawas

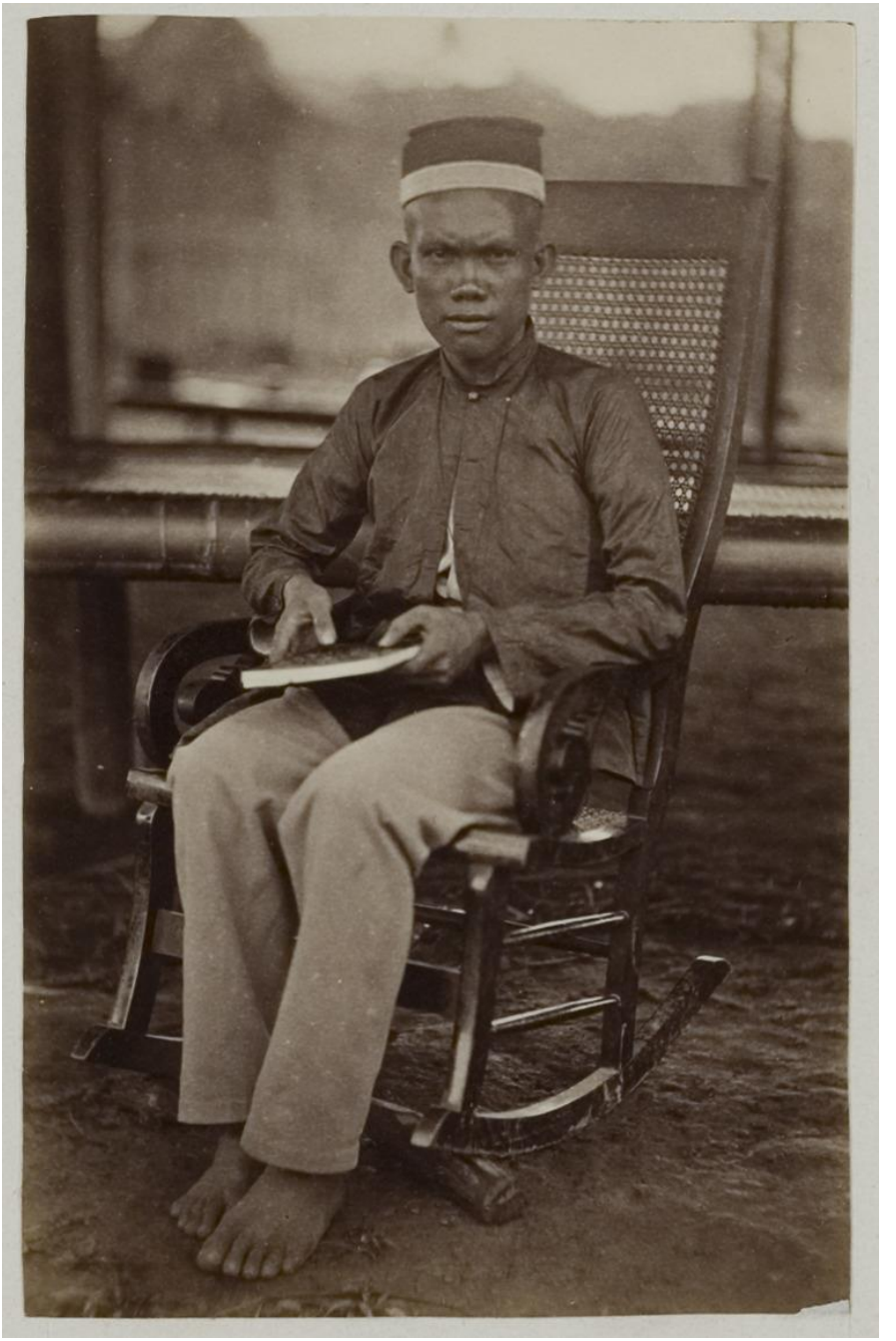

Penulis di Rawas

Seorang Pria dan Anaknya di Napalicin

Pembarap dan Istrinya di Muara Kulam

Anak-Anak di Surulangun

Jalan di Nibung

Rumah dengan Tangga Beratap di Surulangun

Sebuah Arca Budha di Rawas

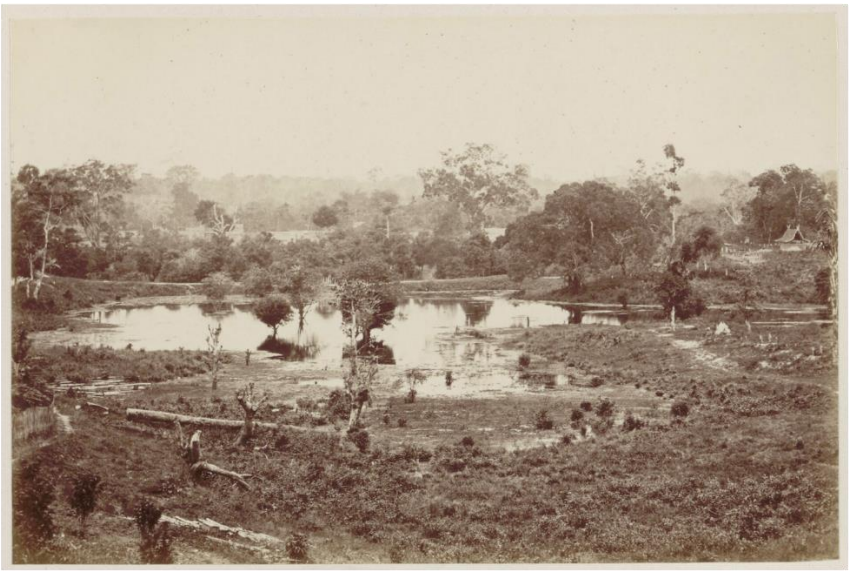

Sebuah Danau Kecil di Rawas

Alas Arca di Kawasan Candi Budha di Rawas

Makara di Kawasan Candi Budha di Rawas

Dua Makara di Rawas

Pembangunan Jembatan Sungai Rawas di Muara Rupit

TENTANG PENULIS

Berlian Susetyo, S.Pd., M.Hum merupakan seorang peneliti sejarah lokal dan permuseuman. Ia dilahirkan di Lahat pada tanggal 28 Mei 1994, menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI Silampari dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya menempuh pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan lulus pada tahun 2025.

Saat ini, ia bekerja sebagai tenaga teknis pada Museum Perjuangan SUBKOSS Garuda Sriwijaya, UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kapasitas tersebut, ia terlibat aktif dalam pengelolaan data koleksi museum, analisis sejarah koleksi, serta kegiatan pelestarian dan penataan koleksi museum.

Minat kajiannya meliputi sejarah lokal Sumatera Selatan (khususnya Lubuk Linggau, Musi Rawas dan

Musi Rawas Utara), sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode 1945-1949, kajian Aksara Ulu (KaGaNga), dan pengembangan koleksi dan edukasi museum. Sejumlah karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional (SINTA 1-5) terindeks Google Scholar, buku ber-ISBN yang terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Selain aktif menulis dan melakukan penelitian, ia juga terlibat sebagai anggota tim penyusun Kurikulum Muatan Lokal Kota Lubuk Linggau sejak tahun 2024, dengan mata pelajaran Pendidikan Kebudayaan Lubuk Linggau. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmennya dalam pengembangan pendidikan berbasis sejarah dan budaya lokal.

Dalam ranah keorganisasian, ia aktif sebagai anggota MANASSA (Masyarakat Pernaskahan Nusantara) Komisariat Sumatera Selatan, Komunitas FOLIRAYA (Forum Peduli Sejarah dan Budaya) Sumatera Selatan, MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Sumatera Selatan, serta LESBUMI (Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia) Sumatera Selatan. Kemudian ia juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan akademik dan kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan sejarah lokal, permuseuman, dan pelestarian warisan budaya.

Prof. Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum merupakan dosen sejarah di Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Ia lahir pada 27 Juli 1971. Pendidikan formalnya dimulai dengan menempuh studi Strata 1 (S1) di Fakultas Adab, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diselesaikan pada tahun 1995. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Sejarah di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikannya pada tahun 2002. Gelar doktor dalam bidang Ilmu Sejarah berhasil diraihnya pada tahun 2016.

Sebagai akademisi yang aktif dalam kajian sejarah, khususnya sejarah lokal Sumatera Selatan, ia telah menginisiasi berbagai penelitian yang sebagian di antaranya dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Beberapa karyanya antara lain Elit Lokal Palembang dan Polemik Kebangkitan Kesultanan Palembang: Menggali Sumber Sejarah melalui Manuskrip (Jurnal Manuskripta, 2018), Naskah Gelumpai di Uluan Palembang: antara Ajaran Islam dan Ajaran Hindu-Buddha (Jurnal Manuskripta, 2019), The Effect of Facebook and Twitter Social Media on Political Participation of the Millennial Moslem Generation

(Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences/IJoMS, 2022), Tradisi Mandi Dulang di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (2021), Akulturasi Kebudayaan dalam Seni Wayang Palembang (Jurnal Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2021), serta karya mengenai Perekonomian Palembang Masa Kesultanan hingga Kolonial Belanda (1136 H–1360 H/1724 M–1942 M) yang diterbitkan oleh UIN Raden Fatah pada tahun 2021.

Dalam periode 2022–2025, ia telah menghasilkan sejumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Beberapa di antaranya adalah: The East Coast of Sumatra in the Spice Trade Network in the 19th Century yang terbit di Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah (2025); Preservasi Naskah Kuno: Studi Kasus Perpustakaan Pribadi Kemas Andi Syarifuddin di Kota Palembang di Berkala Arkeologi (2025); Revitalizing Jawi Script Literacy through Traditional Islamic Education: A Case from Indonesia di Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan (2025); serta Educational Perspectives on the Struggle of Prophet Muhammad SAW: A Historiographic Study Based on J. Suyuthi Pulungan's Works di Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan (2025).

Pada tahun 2024, beberapa artikel yang dipublikasikan antara lain Identity of the Malay and Nusantara Islam Society: An Analysis Through Yusuf al-Qaradawi's Islamic Transformation Thought di

Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies (2024); Implementasi Heuristik dalam Penelitian Sejarah bagi Mahasiswa di Chronologia (2024); Kajian Sejarah Perdagangan di Pesisir Timur Sumatra di Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah (2024); Perkembangan Tradisi Keislaman Melayu di Sumatera Selatan di Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization (2024); Tradisi Keilmuan Islam di Palembang dalam Perspektif Historis di Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam (2024); Perkembangan Jaringan Ulama Melayu di Palembang di Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam (2024); Sejarah Sosial Masyarakat Melayu Palembang pada Masa Kolonial di Jurnal Sejarah Citra Lekha (2024); serta Peran Ulama dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Sumatera Selatan di Jurnal Pendidikan Sejarah (2024).

Sementara itu pada tahun 2023, publikasinya meliputi The Impact of the Palembang War and Dutch Colonial Domination on Socio-Economic Changes in Palembang in the XIX–XX Century di Cogent Arts & Humanities (2023); Palembang-Malay Women's Resistance against the Domination of Patriarchal Culture in the XX Century di Indonesian Historical Studies (2023); Mosque-Based Economic Empowerment in the Malay World: Views of Ibnu Khaldun's Asabiyah and Malik Bennabi's Civilization Theories di Al-Qalam (2023); Perang Rakyat Palembang: Analisis Sejarah dalam Komik 5 Hari 5 Malam di Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam

(2023); serta Bank Digital sebagai Peradaban Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia di Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance (2023).

Adapun beberapa artikel lain yang terbit sekitar tahun 2022 antara lain Puyang dalam Kepercayaan Masyarakat Desa Ujanmas Lama di Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam (2022); Peranan KH. Ahmad Taufiq Hasnuri dalam Dakwah Islam di Kota Palembang di Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam (2022); Perkembangan Tari Pakkuru Sumange' pada Masyarakat Bugis di Banyuasin di Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam (2022); Relasi Dukun dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sawah Tahun 2017) di Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization (2022); Peran Ulama dalam Jaringan Pendidikan Islam di Palembang di Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam (2022); Perkembangan Madrasah dalam Sejarah Pendidikan Islam di Sumatera Selatan di Jurnal Pendidikan Islam (2022); Dinamika Sosial Masyarakat Melayu Palembang pada Masa Kolonial Belanda di Jurnal Humaniora (2022); serta Kajian Historis Budaya Melayu Palembang dalam Perspektif Islam Nusantara di Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture (2022).

Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si. Lahir di Palembang pada 25 Mei 1977. Saat ini bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Ia menamatkan Pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Negara dengan gelar S.IP. (Sarjana Ilmu Politik), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2000. Pada tahun 2007, ia berhasil menamatkan pendidikan S-2 pada Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran dengan gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Ilmu Sosial BKU Kebijakan Publik. Pada tahun 2019, menyelesaikan Pendidikan S-3 untuk gelar Dr. (Doktor) pada Program Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Peradaban Islam. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik (2020) dan Ketua Program Studi Politik Islam (2020-2025) UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai Ketua I Pengurus Harian Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sumatera Selatan 2025-2029. Pernah mengikuti pelatihan Higher Education Management Program (HEM) di Australia (2015), Pelatihan Teknis Revolusi Mental Angkatan I (2021), ISO 9001 : 2015 Requirement Training Course (2021), Training of Trainer Pendampng PPH (Proses Produk Halal) (2022), Pelatihan Orientasi Pelopor

Moderasi Beragama (2022), dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (2025).

Karya tulis yang dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain Peran Religio Politik Sayyid Palembang di Semenanjung Melayu pada Abad ke-18 dan 19 M yang diterbitkan oleh Idea Press Yogyakarta pada tahun 2015. Pada tahun yang sama juga terbit buku Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilukada: Studi Kasus Pilwakot Palembang 2013 yang diterbitkan oleh Penerbit Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Selanjutnya, pada tahun 2022 diterbitkan buku Budaya Politik Aristokrat Melayu Abad ke VIII–XIX M: Analisis Kontekstual Manuskrip Sejarah Palembang oleh UIN Raden Fatah Press. Karya berikutnya adalah Ziarah Kubra dan Kaum Sayid: Perspektif Politik, Keagamaan, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Palembang yang diterbitkan oleh UIN Raden Fatah Press pada tahun 2024. Terakhir, pada tahun 2025 terbit buku Representasi Politik Legislator Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia: Analisis Pemikiran Abdullah Gathmyr yang juga diterbitkan oleh UIN Raden Fatah Press. Selain menulis buku dan mempublikasikan artikel dalam berbagai jurnal, ia juga aktif mempresentasikan makalah dalam berbagai kegiatan seminar, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Buku berjudul "Pergerakan Sarekat Abang dan Eskalasi Konflik dalam Perang Kelambit di Rawas Tahun 1914-1920" mengungkap dinamika sosial dan politik masyarakat Rawas (sekarang Musi Rawas Utara) pada awal abad ke-20 ketika wilayah tersebut masih berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebagai daerah yang relatif jauh dari pusat kekuasaan Karesidenan Palembang, Rawas mengalami kondisi sosial ekonomi yang berat akibat panen yang buruk, kebijakan pajak, serta kerja paksa pembangunan jalan. Situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian di sepanjang Sungai Rawas dan Sungai Rupit.

Dalam kondisi tersebut, berkembang ajaran ilmu abang yang diyakini memberikan kekuatan dan kekebalan kepada pengikutnya, yang kemudian melahirkan gerakan Sarekat Abang. Kehadiran Sarekat Islam di Rawas pada tahun 1914 turut mempercepat mobilisasi masyarakat karena menawarkan harapan pembebasan atau keringanan pajak. Namun, dinamika gerakan ini kemudian berkembang menjadi konflik dengan pemerintah kolonial yang mencapai puncaknya dalam Perang Kelambit tahun 1916.

Melalui pendekatan sejarah dan analisis sosial, buku ini menelusuri kemunculan, perkembangan, serta berakhirnya gerakan Sarekat Abang di Rawas hingga akhirnya tereliminasi dari panggung sejarah seiring dengan pelarangan Sarekat Islam oleh pemerintah kolonial pada tahun 1920. Buku ini menghadirkan perspektif penting tentang perlawanan lokal dan dinamika gerakan sosial dalam sejarah kolonial di Sumatera Selatan.

Penerbit Nakomu
kertasentuh@gmail.com
penerbitkertasentuh

QRCBN : 62-441-9759-026